

PENINGKATAN AMBISI IKLIM

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

MORATORIUM HUTAN REDD+

PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI

REDD+

ANALISIS WACANA

PERUBAHAN IKLIM

DAN NDC INDONESIA

DI MEDIA

MORATORIUM SAWIT
KEHUTANAN DAN PERUBAHAN IKLIM

NANALISIS NDC

KOMITMEN IKLIM INDONESIA
PENURUNAN EMISI SEKTOR KEHUTANAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
RESTORASI GAMBUT

HUTAN DAN IKLIM

REDD+

Analisis Wacana Perubahan Iklim dan NDC Indonesia di Media

Oleh : Firdaus Cahyadi

1. Latarbelakang

Perubahan iklim adalah isu lingkungan hidup yang populer akhir-akhir ini. Indonesia adalah salah satu negara yang bukan hanya terdampak perubahan iklim, namun juga berkomitmen ikut serta mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai penyebab perubahan iklim.

Salah satu sektor yang menjadi target pengurangan emisi GRK dari Indonesia selain dari kehutanan juga dari sektor energi. Apalagi Indonesia telah berkomitmen dengan mencanangkan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dan 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030 dalam dokumen National Determined Contribution (NDC).

NDC adalah dokumen yang dikembangkan untuk mewujudkan kesepakatan Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang menetapkan batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius atau di bawah 1,5 derajat Celcius (secara optimis) dibandingkan dengan periode pra-industri.

Terkait dengan itulah dilakukan analisis jejaring wacana tentang perubahan iklim dan NDC Indonesia. Analisis wacana dilakukan dengan menggunakan tools Discourse Network Analysis (DNA). Discourse network analysis merupakan suatu teknik untuk memvisualkan wacana baik itu wacana politik, sosial, budaya dan lainnya ke dalam sebuah jaringan. Discourse Network Analysis merupakan kombinasi dari category-based content analysis dan social network analysis. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi secara sistematis suatu struktur wacana dalam berbagai dokumen tekstual seperti artikel koran/media cetak, transkrip perdebatan di parlemen, dsb.

Pentingnya suatu topik, posisi dan argumen dalam sebuah perdebatan dapat diidentifikasi melalui aktor sentral dalam sebuah wacana. Selanjutnya discourse network analysis memungkinkan kita menemukan koalisi wacana berdasarkan kesamaan pernyataan, argumen dan posisi kebijakan.

Discourse Network Analyzer (DNA), yang merupakan perangkat lunak berbasis JAVA yang dikembangkan oleh Philip Leifeld dari Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag) dan Institute of Political Science, University of Bern. Hasil dari olahan Discourse Network Analyzer (DNA) ini kemudian divisualkan dengan menggunakan perangkat lunak Visone, UCINET, dll.

2. Metode Analisis

Sobur (2001:66) menyatakan bahwa analisis wacana terhadap teks media diperlukan untuk mengetahui bagaimana isi teks tersebut dan pesan yang disampaikan. Berbeda dengan analisis kuantitatif yang lebih menekankan pada pertanyaan “apa”, analisis wacana lebih melihat pada “bagaimana dari pesan atau teks komunikasi” Analisis wacana atas isi teks menurut Van Dijk dalam Sobur (2001:71) juga menekankan bahwa wacana adalah salah satu interaksi, sebuah wacana dapat berfungsi sebagai suatu pernyataan (assertion), pertanyaan (question), tuduhan (accusation) atau ancaman (threat). Bahkan wacana juga dapat digunakan untuk mendiskriminasi atau mempersuasi orang lain untuk melakukan diskriminasi¹.

Analisis dilakukan terhadap data-data dari media online yang menjadi arus utama sejak tahun 2004 hingga 2019. Media online yang dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Kompas Group
2. Tempo.co
3. Bisnis Indonesia online
4. Media Indonesia
5. Jakarta Post
6. Detik
7. Antara
8. Tirto
9. Kumparan
10. Republika
11. Mongabay.co.id
12. Kontan
13. Gatra
14. Jawa Pos News Networks (JPNN)
15. Suara Pembaruan
16. CNN Indonesia
17. Harian Ekonomi Neraca
18. Sindo

Metode pengumpulan datanya adalah memasukan kata kunci di google dan juga di portal berita yang bersangkutan. Adapun kata kunci yang digunakan adalah sbb:

1. Hutan dan iklim (kehutanan dan perubahan iklim)
2. Penurunan emisi sektor kehutanan
3. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD+)
4. NDC kehutanan
5. Rehabilitasi hutan dan lahan
6. Restorasi gambut
7. Moratorium hutan
8. Moratorium sawit

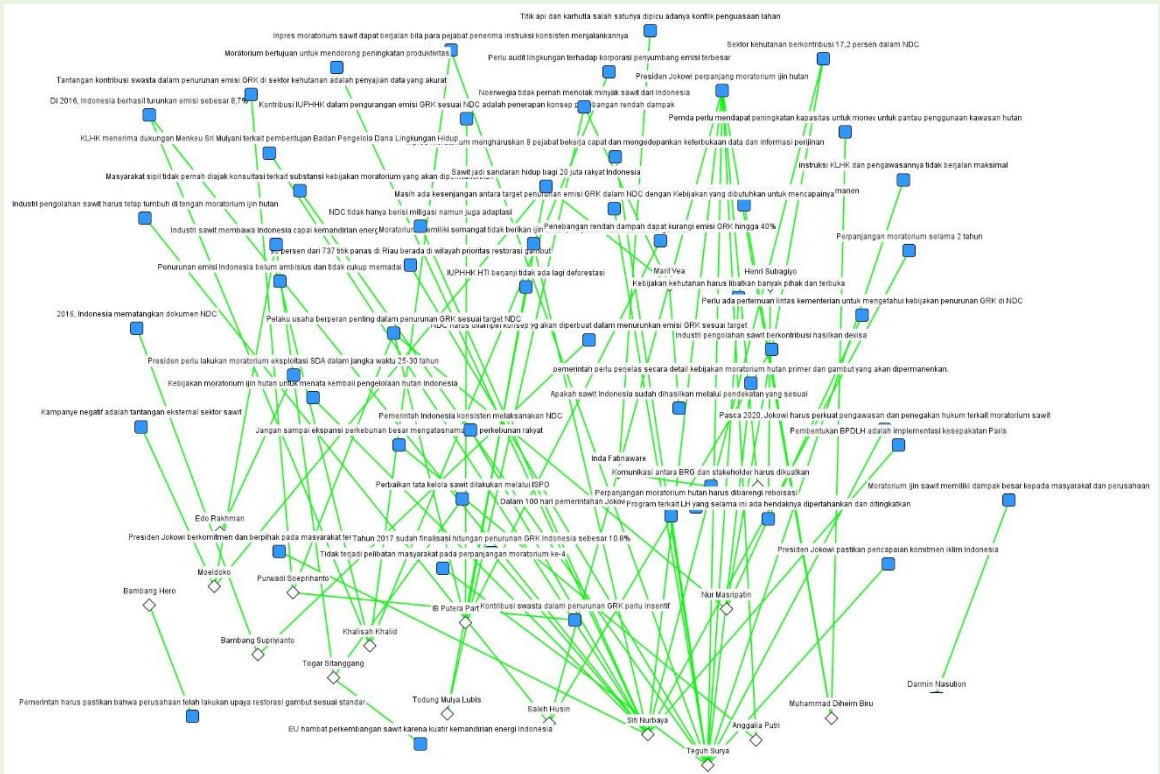
¹ Umi Halwati, Dosen Stain Purwokerto, Analisis Foucault Dalam Membedah Wacana Teks Dakwah Di Media Massa

9. Komitmen iklim Indonesia
10. Kebakaran hutan dan lahan
11. Peningkatan ambisi iklim
12. Biodisel
13. Biofuel

Data-data tersebut kemudian dipilah yang terkait dengan Indonesia. Artinya, artikel perubahan iklim dan energi bersih yang tidak terkait dengan Indonesia tidak dimasukkan dalam bahan yang akan analisis. Data yang terkumpul kemudian dimasukkan dalam software DNA untuk dianalisis.

3. Analisis

A. Antara



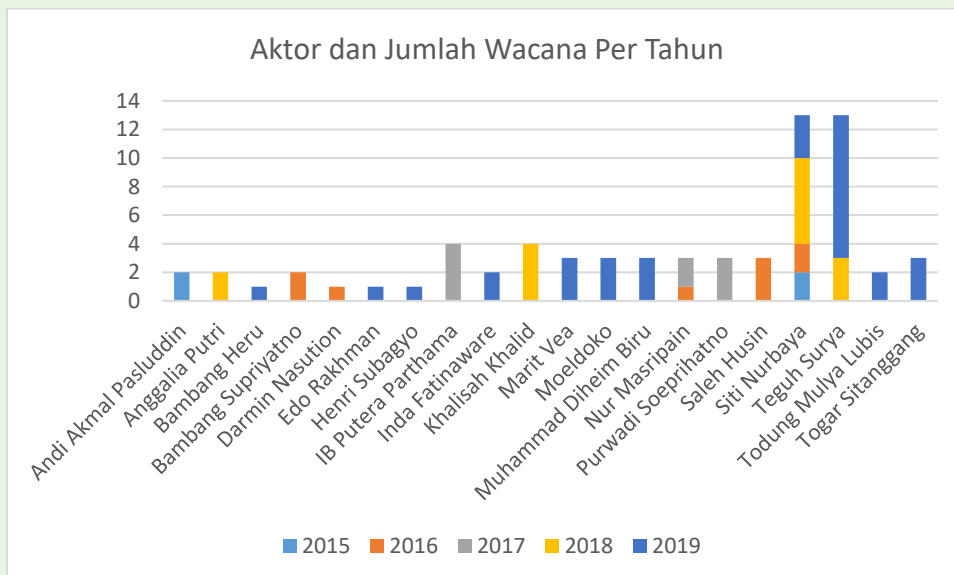
Data artikel yang dikumpulkan dari Antara ini diambil sejak tahun 2015 hingga 2019. Di atas adalah peta dari persebaran aktor dan wacana yang dibangunnya. Aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh Antara antara lain sebagai berikut:

No	Aktor	Lembaga/ Organisasi
1	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
2	Andi Akmal Pasluddin	Anggota Komisi IV DPR
3	Bambang Supriyanto	Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi KLHK
4	Nur Masripatin	Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
5	Saleh Husin	Menteri Perindustrian
6	Darmin Nasution	Menko Perekonomian
7	IB Putera Parthama	Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK
8	Teguh Surya	Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan
9	Anggalia Putri	Direktur Program Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan
10	Khalisah Khalid	Kepala Departemen Kampanye Walhi

11	Muhammad Diheim Biru	Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)
12	Todung Mulya Lubis	Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia
13	Marit Vea	Penasihat Politik Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim Norwegia
14	Edo Rakhman	Juru Kampanye Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
15	Moeldoko	Kepala KSP
16	Purwadi Soeprihanto	Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
17	Togar Sitanggang	Wakil Ketua Umum GAPKI
18	Henri Subagiyo	Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law
19	Prof. Bambang Hero	Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB
20	Inda Fatinaware	Direktur Eksekutif Sawit Watch

Dalam data artikel yang berhasil didokumentasikan oleh Antara terlihat bahwa dalam kurun waktu 2015-2019, wacana yang paling banyak diperbincangkan oleh para aktor adalah persoalan perpanjangan moratorium izin hutan. Pemerintah, melalui Menteri KLHK Siti Nurbaya, merupakan aktor penggerak perbincangan terkait wacana ini. Hampir semua aktor dari pemerintah, parlemen (DPR), asosiasi perusahaan dan organisasi masyarakat sipil memperbincangkan wacana ini.

Pemilihan Aktor dan Framing Antara



Dari grafik di atas terlihat bahwa secara umum, wacana tentang perubahan iklim dan NDC di sektor kehutanan banyak diproduksi pada tahun 2019 dan 2018. Dari sisi aktor, Siti Nurbaya dan Teguh Surya merupakan aktor yang paling sering memproduksi wacana. Bedanya, Siti Nurbaya lebih sering memproduksi wacana pada tahun 2018, sementara Teguh Surya paling sering memproduksi wacana pada tahun 2019.

Dari frekuensi pemilihan narasumber, dapat dilihat bahwa Antara dalam memberitakan isu perubahan iklim dan NDC kehutanan mengambil perspektif dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Hal tersebut nampak dari tidak didokumentasikan penolakan dari pihak-pihak yang menolak moratorium hutan alam atau pun sawit.

Meskipun tidak ada penolakan yang didokumentasikan oleh Antara terkait wacana perpanjangan moratorium izin di hutan primer dan gambut. Namun dalam wacana moratorium izin sawit terlihat bahwa moratorium izin sawit tidak semulus dibandingkan perpanjangan moratorium izin di hutan primer dan gambut.

Seperti dikatakan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit cukup kompleks, karena memiliki dampak yang besar kepada masyarakat dan perusahaan². Narasi yang digunakan pemerintah dalam moratorium izin sawit ini adalah narasi ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan narasi peningkatan produktivitas ini pula, Menteri Perindustrian Saleh Husain menjamin bahwa moratorium tidak akan mengganggu industri sawit³.

Nampaknya narasi peningkatan produktivitas cukup ampuh untuk meredam resistensi dari asosiasi pengusaha sawit. Bahkan narasi peningkatan produktivitas sawit ini juga mendapatkan persetujuan dari organisasi masyarakat sipil untuk isu lingkungan hidup yang biasanya menggunakan narasi ekologi dalam kampanye maupun advokasinya. Direktur Program Hutan dan Iklim Yayasan Madani Berkelanjutan Anggalia Putri misalnya mengungkapkan bahwa Inpres Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, memperlihatkan inisiatif baik untuk lebih mengutamakan peningkatan produktivitas lahan ketimbang berekspansi ke kawasan hutan⁴.

Menariknya, meskipun inpres tentang moratorium sawit ini banjir dukungan, muncul pula wacana tentang prasyarat keberhasilan dari inpres ini. Salah satu syarat keberhasilan dari inpres moratorium ini dikemukakan oleh Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan⁵. Syarat itu adalah bila para pejabat penerima instruksi konsisten menjalankannya dan disertai kepemimpinan politik yang kuat dari Presiden Jokowi. Agar konsistensi pejabat penerima inpres, perlu pengawalan dari masyarakat terkait dengan implementasi inpres tersebut. Pesan dari pernyataan itu adalah agar publik tetap melakukan fungsi kontrol terhadap implementasi inpres tersebut.

Kritik pertama dari inpres moratorium izin sawit pun datang dari masyarakat sipil. Ketentuan yang mendapatkan kritik dari masyarakat sipil itu adalah alokasi 20% untuk perkebunan rakyat. Ketentuan alokasi 20 persen ini, menurut Anggalia Putri, perlu lebih diperjelas karena saat ini para pemangku kepentingan masih memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang hal ini, juga guna menghindari ekspansi perkebunan kelapa sawit

² <https://www.antaraneews.com/Berita/577750/Pemerintah-Masih-Finalisasi-Moratorium-Izin-Perkebunan-Sawit>

³ <https://www.antaraneews.com/Berita/557200/Menperin-Ingin-Industri-Sawit-Tetap-Tumbuh-Di-Tengah-Moratorium-Izin-Lahan>

⁴ <https://www.antaraneews.com/Berita/750589/Moratorium-Sawit-Selesaikan-Tumpang-Tindih-Kawasan-Hutan>

⁵ Ibid

skala besar dengan mengatasnamakan kebun rakyat⁶. Sayangnya, dalam artikel di Antara tidak dieksplorasi pemahaman yang berbeda-beda dari masing-masing pemangku kepentingan itu.

Pada tahun 2019, muncul wacana dari salah satu organisasi masyarakat sipil untuk menjadikan kebijakan moratorium perizinan untuk kawasan hutan primer dan gambut dipermanenkan. Narasi yang digunakan dalam wacana menjadikan moratorium izin di kawasan hutan primer dan gambut menjadi permanen itu narasi ekologi. Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru, upaya pemberlakuan moratorium ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi kekayaan biodiversitas untuk mencegah kepunahan, investasi jangka panjang, pemenuhan komitmen terhadap konvensi perubahan iklim internasional⁷. Pertanyaan berikutnya, apakah penggunaan narasi ekologi dalam persoalan hutan di Indonesia akan mampu meredam resistensi dari asosiasi perusahaan?

Menariknya wacana menjadikan moratorium izin hutan primer dan gambut permanen mendapatkan sorotan kritis dari organisasi masyarakat sipil lainnya. Menurut Teguh Surya dari Yayasan Madani Berkelanjutan, pemerintah perlu memperjelas secara detail kebijakan moratorium hutan primer dan gambut yang akan dipermanenkan. Tidak adanya detail dari kebijakan itu, menurutnya, mempersulit implementasi di lapangan. Bukan hanya terkait dengan detail kebijakan yang mendapatkan sorotan, namun juga tidak dilibatkannya masyarakat dalam penentuan kebijakan moratorium⁸.

Narasi ekonomi juga digunakan oleh pemerintah dalam hal ini KLHK terkait dengan isu NDC di sektor kehutanan Indonesia. KLHK melalui Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin misalnya, mengungkapkan bahwa dunia usaha berperan dalam upaya penurunan emisi GRK seperti yang ditargetkan dalam NDC⁹. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa target penurunan emisi GRK dalam NDC tidak akan mengganggu dunia usaha, bahkan mereka dapat berperan aktif. Narasi seperti ini tentu tidak akan mendapatkan penolakan dari dunia usaha. Bahkan mendapatkan persetujuan dari para pengusaha.

Wacana lain yang muncul dan perlu digarisbawahi adalah klaim pemerintah bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan GRK. Menurut Menteri KLHK Siti Nurbaya, data tahun 2016, Indonesia berhasil menurunkan emisi sebesar 8,7 persen dari berbagai sektor. Pada tahun 2017 penurunan emisi telah mencapai sekitar 16 persen¹⁰. Wacana keberhasilan penurunan emisi itu, meskipun diakui sebagai langkah positif, namun menuai kritik dari organisasi lingkungan hidup. Menurut Khalisah Khalid dari Walhi,

⁶ Ibid

⁷ <https://www.antarane.ws.com/Berita/919476/Cips-Moratorium-Perizinan-Kawasan-Hutan-Primer-Gambut-Harus-Permanen>

⁸ <https://www.antarane.ws.com/Berita/947569/Madani-Minta-Perjelas-Moratorium-Permanen-Di-Lahan-Gambut>

⁹ <https://www.antarane.ws.com/Berita/615386/Klhk-Usaha-Kehutanan-Berperan-Capai-Persetujuan-Paris>

¹⁰ <https://www.antarane.ws.com/Berita/774376/Indonesia-Mempertegas-Komitmen-Dalam-Mengatasi-Perubahan-Iklim>

pihaknya menilai upaya tersebut belum cukup memadai atau belum ambisius untuk menahan suhu Bumi naik melampaui 1,5 derajat celcius di 2030¹¹.

Wacana keberhasilan penurunan emisi GRK dari pemerintah tentu akan menarik bila ada pembandingan data dari pihak lain. Misalnya, berapa seharusnya penurunan emisi yang memadai dalam menahan suhu bumi tidak melampaui 1,5 derajat celcius di 2030.

Wacana lain yang diperbincangkan adalah persoalan kebijakan EU yang mengeluarkan sawit dari BBM nabati. Duta Besar RI untuk Kerajaan Norwegia Todung Mulya Lubis pun menjadi salah satu aktor pembangun wacana dalam soal ini. Menurutnya, Industri sawit, menjadi sandaran kehidupan bagi 20 juta masyarakat Indonesia. Ada 4,2 juta pekerja langsung di sektor kelapa sawit dan 2,4 juta petani sawit¹². Hal yang sama juga dikemukakan oleh Moeldoko, Kepala KSP. Baik Todung maupun Moeldoko dalam hal ini mencoba menggunakan narasi ekonomi dalam melawan narasi ekologi dari kebijakan EU, yang dalam mengeluarkan sawit dari BBM Nabati.

Bukan hanya narasi ekonomi, narasi nasionalisme pun digunakan untuk melawan narasi ekologi dari kebijakan EU. Menurut Wakil Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Togar Sitanggang industri sawit akan membawa Indonesia mencapai kemandirian energi. Siapa yang menguasai energi, mereka akan menguasai dunia¹³.

Secara garis besar framing yang digunakan Antara dalam pemberitaan isu perubahan iklim dan NDC di sektor kehutanan ini adalah melihat isu perubahan iklim sebagai persoalan penting bila tidak bertentangan dengan isu ekonomi. Konsekuensinya, Antara memberikan ruang yang lebih besar bagi narasi ekonomi dalam memberitakan persoalan kehutanan dan perubahan iklim. Bahkan dalam pemberitaan mengenai kasus dikeluarkannya sawit dari BBM nabati oleh EU, Antara bukan hanya memberikan ruang bagi narasi ekonomi melawan narasi ekologi, namun juga tidak berimbang dalam memberitakannya. Pemberitaan mengenai hal itu hanya menampilkan satu sisi saja dari pihak yang mendukung sawit, prespektif yang berbeda mengenai sawit dalam hal itu tidak mendapatkan ruang di pemberitaan Antara.

Sentiment Positif terhadap Kebijakan Moratorium Sawit dan NDC Kehutanan

Pemberitaan yang mengarahkan pembaca untuk menyetujui moratorium sawit (sentiment positif terhadap moratorium sawit) nampaknya mendominasi wacana yang didokumentasikan oleh Antara. Sentimen positif yang ditanamkan ke pemikiran pembaca terkait dengan moratorium sawit melalui narasi bahwa moratorium sawit tidak mengganggu industry. Hal itu dapat dilihat dari judul salah satu artikel, 'Menperin ingin industri sawit tetap tumbuh di tengah moratorium izin lahan'¹⁴.

¹¹ <https://www.antaraneews.com/Berita/775725/Cop-24-Momentum-Revisi-Target-Penurunan-Emisi>

¹² <https://www.antaraneews.com/Berita/933485/Dubes-Norwegia-Tidak-Tolak-Minyak-Sawit-Indonesia>

¹³ Ibid

¹⁴ <https://www.antaraneews.com/Berita/557200/Menperin-Inginkan-Industri-Sawit-Tetap-Tumbuh-Di-Tengah-Moratorium-Izin-Lahan>

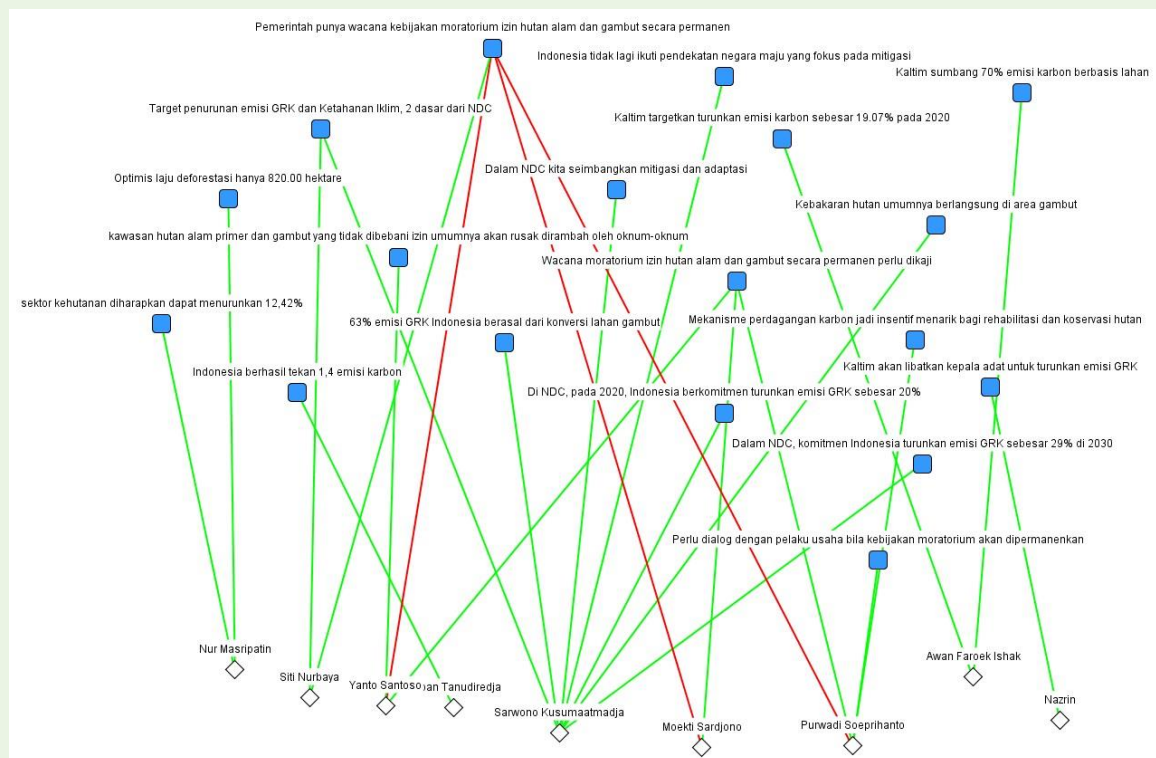
Selain itu sentiment positif itu juga ditanamkan ke pemikiran pembaca melalui narasi bahwa moratorium sawit akan menyelesaikan tumpang tindih kawasan hutan yang selama ini menjadi masalah pelik di Indonesia.

Hal itu dapat dilihat dari pemilihan judul salah satu artikel di Antara, ‘Moratorium sawit selesaikan tumpang tindih kawasan hutan¹⁵’. Meskipun dalam artikel tersebut, Teguh Surya mengingatkan perlunya syarat pengawalan terhadap kebijakan moratorium sawit. Namun, Antara lebih memilih judul itu daripada judul tentang pra-syarat keberhasilan kebijakan moratorium sawit atau perlunya kebijakan moratorium sawit mendapat kawalan dari masyarakat.

Terkait dengan NDC di sektor kehutanan, Antara juga memberitakannya dengan sentiment positif. Sentimen positif itu terlihat dari artikel-artikel berita Antara yang tidak mendokumentasikan pihak-pihak yang mengkritisi proses penyusunan dari NDC di sektor kehutanan itu sendiri. Narasi yang ingin ditanamkan ke pembaca, seakan-akan tidak ada persoalan dengan proses penyusunan NDC.

Lebih jauh, Antara membangun sentiment positif terkait dengan NDC sektor kehutanan dengan narasi bahwa penyusunan NDC kehutanan adalah bagian dari niat baik pemerintah dalam mengimplementasikan perjanjian iklim Paris. Tanpa pernah menuliskan pemberitaan mengenai bagaimana proses dari penyusunan NDC itu sendiri.

B. Bisnis Indonesia



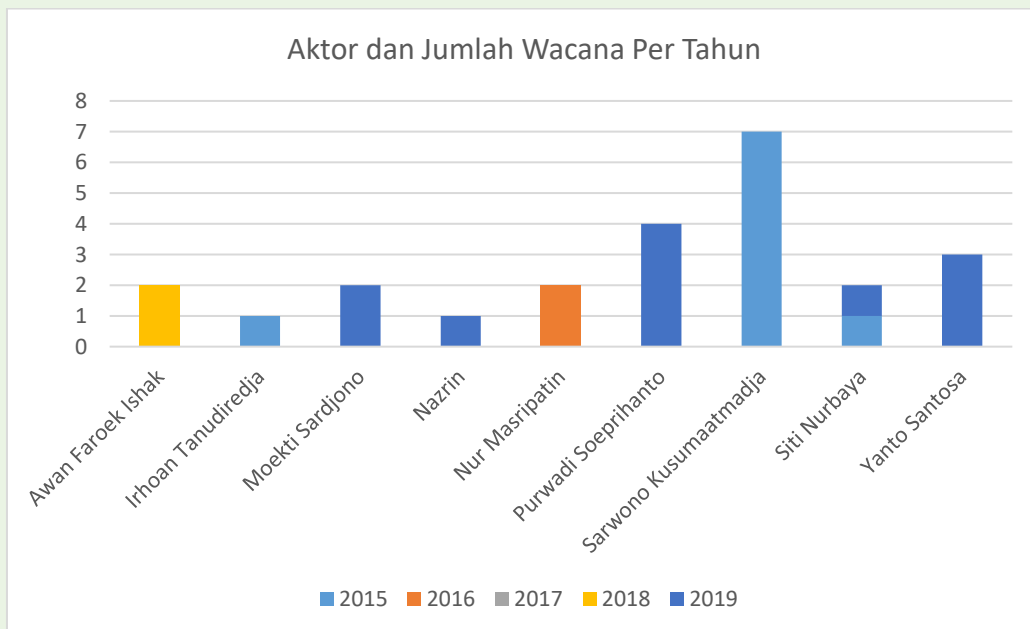
¹⁵ <https://www.antaranews.com/Berita/750589/Moratorium-Sawit-Selesaikan-Tumpang-Tindih-Kawasan-Hutan>

Data artikel yang dikumpulkan dari Bisnis Indonesia diambil dari tahun 2015 hingga 2019. Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh Bisnis Indonesia. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh Bisnis Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
2	Sarwono Kusumaatmadja	Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Tingkat Nasional
3	Irhoan Tanudiredja	Senior partner PwC Indonesia
4	Nur Masripatin	Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
5	Awan Faroek Ishak	Gubernur Kaltim
6	Purwadi Soeprihanto	Direktur Eksekutif APHI
7	Nazrin	Kepala Biro Perekonomian Kaltim
8	Moekti Sardjono	Direktur Eksekutif Gapki
9	Yanto Santosa	Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Wacana pemerintah yang akan menjadikan permanen moratorium izin di hutan primer dan lahan gambut, adalah wacana yang diperdebatkan dari para aktor pembangun wacana. Perdebatan ini dipicu oleh wacana yang dikeluarkan oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya pada acara diskusi interaktif bertajuk *Forest for Peace and Well-Being: Towards a Brighter Future*, di Asia Pacific Forestry Week (APFW) 2019 di Incheon, Korea Selatan.

Pemilihan Aktor dan Framing Bisnis Indonesia



Dari grafik di atas nampak bahwa wacana perubahan iklim dan NDC di sektor kehutanan paling banyak diproduksi pada tahun 2015. Sarwono Kusumaatmadja dan Purwadi Soeprihanto adalah aktor yang paling aktif memproduksi wacana. Sarwono

Kusumaatmadja aktif memproduksi wacana pada tahun 2015, sedangkan Purwadi Soeprihanto pada tahun 2019.

Dari pemilihan aktor yang menjadi narasumber pemberitaan di Bisnis Indonesia nampak bahwa perspektif yang digunakan media ini dalam memberitakan isu perubahan iklim dan NDC kehutanan adalah perspektif pemerintah dan pengusaha.

Perspektif pemerintah nampak dari pemberitaan terkait NDC Kehutanan. Sedangkan perspektif pengusaha nampak dalam pemberitaan terkait moratorium hutan dan sawit.

Dari pemilihan aktor Bisnis Indonesia juga terlihat bahwa perspektif dari organisasi lingkungan hidup tidak mendapatkan tempat sama sekali dalam pemberitaan perubahan iklim dan NDC kehutanan.

Sentimen Positif terhadap Penyusunan NDC Kehutanan

Sentimen positif terhadap penyusunan NDC kehutanan ditanamkan Bisnis Indonesia ke pikiran pembaca melalui narasi bahwa tidak ada persoalan dengan proses penyusunan NDC Kehutanan. Hal itu nampak dari tidak didokumentasikan pro dan kontra dalam proses penyusunan NDC Kehutanan.

Lebih jauh, Bisnis Indonesia justru membangun narasi dalam pemberitaannya bahwa penyusunan NDC kali ini tidak mengikuti agenda negara-negara maju. Narasi nasionalisme dibangun untuk menghasilkan sentiment positif terhadap penyusunan NDC Indonesia.

Narasi nasionalisme itu nampak dari pemberitaan Indonesia tidak lagi mengikuti pendekatan negara maju yang fokus pada mitigasi dalam menyusun NDC. Dalam NDC, Indonesia akan menyeimbangkan antara mitigasi dengan adaptasi¹⁶.

Sentimen positif lainnya terkait dengan NDC adalah munculnya inisiatif daerah dalam ikut menurunkan emisi GRK seperti target NDC. Pemprov Kalimantan Timur misalnya, menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 19,07% pada 2020, salah satunya menekan kerusakan hutan dan lahan. Bahkan untuk memenuhi target itu, Gubernur Kaltim Awan Faroek Ishak pun berjanji tidak segan memberikan sanksi kepada pelaku usaha di bidang kehutanan dan perkebunan yang tidak mampu mengendalikan karhutla¹⁷.

Sentimen positif dari pemberitaan di atas adalah bahwa tidak ada persoalan dengan partisipasi para pihak dalam menyusun NDC Indonesia. Hal itu terbukti munculnya inisiatif daerah untuk ikut berpartisipasi dalam memenuhi target NDC. Logika yang ingin dibangun adalah jika proses penyusunan NDC tidak partisipatif, tidak mungkin muncul inisiatif daerah untuk memenuhi target dalam NDC tersebut.

¹⁶ <https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20150903/79/468377/Berikut-Strategi-Indonesia-Dalam-Pengendalian-Iklim->

¹⁷ <https://Kalimantan.Bisnis.Com/Read/20180908/407/836504/Kaltim-Menargetkan-Tekan-Emisi-Karbon-1907>

Sentimen Negatif terhadap Pemberitaan Mengenai Moratorium Hutan dan Sawit

Meskipun dalam pemberitaan NDC Kehutanan, pemberitaan di Bisnis Indonesia memberikan sentiment positif, namun terkait dengan moratorium hutan dan sawit justru sebaliknya.

Sentimen negative terkait dengan moratorium izin hutan primer dibangun melalui narasi bahwa kebijakan moratorium itu tidak memperhitungkan aspek ekonomi. Padahal, menurut narasi Bisnis Indonesia, persoalan ekonomi adalah persoalan penting di Indonesia saat ini. Persoalan lingkungan tidak boleh mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Berita pada 21 Juni 2019 yang berjudul, “Setop Permanen Izin Baru Hutan Alam dan Lahan Gambut Perlu Dikaji”¹⁸, secara tegas memperlihatkan narasi pentingnya persoalan ekonomi di atas lingkungan hidup. Tentu saja yang dimaksud kepentingan ekonomi adalah kepentingan pengusaha di sektor perkebunan dan hutan.

Dalam artikel berita itu, bila mengacu pada konsep piramida terbalik dalam pemberitaan, Bisnis Indonesia menempatkan pernyataan penolak wacana menjadikan moratorium izin di hutan primer dan gambut permanen di awal berita. Sementara, pernyataan Menteri Siti Nurbaya di akhir berita. Penempatan ini bukan kebetulan, namun merupakan framing redaksi. Makna dari susunan penempatan ini adalah menganggap pernyataan pengusaha dan akademisi yang menolak wacana Menteri KLHK adalah pernyataan penting sementara pernyataan Menteri KLHK yang melontarkan wacana itu sendiri sebagai pernyataan yang tidak penting.

Pada artikel itu Menteri KLHK mengungkapkan bahwa kini pemerintah memiliki wacana untuk menjadikan baleid penundaan tersebut menjadi permanen. Konsekuensinya, pemerintah tidak akan mengeluarkan izin baru bagi korporasi terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Alam dan Lahan Gambut¹⁹. Narasi yang digunakan Menteri KLHK adalah narasi sosial dan ekologi. Menurut Menteri KLHK, moratorium izin di hutan primer dan lahan gambut telah berhasil dalam pengelolaan konflik, pencegahan kebakaran hutan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Wacana itupun mendapatkan resistensi dari kalangan pengusaha. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Moekti Sardjono mencoba melawan wacana dari Menteri KLHK itu dengan menggunakan narasi ekonomi.

Menurutnya, wacana setop izin hutan alam dan lahan gambut tidak hanya melihat pada aspek lingkungan, tapi juga ekonomi. Menurutnya, dengan pertambahan penduduk tentunya kita butuh space tidak hanya untuk tempat tinggal, infrastruktur, tapi juga pangan dan energi.

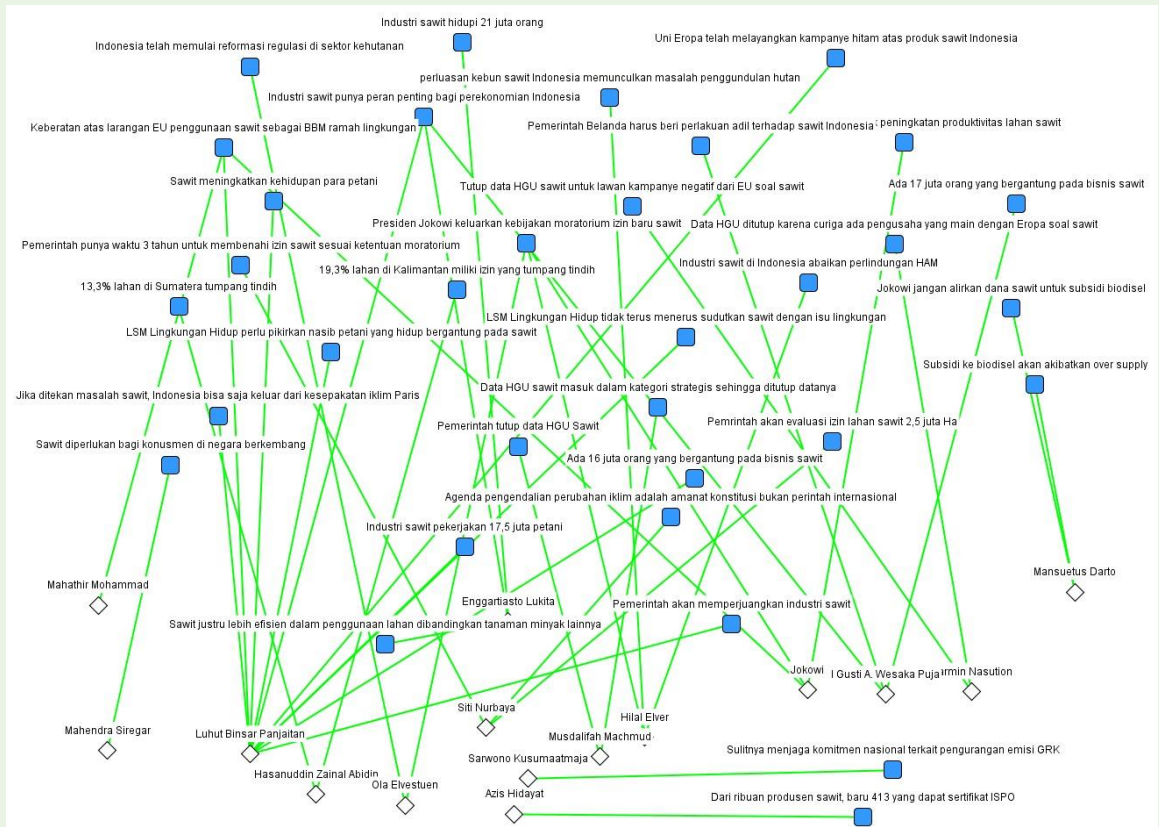
¹⁸ <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190621/99/936198/Setop-Permanen-Izin-Baru-Hutan-Alam-Dan-Lahan-Gambut-Perlu-Dikaji>

¹⁹ <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190621/99/936198/Setop-Permanen-Izin-Baru-Hutan-Alam-Dan-Lahan-Gambut-Perlu-Dikaji>

Narasi ekonomi yang dibangun oleh Direktur Gapki itu juga mendapatkan dukungan dari Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Yanto Santosa. Guru besar IPB tersebut mengungkapkan bahwa justru kawasan hutan primer yang tak diberikan ijin justru akan rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Pesan yang ingin disampaikan dari wacana ini adalah pemberian ijin konsesi di hutan primer dan gambut justru bermanfaat dalam menyelamatkan hutan dibandingkan tidak adanya izin eksploitasi di kawasan itu. Sementara itu, Purwadi Soeprihanto, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, mengharapkan rencana setop izin tersebut didiskusikan bersama-sama dengan para pelaku usaha yang bergerak pada sektor bisnis berbasis lahan²⁰.

Framing yang digunakan oleh Bisnis Indonesia dalam memberitakan isu perubahan iklim dan NDC di sektor kehutanan dengan menempatkan isu ekonomi di atas isu lingkungan hidup. Tak heran narasi-narasi ekonomi mendapatkan ruang cukup besar dalam pemberitaan di Bisnis Indonesia. Bahkan terkait dengan wacana untuk menjadikan moratorium izin di hutan primer dan gambut permanen, framing keberpihakan Bisnis Indonesia terhadap pengusaha di sektor kehutanan nampak jelas.

C. CNN Indonesia



Data artikel yang dikumpulkan dari CNN Indonesia ini diambil sejak tahun 2016 hingga 2019. Hal ini terkait ketersediaan data di CNNIndonesia.com. Di atas adalah peta jejaring

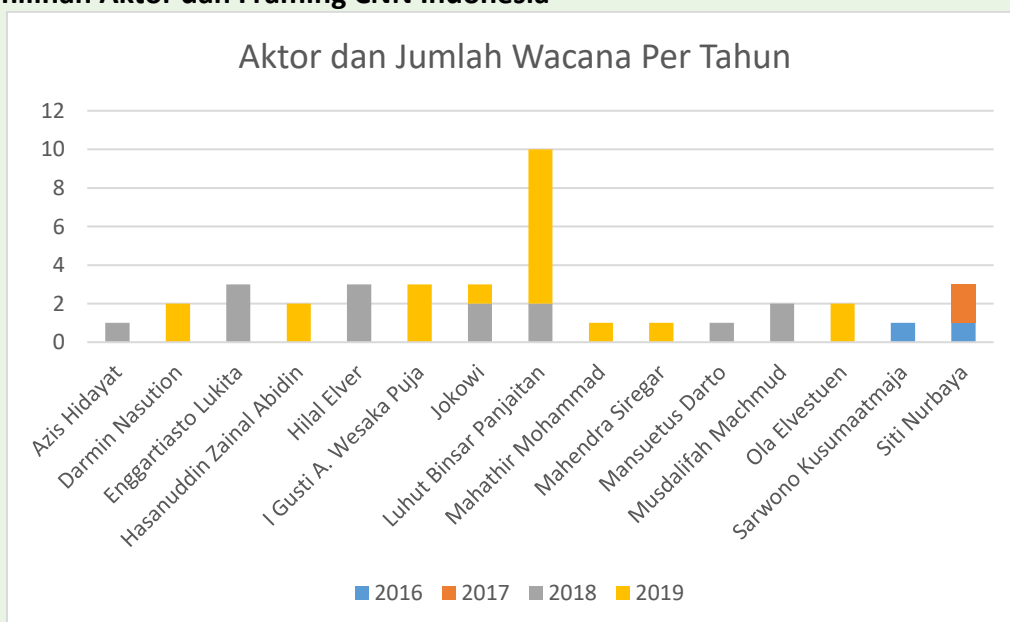
²⁰ Ibid

aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh CNN Indonesia. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh CNN Indonesia adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Sarwono Kusumaatmaja	Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim
2	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
3	Hilal Elver	Pelapor Khusus untuk Hak Atas Pangan Dewan HAM PBB
4	Luhut Binsar Panjaitan	Menko Maritim dan SDA
5	Joko Widodo	Presiden Indonesia
6	Mansuetus Darto	Direktur SPKS
7	Azis Hidayat	Kepala Sekretariat Komisi ISPO
8	Enggartiasto Lukita	Menteri Perdagangan
9	Ola Elvestuen	Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia
10	Hasanuddin Zainal Abidin	Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)
11	I Gusti A. Wesaka Puja	Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda
12	Darmin Nasution	Menko Perekonomian
13	Mahatir Muhammad	Perdana Menteri Malaysia
14	Musdalifah Mahmud	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
15	Mahendra Siregar	Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries

Wacana yang menjadi penggerak perbincangan adalah terkait kebijakan EU yang mengeluarkan sawit dari BBM nabati. Aktor yang paling getol membela sawit dan melawan kebijakan EU soal sawit adalah Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menggunakan narasi ekonomi dan nasionalisme secara bersamaan dalam membela sawit tersebut.

Pemilihan Aktor dan Framing CNN Indonesia



Dari grafik di atas terlihat bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC di sektor kehutanan paling banyak diproduksi pada 2019 dan 2018. Menteri Koordinator Maritim dan SDA Luhut Pandjaitan menjadi aktor yang paling aktif memproduksi wacana.

Dari pemilihan aktor tersebut nampak bahwa dalam pemberitaan terkait perubahan iklim dan NDC kehutanan, perspektif yang digunakan oleh CNN Indonesia adalah perspektif pemerintah. Tidak ada narasumber berita dari kalangan masyarakat sipil juga menunjukkan bahwa sama sekali CNN tidak memberikan ruang terhadap suara-suara masyarakat sipil apalagi menggunakan perspektifnya dalam menulis berita.

Framing CNN Indonesia dalam memberitakan isu perubahan iklim dan NDC di sektor kehutanan ini adalah framing ekonomi. Narasi-narasi ekonomi mendapatkan ruang yang lebih daripada narasi ekologi dalam memberitakan isu perubahan iklim dan NDC di sektor kehutanan. Bahkan, aktor yang mendapatkan tempat dalam pemberitaan dalam isu ini adalah pihak yang berlatarbelakang pemerintah dan asosiasi pengusaha. Wacana dari masyarakat sipil tidak mendapatkan tempat sama sekali.

Sentimen Positif terhadap Perkebunan Sawit

Sentimen positif terhadap perkebunan sawit dalam pemberitaan CNN Indonesia dibangun melalui dua narasi besar. Narasi nasionalisme dan ekonomi. Narasi nasionalisme muncul berpijak pada narasi ekonomi, bahwa sawit adalah komoditas penyumbang devisa negara. Dari narasi itu kemudian dikembangkan menjadi narasi nasionalisme bahwa gangguan terhadap sawit berarti mengancam kedaulatan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan misalnya menyatakan bahwa pemerintah tidak akan pernah didikte oleh negara-negara di dunia, khususnya Uni Eropa terkait hubungan perdagangan minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO)²¹.

Isu yang semula menggunakan narasi ekologi pun digeser menjadi persoalan kedaulatan negara terkait dengan intervensi asing. Luhut adalah unsur pejabat pemerintah yang paling dominan memproduksi wacana untuk memberikan pembelaan terhadap sawit, dibandingkan pejabat lainnya.

Namun, dalam pernyataan Luhut dengan narasi nasionalisme itu berpijak pada narasi ekonomi. Menurutnya, industri sawit yang saat ini menjadi penyumbang devisa terbesar. Industri sawit juga disebut mempekerjakan sekitar 17,5 juta petani²². Bahkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pun menggunakan kontra narasi ekologi yang berbasis narasi nasionalisme dalam membela sawit. Menurutnya, Indonesia bisa saja keluar dari Kesepakatan Iklim Paris jika minyak kelapa sawit Indonesia terus ditekan²³.

²¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190129192428-92-364853/Menko-Luhut-Pastikan-Uni-Eropa-Tak-Bisa-Dikte-Ri-Soal-Sawit>

²² Ibid

²³ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190408111843-85-384207/Jokowi-Dan-Mahathir-Mohammad-Surati-Uni-Eropa-Terkait-Sawit>

Narasi ekonomi tentang ekspor sawit yang besar dari Menko Maritim Luhut Panjaitan, diamini oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa ekspor produk sawit berkontribusi sekitar 13,7 persen dari total ekspor tahun 2017 sebesar US\$168,8 miliar. Narasi ekonomi juga digunakan oleh Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries Mahendra Siregar dalam membela sawit Indonesia²⁴.

Seperti halnya Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, industri sawit menjadi sumber pendapatan bagi 5,3 juta pekerja dan menghidupi sebanyak 21 juta orang. Sebanyak 10 juta orang juga diklaim berhasil keluar dari garis kemiskinan berkat industri tersebut. Bahkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga menggunakan kontra narasi ekologi dalam membela sawit Indonesia. Menurutnya, sawit justru terbilang efisien dalam penggunaan lahan dibanding tanaman penghasil minyak lainnya, seperti kedelai dan jagung²⁵.

Pembelaan terhadap sawit atas kebijakan EU juga datang dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda I Gusti A. Wesaka Puja. Narasi yang dipakai masih narasi ekonomi. Namun yang menarik adalah klaim soal jumlah petani yang tergantung pada sawit. Menurutnya, ada lebih dari 17 juta penduduk menggantungkan hidup pada industri kelapa sawit, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶ Angka ini berbeda dengan klaim Menko Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya. Pertanyaan mendasarannya adalah darimana dan bagaimana cara menghitungnya sehingga muncul klaim-klaim angka tersebut?

Jika CNN Indonesia.com mengeksplorasi wacana ini, dari ‘perang’ data penggunaan lahan hingga klaim yang berubah-ubah terkait petani yang bergantung pada sawit, akan menjadi perdebatan publik yang menarik dan mencerdaskan. Sayang sekali itu tidak dieksplorasi, sehingga wacana ini hanya menjadi wacana tunggal tanpa perbandingan.

Wacana lain yang menjadi perbincangan adalah terkait dengan moratorium sawit. Narasi yang dipakai pemerintah dalam moratorium izin sawit ini adalah narasi ekonomi, terkait memaksimalkan produktivitas sawit itu sendiri²⁷. Pilihan menggunakan narasi ekonomi ini nampaknya bukan suatu kebetulan, namun memang melalui berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya mungkin mengurangi resistensi pihak-pihak yang menolak kebijakan moratorium itu.

Sentimen Negatif terhadap Pihak yang ‘Melawan Sawit’

Bila terhadap perusahaan sawit CNN Indonesia membangun sentiment positif, sebaliknya terhadap organisasi lingkungan hidup. Sentimen negative terhadap pihak-pihak yang

²⁴ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181101171659-92-343269/Pemerintah-Klaim-Industri-Sawit-Mampu-Pangkas-Kemiskinan?>

²⁵ Ibid

²⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190418175807-92-387717/Pemerintah-Ri-Desak-Belanda-Berlaku-Adil-Pada-Minyak-Sawit>

²⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180921163051-92-332121/Jokowi-Incar-Perusahaan-Sawit-Nakal-Di-Kawasan-Hutan-Liar?>

ditengarai melawan sawit, termasuk organisasi lingkungan hidup itu dibangun melalui narasi yang membenturkan organisasi lingkungan hidup dengan petani.

Narasi itu muncul dalam artikel berita yang mengutip pernyataan Menteri Luhut bahwa Organisasi Masyarakat Sipil yang bergerak di isu lingkungan hidup yang memojokan sawit kurang peduli terhadap nasib petani. Luhut menghimbau LSM juga mempertimbangkan nasib jutaan petani dan pekerja yang bergantung pada industri kelapa sawit dan turunannya²⁸.

Pesan yang ingin disampaikan dalam narasi ini bahwa LSM-LSM lingkungan hidup selama ini kurang peduli dengan nasib petani. Lebih jauh pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa isu lingkungan hidup yang dikampanyekan LSM-LSM itu tercerabut dari akar persoalan rakyat. CNN Indonesia sama sekali tidak memberikan ruang bagi organisasi lingkungan hidup untuk melakukan counter wacana yang diproduksi Menteri Luhut.

Bukan hanya organisasi lingkungan yang melawan sawit. Perusahaan yang ditengarai menginginkan transparansi dalam pengelolaan HGU pun mendapatkan sentiment negative.

Hal itu nampak dari perbincangan terkait wacana ditutupnya data HGU Sawit oleh pemerintah bagi publik. Perbincangan wacana itu digerakan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Pangan dan Pertanian Musdalifah Machmud. Ia menyatakan pemerintah membatasi akses data dan informasi HGU perkebunan kelapa sawit demi melindungi data dan informasi kelapa sawit yang bersifat strategis bagi ketahanan ekonomi nasional dan dalam rangka perlindungan kekayaan alam Indonesia²⁹.

Bahkan wacana ditutupnya data HGU Sawit, menurut Menko Ekonomi Darmin Nasution disebabkan kecurigaan ada pengusaha di sektor tersebut yang 'main mata' dengan Uni Eropa. Aksi 'main mata' tersebut diduga sengaja dilakukan demi kepentingan bisnis pribadi pebisnis. Lebih jauh, Menteri Darmin mengungkapkan bahwa ditutupnya data HGU sawit untuk melawan kampanye negative terhadap sawit dari EU³⁰.

Narasi nasionalisme dan ekonomi digunakan sebagai justifikasi kebijakan itu. Wacana dari Menko Darmin Nasution ini adalah bagian dari strategi *kill the messenger*, membunuh pembawa pesan. Dengan labeling pihak-pihak yang mendorong transparansi data HGU Sawit adalah untuk kepentingan pribadi dan bermain dengan asing, maka semua wacana yang mengungkapkan bahwa informasi HGU adalah informasi publik menjadi tidak relevan.

²⁸ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190408111843-85-384207/jokowi-dan-mahathir-mohammad-surati-uni-eropa-terkait-sawit>

²⁹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190508204026-92-393201/darmin-curiga-ada-pengusaha-main-dengan-eropa-soal-sawi>

³⁰ Ibid

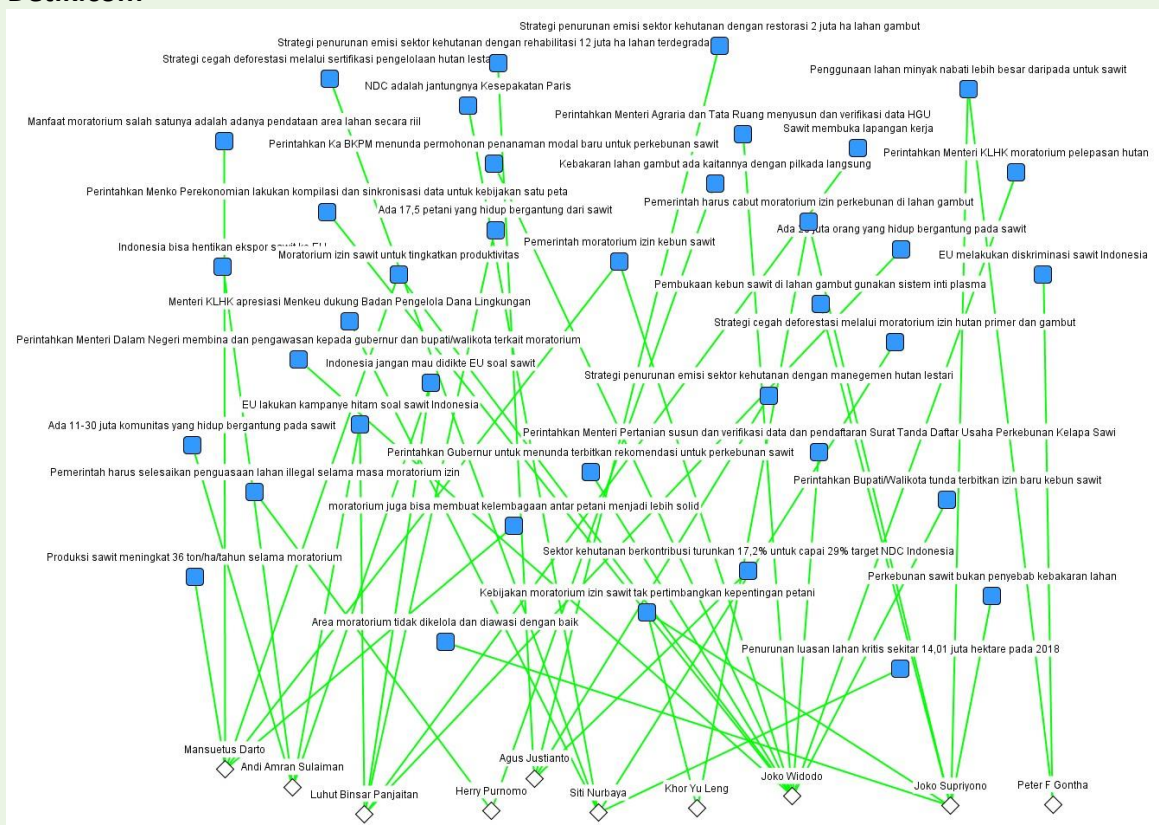
Pesan yang ingin disampaikan dari wacana itu adalah bahwa pihak-pihak yang menginginkan data HGU dibuka, baik dari kalangan pengusaha maupun organisasi masyarakat sipil, adalah pihak-pihak yang kurang rasa nasionalismenya. Mereka bermain mata dengan kepentingan asing.

Catatan lainnya: Klaim data yang berubah-ubah

Dari berbagai wacana yang muncul ada catatan menarik yang perlu dicermati mengenai klaim penggunaan data terkait jumlah petani yang tergantung pada sawit.

Menurut Luhut, jumlah petani yang bergantung pada sawit sebanyak 20 juta petani di baik langsung maupun tidak langsung³¹. Sementara itu, klaim jumlah petani terkait sawit di berita ini (Jokowi dan Mahathir Mohammad Surati Uni Eropa Terkait Sawit CNN Indonesia, Senin, 08/04/2019) lebih besar daripada klaim sebelumnya pada berita yang berjudul, “Menko Luhut Pastikan Uni Eropa Tak Bisa Dikte RI soal Sawit di CNN Indonesia pada Selasa, 29/01/2019³². Perbedaan klaim atas data ini bisa menjadi pintu masuk untuk mendelegitimasi argumentasi para pembela sawit.

D. Detik.com



³¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190408111843-85-384207/jokowi-dan-mahathir-mohammad-surati-uni-eropa-terkait-sawit>

³² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190129192428-92-364853/menko-luhut-pastikan-uni-eropa-tak-bisa-dikte-ri-soal-sawit>

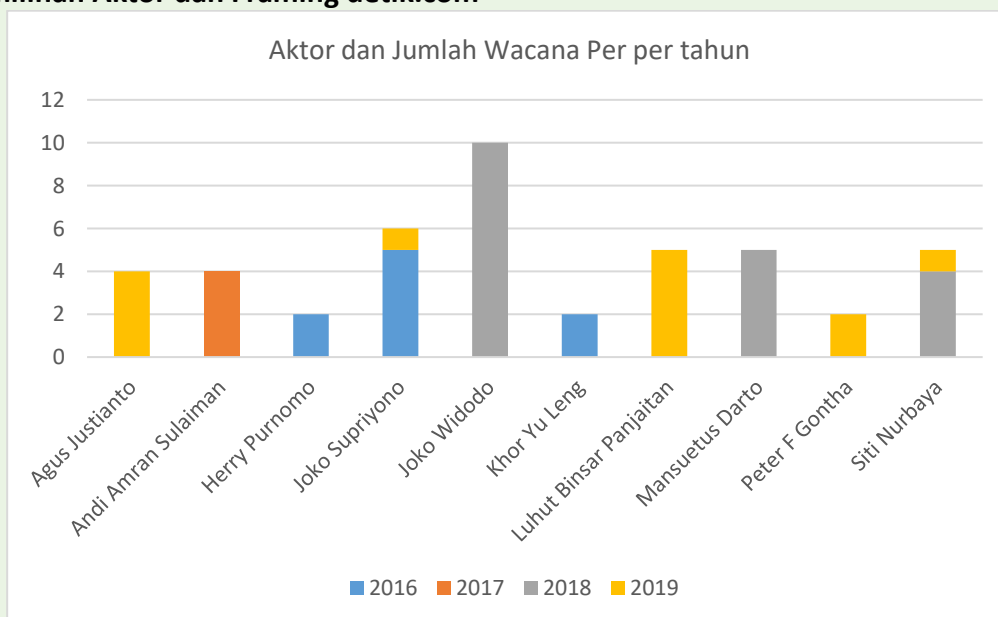
Data artikel yang diambil dari detik.com ini dimulai dari tahun 2016 – 2109. Hal ini disebabkan tidak banyak ketersediaan artikel terkait dengan isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan yang dipublish detik.com sebelum tahun tersebut. Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh detik.com.

Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh detik.com adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Joko Supriyono	Ketua Umum GAPKI
2	Khor Yu Leng	Peneliti Sosial Ekonomi dari LMC International
3	Herry Purnomo	Peneliti CIFOR
4	Andi Amran Sulaiman	Menteri Pertanian (Mentan)
5	Agus Justianto	ASEAN Senior Officer on Forestry (ASOF) Leader dari Indonesia
6	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
7	Joko Widodo	Presiden Indonesia
8	Mansuetus Darto	Ketua Umum SPKS
9	Luhut Binsar Panjaitan	Menko Maritim dan SDA
10	Peter F Gontha	Duta Besar RI untuk Polandia

Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Siti Nurbaya dan Joko Supriyono adalah aktor-aktor yang dominan dalam memproduksi wacana terkait persoalan perubahan iklim dan kehutanan di detik.com. Joko Widodo dan Siti Nurbaya memproduksi wacana terkait dengan moratorium sawit dan kebijakan pro perubahan iklim. Sementara Luhut Binsar Panjaitan dan Joko Supriyono banyak memproduksi wacana dalam rangka membela kepentingan industry sawit.

Pemilihan Aktor dan Framing detik.com



Dari grafik di atas terlihat bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC kehutanan banyak diproduksi pada tahun 2018. Sedangkan aktor yang paling dominan memproduksi wacana adalah Presiden Jokowi, disusul kemudian Joko Supriyono. Presiden Jokowi aktif memproduksi wacana pada tahun 2018. Sedangkan Joko Supriyono aktif memproduksi wacana pada tahun 2016.

Dari pemilihan aktor yang dilakukan, terlihat bahwa detik.com dalam memberitakan perubahan iklim dan NDC kehutanan menggunakan prespektif pemerintah dan perusahaan perkebunan sawit dan hutan. Tidak adanya narasumber dari sisi aktivis lingkungan hidup juga menunjukkan bahwa dalam persoalan perubahan iklim, detik.com, menilai kurang penting atau bahkan tidak penting sama sekali menggunakan prespektif dari organisasi lingkungan hidup.

Framing yang digunakan detik.com dalam memberitakan isu seputar perubahan iklim dan NDC di sektor kehutanan ini adalah framing ekonomi. Persoalan perubahan iklim dan lingkungan hidup adalah persoalan penting selama itu tidak mengganggu kepentingan ekonomi. Pemberitaan yang hanya memberikan ruang kepada para pembela sawit dalam melawan kebijakan EU adalah salah satu contoh framing tersebut dilakukan.

Sentimen Positif terhadap Perkebunan Sawit

Sentimen positif terhadap perkebunan sawit juga muncul dalam pemberitaan detik.com. Sentimen positif terhadap perkebunan sawit ditanamkan ke pemikiran pembaca melalui narasi ekonomi hingga nasionalisme.

Wacana yang banyak diperbincangkan di detik.com adalah tentang kebijakan EU yang mengeluarkan sawit dari BBM Nabati. Kebijakan EU itu mendapat resistensi di dalam negeri, baik dari pemerintah maupun kalangan dunia usaha. Salah satu aktor pembangun wacana yang membela sawit Indonesia terhadap kebijakan EU adalah Peter F Gontha Duta Besar RI untuk Polandia.

Wacana yang dibangunnya adalah dalam penggunaan lahan, sawit lebih efisien dibandingkan tanaman minyak nabati lainnya. Dari wacana ini kemudian ia menilai bahwa kebijakan EU yang mengeluarkan sawit dari BBM Nabati adalah sebuah diskriminasi³³.

Dari basis kontra narasi ekologi itu kemudian Peter F Gontha membangun wacana nasionalisme. Peter F Gontha mengungkapkan dalam pendapatnya terkait diskriminasi EU terhadap sawit, bahwa imperialisme dan kolonialisme adalah istilah masa lalu, jangan sampai ini menjadi kendala dalam perdamaian antar umat di dunia³⁴. Istilah imperialisme dan kolonialisme ini tentu ditujukan kepada EU yang pada masa lalu memiliki sejarah kelam dengan hal itu.

³³ https://News.Detik.Com/Kolom/D-4507446/Kelapa-Sawit-Dan-Diskriminasi-Uni-Eropa?_Ga=2.229216732.1955240372.1562739388-1042799289.1562739388

³⁴ Ibid

Kontra narasi ekologi yang dibangun Peter F Gontha juga diamini oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono. Dari basis kontra narasi ekologi itu, Joko Supriyono membangun wacana bahwa tidak benar bahwa sawit penyebab deforestasi³⁵.

Berbeda dengan Peter F Gontha dan Joko Supriyono, Menko Maritim dan SDA Luhut Binsar Panjaitan menggunakan narasi ekonomi dalam membela sawit dan melawan kebijakan EU. Menurut Luhut Binsar Pandjaitan hampir 20 juta orang bergantung dari komoditas sawit³⁶. Wacana yang ingin dibangun dengan narasi ekonomi itu adalah bahwa kebijakan EU tentang sawit merupakan 'serangan' ekonomi daripada persoalan lingkungan hidup. Sehingga kebijakan EU terhadap sawit pun diberikan label kampanye hitam.

Tak hanya menggunakan narasi ekonomi dalam membangun wacana melawan kebijakan EU terkait sawit. Menko Maritim dan SDA Luhut Binsar Panjaitan pun menggabungkan narasi ekonomi dan nasionalisme. Menurut Luhut, persoalan kelapa sawit karena menyangkut 17,5 juta petani. Dari basis narasi ekonomi itulah Luhut membangun narasi nasionalisme bahwa Indonesia tidak bisa didekte negara lain soal tata kelola hutan, termasuk sawit didalamnya³⁷. Namun, hal yang menarik di sini adalah klaim Luhut terkait dengan penerima manfaat dari sawit yang berubah-ubah. Narasi nasionalisme dalam membela sawit juga digunakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, masalah sawit merupakan urusan pertanian dalam negeri, sehingga Indonesia jangan mau didikte³⁸.

Wacana lain yang menjadi perbincangan publik di detik.com adalah persoalan moratorium izin sawit. Kebijakan moratorium sawit disambut positif oleh petani sawit yang tergabung dalam Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Ketua SPKS Mansuetus Darto mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium sawit berhasil meningkatkan produktivitas sawit hingga 36 ton per tahun dari sebelumnya 12 ton per tahun³⁹. Ungkapan Ketua SPKS itu seakan membenarkan penggunaan narasi ekonomi yang digunakan Presiden Jokowi saat mengeluarkan kebijakan moratorium, yaitu meningkatkan produktivitas⁴⁰.

Beberapa akademisi dan pengusaha memang tidak secara langsung menolak kebijakan moratorium, baik moratorium sawit maupun izin hutan primer maupun gambut, namun mereka mengkritik dampak dari kebijakan itu. Anehnya, wacana dalam kritik mereka

³⁵ <https://Finance.Detik.Com/Industri/D-4485407/Sawit-Ri-Disebut-Merusak-Lingkungan-Seperti-Apa-Faktanya>

³⁶ <https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-4485720/Luhut-Ada-20-Juta-Orang-Hidup-Dari-Sawit? Ga=2.229216732.1955240372.1562739388-1042799289.1562739388>

³⁷ <https://Finance.Detik.Com/Industri/D-4405830/Luhut-Jelaskan-Jangan-Dikte-Ri-Soal-Kelapa-Sawit? Ga=2.229216732.1955240372.1562739388-1042799289.1562739388>

³⁸ <https://Finance.Detik.Com/Berita-Ekonomi-Bisnis/D-3472817/Eropa-Sentimen-Soal-Sawit-Ri-Mentan-Jangan-Mau-Didikte? Ga=2.186778593.872973683.1562739478-985038284.1562739478>

³⁹ <https://Finance.Detik.Com/Industri/D-4321277/Tanggapan-Petani-Soal-Rencana-Jokowi-Moratorium-Kebun-Kelapa-Sawit? Ga=2.62820073.432269260.1562739430-348732059.1562739430>

⁴⁰ <https://Finance.Detik.Com/Industri/D-4222419/Moratorium-Izin-Kebun-Kelapa-Sawit-Ini-Instruksi-Jokowi? Ga=2.62820073.432269260.1562739430-348732059.1562739430>

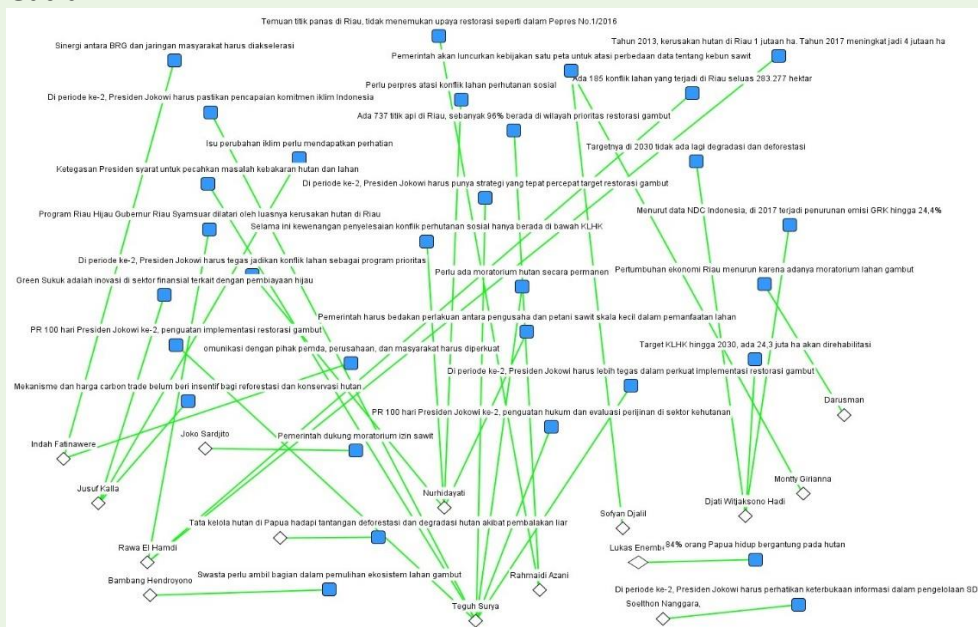
dibangun di atas klaim kepentingan petani. Sementara organisasi petaninya justru mendukung moratorium.

Menurut peneliti Sosial Ekonomi dari LMC International, Khor Yu Leng misalnya, mengungkapkan bahwa moratorium dan restorasi ini ternyata berdampak negatif pada kehidupan para petani kecil yang hidup dari tanaman sawit. Wacana itu didukung oleh Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono. Menurutnya, ekspansi lahan yang dilakukan petani rakyat bahkan lebih cepat dibanding perusahaan besar. Maka dampak moratorium lebih terasa bagi mereka. Ekspansi dilakukan untuk meningkatkan penghasilan⁴¹. Dalam kesempatan lain, Joko Supriyono juga meminta pemerintah mencabut kebijakan moratorium tersebut⁴².

Wacana lainnya yang menarik digarisbawahi adalah terkait klaim dari KLHK yang telah berhasil menurunkan jumlah lahan kritis di Indonesia. Menurut KLHK, pemerintah telah berhasil melakukan penurunan luasan lahan kritis yaitu sekitar 14,01 juta hektare pada 2018⁴³.

Wacana lainnya yang menarik adalah pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk mengawal implementasi dampak perubahan iklim⁴⁴. Apa dan bagaimana mekanisme kerja dari badan baru ini sejatinya menarik untuk menjadi perdebatan publik bila detik.com, melakukan eksplorasi terhadap wacana ini secara lebih dalam. Namun sayangnya, hal itu tidak dilakukan.

E. Gatra



⁴¹ <https://Finance.Detik.Com/Industri/D-3277449/Ada-Moratorium-Izin-Perkebunan-Sawit-Ini-Dampaknya-Ke-Petani-Kecil? Ga=2.186778593.872973683.1562739478-985038284.1562739478>

⁴² <https://Finance.Detik.Com/Industri/D-3276832/Pengusaha-Sawit-Minta-Moratorium-Izin-Di-Lahan-Gambut-Dicabut? Ga=2.215754206.872973683.1562739478-985038284.1562739478>

⁴³ <https://News.Detik.Com/Berita/D-4368445/Menteri-Lhk-Minta-Jajaran-Perkuat-Aksi-Korektif-Sejak-Awal-2019>

⁴⁴ <https://News.Detik.Com/Berita/D-4332702/Siti-Apresiasi-Menkeu-Dukung-Badan-Pengelola-Dana-Lingkungan? Ga=2.26955389.1975701372.1562739291-147137426.1562739291>

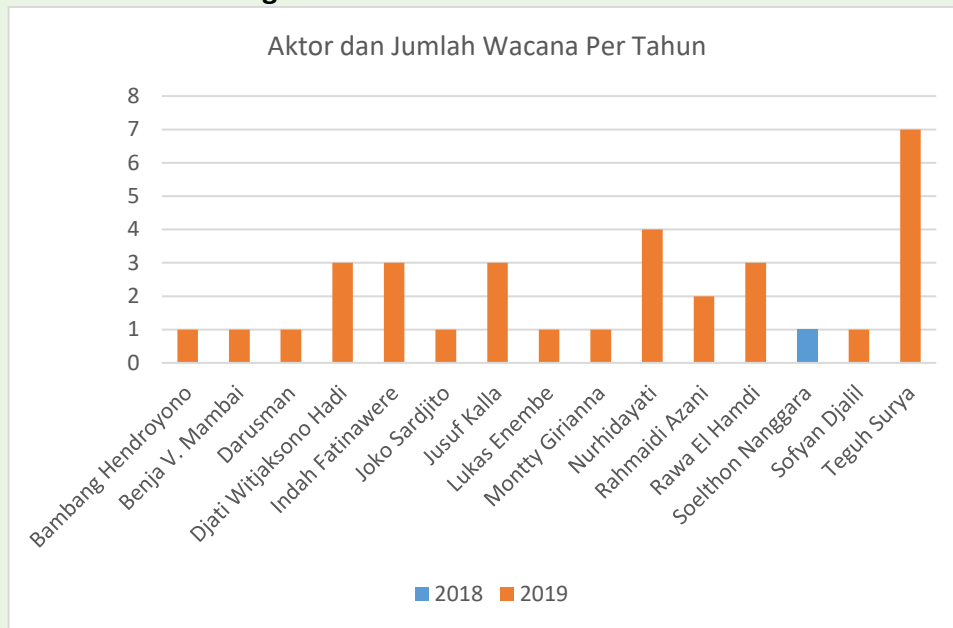
Data yang berhasil dikumpulkan dari gatra adalah data dari 2018-2019. Hal ini karena keterbatasan artikel yang tersedia di gatra terkait dengan artikel-artikel lama. Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh Gatra. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh Gatra adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Jusuf Kalla	Wakil Presiden Indonesia
2	Lukas Enembe	Gubernur Papua
3	Benja V. Mambai	Direktur WWF-Indonesia Program Papua
4	Joko Sardjito	Sustainable Palm Oil Program Manager WWF Indonesia
5	Bambang Hendroyono	Sekretaris Jenderal KLHK
6	Djati Witjaksono Hadi	Kabiro Humas KLHK
7	Darusman	Kepala Biro ekonomi Provinsi Riau
8	Rahmaidi Azani	GIS Specialist dari KAR
9	Teguh Surya	Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan
10	Indah Fatinaware	Direktur Eksekutif Sawit Watch
11	Rawa El Hamdi	Direktur Scale Up
12	Sofyan Djalil	Menteri ATR
13	Montty Girianna	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA dan LH Kemenko Perekonomian
14	Nur Hidayanti	Direktur Eksekutif Nasional Walhi
15	Soelthon Nanggara	Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia

Dari peta jejaring wacana tersebut di atas terlihat bahwa Teguh Surya, dari Yayasan Madani Berkelanjutan, adalah aktor yang dominan memproduksi wacana. Ini menjadi penting, karena biasanya aktor dari NGOs tidak mendapatkan ruang yang cukup memadai dalam memproduksi wacana.

Wacana yang diperbincangkan dalam artikel di Gatra terkait perubahan iklim salah satunya terkait dengan agenda perubahan iklim dan kehutanan dari Presiden Jokowi di periode ke-2. Aktivis masyarakat sipil yang bergerak di isu lingkungan hidup memproduksi beberapa wacana yang harus jadi agenda Presiden Jokowi di periode ke-2.

Pemilihan Aktor dan Framing Gatra



Dari grafik di atas terlihat bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC paling banyak diproduksi pada tahun 2019. Teguh Surya adalah aktor yang paling aktif memproduksi wacana pada 2019.

Dari pemilihan aktor sebagai narasumber pemberitaan di Gatra terkait perubahan iklim dan NDC kehutanan, perspektif yang dipakai adalah perspektif para pihak, yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha.

Meskipun begitu perspektif dari masyarakat sipil lebih banyak diberikan ruang. Hal itu nampak dari produksi wacana dari para aktivis organisasi masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya misalnya, mengungkapkan dalam 100 hari kepemimpinan Joko Widodo, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mencapai komitmen iklim di Indonesia yaitu pengurangan emisi sebanyak 29% antara lain, penguatan implementasi restorasi gambut, penguatan hukum, evaluasi perizinan untuk mengurangi kerugian negara, serta menetapkan kebijakan moratorium hutan⁴⁵. Jika wacana ini dieksplorasi oleh Gatra lebih dalam akan mampu menjadi wacana yang menjadi peta jalan bagi pemerintah untuk mencapai target emisi di sektor kehutanan seperti yang tertuang dalam NDC.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati memproduksi wacana perlunya kebijakan dari pemerintah berupa Peraturan Presiden (Perpres) sehingga dapat dilakukan koordinasi sektor lintas kementerian dan tidak hanya di bawah kewenangan KLHK saja. Hal itu disebabkan selama ini kewenangan penyelesaian konflik perhutanan sosial hanya berada di bawah KLHK dan kurang menjangkau kementerian lainnya.

⁴⁵ <https://www.gatra.com/detail/news/425884/economy/pemerintah-harus-percepat-target-restorasi-lahan-gambut>

Akibatnya, penyelesaian konflik di sektor kehutanan masih lambat untuk diselesaikan⁴⁶. Wacana ini sekaligus menunjukkan bahwa ada ego sektoral di masing-masing kementerian. KLHK kesulitan menembus ego sektoral tersebut, sehingga konflik agraria masih terjadi di lapangan.

Sentimen Positif terhadap Capaian Target NDC Kehutanan

Capaian target NDC sektor kehutanan adalah sentiment positif yang dibangun dalam pemberitaan Gatra. Sentimen positif itu dibangun melalui narasi bahwa pemerintah telah berbuat banyak dalam memenuhi target pengurangan emisi GRK seperti dalam target NDC.

Kabiro Humas KLHK, Djati Witjaksono Hadi mengungkapkan bahwa menurut Data Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, pada 2017 terjadi penurunan emisi hingga 24,4%. Lebih jauh ia juga mengungkapkan bahwa untuk sektor hutan dan lahan, target dari pihak KLHK RI, 24,3 juta hektar akan direhabilitasi hingga 2030⁴⁷. Pesan dari klaim ini tentu saja adalah bahwa pemerintah telah berbuat banyak dalam menurunkan emisi GRK seperti target dalam NDC. Tidak ada wacana tandingan yang muncul dari NGOs lingkungan hidup yang mempertanyakan klaim tersebut.

Sentimen Negatif terhadap Kebijakan Moratorium Gambut

Berbeda dengan pemberitaan tentang capaian NDC kehutanan, dalam pemberitaan moratorium lahan gambut, Gatra justru membangun sentiment negative. Narasi yang digunakan dalam membangun sentiment negative itu adalah narasi bahwa moratorium gambut mengganggu ekonomi.

Wacana yang di Gatra mengungkapkan bahwa moratorium gambut berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Riau. Wacana tersebut diproduksi oleh Kepala Biro ekonomi Provinsi Riau Darusman⁴⁸. Sayangnya, Gatra tidak memberikan ruang bagi pihak yang menyangkal wacana tersebut.

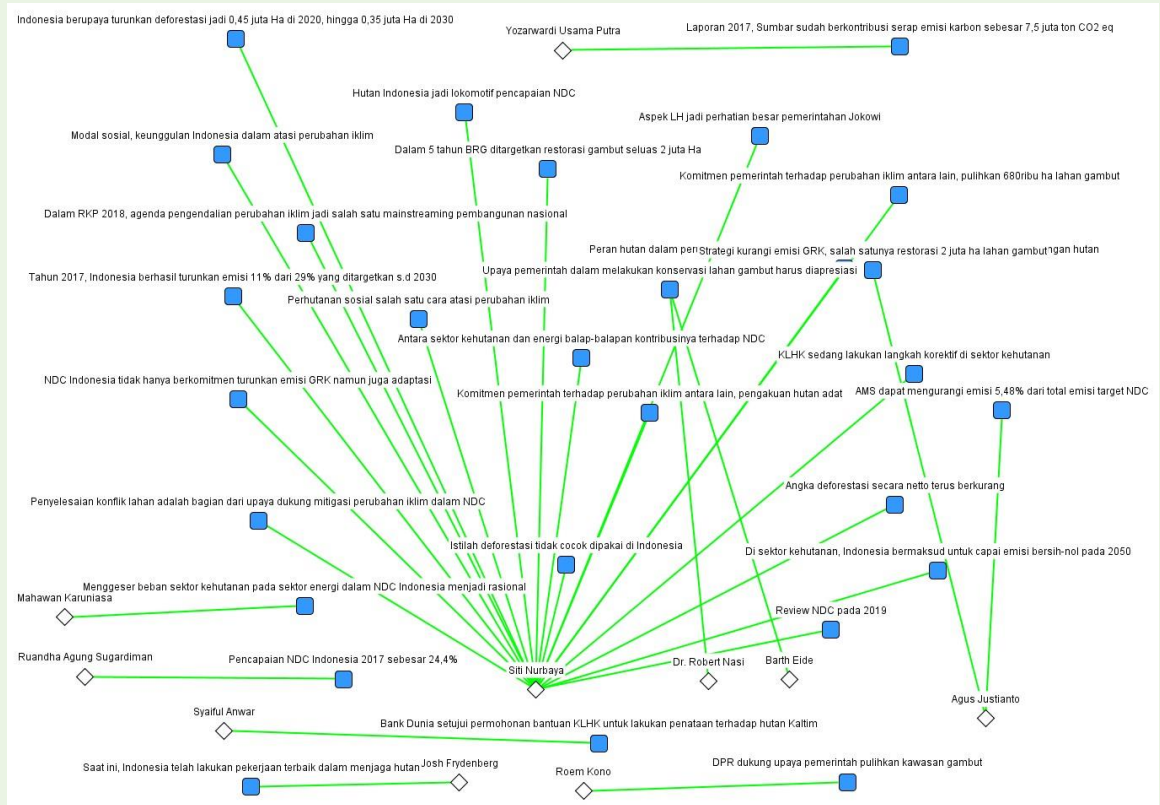
Judul artikel, “Ekonomi Riau Mandek, Moratorium Lahan Gambut Turut Andil”, sudah mengarahkan pembaca untuk menyetujui bahwa moratorium lahan gambut menyebabkan ekonomi di Riau mandeg. Hal itu semakin tercermin dari isi berita yang hanya menampilkan pendapat dari salah satu pihak yang menyetujui wacana andil kebijakan moratorium dalam mandegnya ekonomi Riau. Padahal, kaitan itu ternyata masih berdasarkan dugaan.

⁴⁶ <https://www.gatra.com/detail/news/427786/economy/perlu-perpres-atasi-konflik-lahan-perhutanan-sosial>

⁴⁷ <https://www.gatra.com/detail/news/423425/millennials/penurunan-emisi-tidak-akan-ada-degradasi-dan-deforestasi>

⁴⁸ <https://www.gatra.com/detail/news/425500/politics/ekonomi-riau-mandek-moratorium-lahan-gambut-turut-andil>

F. JPNN/Jawa Pos

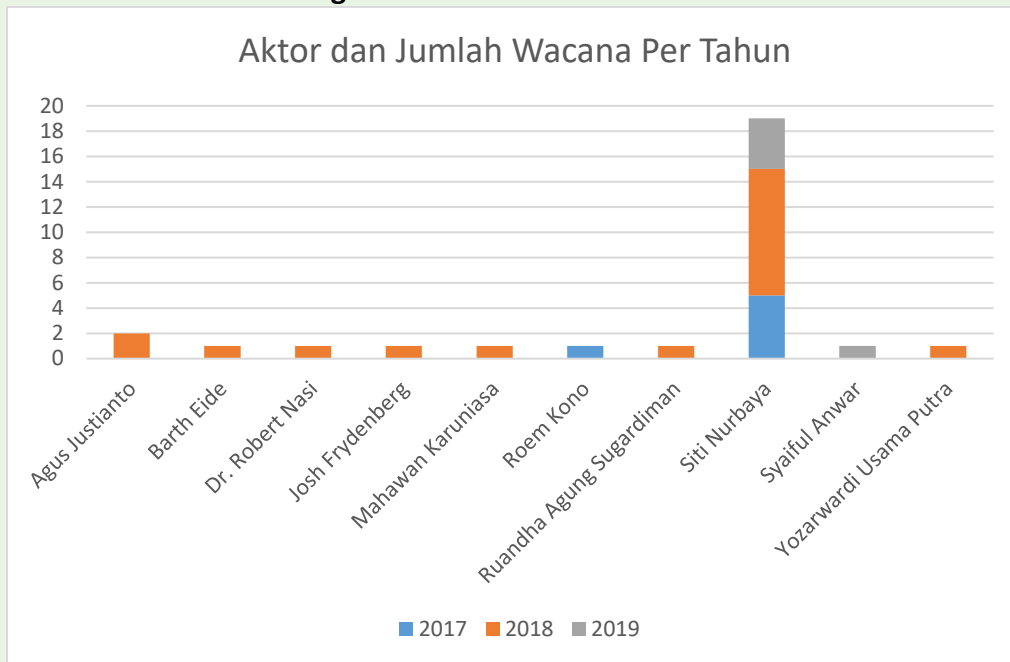


Data yang dikumpulkan dari JPNN/Jawa Pos ini dimuali dari tahun 2017-2018. Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh JPPN/Jawa Pos. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh JPPN/Jawa Pos adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
2	Roem Kono	Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
3	Josh Frydenberg	Menteri LH dan Energi Australia
4	Dr. Agus Justianto	Ka Balitbang dan Inovasi (BLI) KLHK
5	Barth Eide	Anggota Parlemen Norwegia
6	Mahawan Karuniasa	Ketua Umum (APIK Indonesia Network)
7	Yozarwardi Usama Putra	Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat
8	Ruandha Agung Sugardiman	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
9	Syaiful Anwar	Kepala Pusat Litbang Sosek dan Kebijakan Perubahan Iklim KLHK

Wacana yang diperbincangkan di JPPN berpusat pada KLHK, lebih khusus lagi Menteri KLHK Siti Nurbaya. Peran aktor lainnya hanya mendukung dan memperkuat wacana yang dibangun oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya. Wacana yang dibangun seputar kerja dan capaian yang sudah dilakukan KLHK dalam mengatasi persoalan perubahan iklim.

Pemilihan Aktor dan Framing JPPN



Dari grafik di atas terlihat bahwa produksi wacana terkait perubahan iklim dan NDC di Kehutanan paling banyak diproduksi pada 2018. Sementara aktor yang paling aktif memproduksi wacana adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Dari pemilihan aktor sebagai narasumber JPPN, terlihat bahwa dalam memberitakan perubahan iklim dan NDC kehutanan, media ini menggunakan perspektif pemerintah. Aktor lain di luar pemerintah akan mendapatkan tempat bila mendukung perspektif pemerintah. Bahkan aktor dari masyarakat sipil tidak mendapatkan ruang sama sekali.

Secara umum, JPNN dalam memberitakan isu seputar perubahan iklim dan NDC kehutanan menggunakan framing pemerintah, dalam hal ini KLHK. Bahkan terlihat JPNN lebih mirip seperti portal berita yang dikelola humas KLHK daripada dikelola oleh perusahaan media yang menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik bukan Humas.

Sentimen Positif terhadap Setiap Kebijakan Pemerintah terkait Perubahan Iklim

Sentimen positif yang dibangun melalui narasi bahwa pemerintah sudah berbuat sangat banyak untuk mengatasi perubahan iklim. Hampir di setiap pemberitaan JPNN, hal tersebut muncul dan mengemuka. Klaim atas upaya pemerintah itu tanpa pernah ada bantahan dari pihak lain. Hal itu nampak dari setiap pilihan judul dari artikel beritanya.

Catatan Lainnya: Bahaya Wacana Deforestasi dari Menteri KLHK

Ada salah satu wacana dari Menteri KLHK Siti Nurbaya yang perlu mendapat perhatian para pihak yang concern pada isu perubahan iklim. Wacana itu adalah bahwa istilah

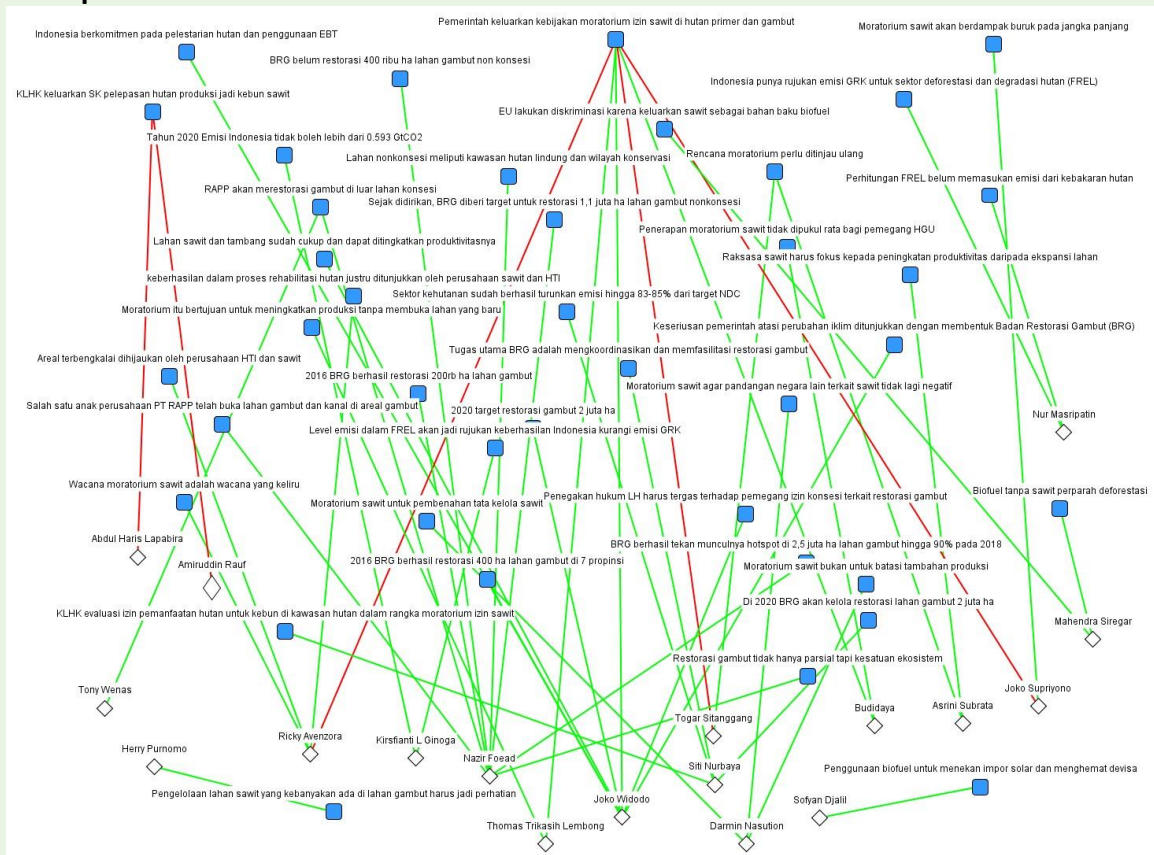
deforestasi tidak cocok dipakai di Indonesia. Menurut Siti Nurbaya, hal itu disebabkan Indonesia adalah negara yang sedang berkembang⁴⁹.

Menurut Menteri KLHK, tidak tepat bila negara atau suatu wilayah provinsi, kabupaten, memerlukan kawasan hutan untuk keperluan fasilitas publik atau utilitas dibidang melakukan deforestasi. Jika wacana yang menolak istilah deforestasi bagi Indonesia ini menjadi dominan dan banyak mendapat dukungan akan membahayakan gerakan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Bagaimana tidak, wacana ini akan menjadi legitimasi baru upaya penggundulan hutan di Indonesia.

Anehnya di waktu yang bersamaan, ketika mengklaim capaian kerja, Menteri KLHK masih menggunakan istilah deforestasi. Menteri KLHK misalnya mengklaim angka deforestasi netto di Indonesia juga terus berkurang. Pada periode 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektar. Kemudian 2015-2016 menjadi 0,63 juta hektar menurut data Ditjen Planologi⁵⁰.

G. Kompas.com dan kompas.id

G.1. Kompas.com



Data dari kompas.com di kumpulkan sejak dari 2015-2019. Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh kompas.com. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh kompas.com adalah sebagai berikut:

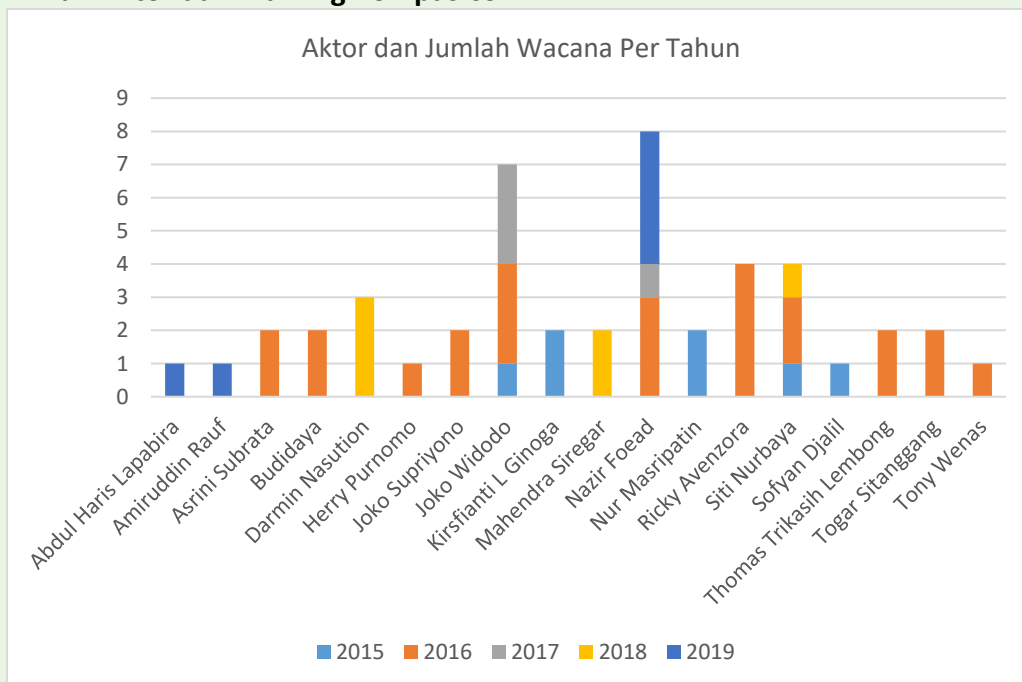
⁴⁹ <https://www.jpnn.com/news/menteri-lhk-buktikan-pada-internasional-deforestasi-menurun?page=3>

⁵⁰ Ibid

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Sofyan Djalil	Menko Perekonomian
2	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
3	Nur Masripatin	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
4	Kirsfianti L Ginoga	Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca KLHK
5	Joko Widodo	Presiden Indonesia
6	Herry Purnomo	Peneliti CIFOR
7	Ricky Avenzora	Pengamat IPB
8	Togar Sitanggang	Sekretaris Jenderal Gapki
9	Thomas Trikasih Lembong	Menteri Perdagangan
10	Budidaya	Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Jambi
11	Asrini Subrata	Head of Stakeholders Relation Asian Agri Group
12	Joko Supriyono	Ketua Umum Gapki
13	Nazir Foead	Kepala BRG
14	Tony Wenas	Presiden Direktur PT RAPP
15	Mahendra Siregar	Direktur CPOPC
16	Darmin Nasution	Menko Perekonomian
17	Amiruddin Rauf	Bupati Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah
18	Abdul Haris Lapabira	Direktur Walhi Sulawesi Tengah

Dari peta jejaring wacana terlihat bahwa Joko Widodo, sebagai Presiden Indonesia sebagai aktor dominan yang memproduksi wacana. Bahkan di kompas.com, Jokowi adalah aktor yang menggerakkan perbincangan dan juga perdebatan wacana. Wacana yang diperdebatkan terkait moratorium di hutan primer dan gambut.

Pemilihan Aktor dan Framing Kompas.com



Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah wacana terkait perubahan iklim dan NDC Kehutanan paling banyak diproduksi pada tahun 2016. Sementara aktor yang paling aktif memproduksi wacana adalah Nazir Foad. Disusul kemudian Joko Widodo.

Dari grafik tersebut di atas nampak bahwa Kompas.com lebih banyak menggunakan perspektif pemerintah dalam memberitakan perubahan iklim dan NDC kehutanan. Meskipun perspektif dari pihak lain juga mendapatkan ruang.

Framing Kompas.com dalam memberitakan isu moratorium sawit adalah melihat bahwa moratorium tidak akan menghambat industri sawit, karena moratorium justru akan meningkatkan produktivitas sawit itu sendiri.

Sentimen Positif terhadap Kebijakan Moratorium Sawit

Kompas.com membangun sentiment positif terhadap kebijakan moratorium sawit. Sentimen positif itu dibangun melalui narasi bahwa moratorium sawit justru meningkatkan produktivitas sawit itu sendiri.

Wacana moratorium sawit di Kompas.com tentang moratorium bergulir sejak tahun 2016⁵¹. Narasi dari wacana moratorium itu adalah untuk meningkatkan produktivitas sawit. Narasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas sawit dalam kebijakan moratorium juga didukung oleh Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Menurutnya, moratorium itu bertujuan untuk meningkatkan produksi tanpa membuka lahan yang baru⁵².

Terkait dengan itulah, tak heran bila kemudian Pemprov Jambi, menyetujui wacana moratorium. Namun, pihaknya ingin moratorium sawit tidak dipukul rata bagi perusahaan yang sudah mengantongi Hak Guna Usaha (HGU). Kepala Dinas Perkebunan Pemprov Jambi Budidaya mengungkapkan pihaknya setuju moratorium karena memang sudah tidak ada lahan lagi di Jambi yang bisa digunakan untuk ekspansi perkebunan⁵³.

Wacana moratorium sawit meskipun mendapatkan perlawanan dari asosiasi perusahaan kelapa sawit, namun Kompas.com, tidak menampilkannya secara dominan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) misalnya, melakukan kontra narasi ekonomi dari wacana moratorium sawit tersebut dengan mengungkapkan bahwa perusahaan sawit menyerap tenaga kerja. Menurut GAPKI, total tenaga kerja sektor kelapa sawit mencapai 7,9 juta jiwa di 2015, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebanyak 7,6 juta jiwa. Moratorium akan berdampak pada produksi sawit dan berujung pada pengurangan

⁵¹<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/04/14/16062001/Jokowi.Akan.Keluarkan.Moratorium.Lahan.Sawit.Dan.Tambang>

⁵²<https://Ekonomi.Kompas.Com/Read/2016/05/27/103000326/Mendag.Moratorium.Izin.Lahan.Sawit.Untuk.Tingkatan.Produktivitas>

⁵³<https://Ekonomi.Kompas.Com/Read/2016/05/27/080000526/Pemprov.Jambi.Minta.Moratorium.Lahan.Kelapa.Sawit.Jangan.Dipukul.Rata>

penyerapan tenaga kerja pada lima tahun kedepan⁵⁴. Pesan dari narasi ini adalah bahwa ujung dari kebijakan moratorium ini adalah merugikan buruh.

Perlawanan wacana terhadap kebijakan moratorium itu juga dikemukakan oleh Dosen Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) Ricky Avenzora. Menurutnya, wacana moratorium sawit adalah wacana yang keliru⁵⁵. Anehnya, Ricky Avenzora menyetujui bila wacana moratorium itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sawit. Lebih lanjut ia justru memproduksi wacana baru dengan kontra narasi ekologis. Wacana itu adalah bahwa sawit bukan penyebab deforestasi. Berbagai areal terbengkalai berupa padang alang-alang, semak belukar, ataupun hutan sekunder muda telah berhasil dihijaukan kembali oleh perusahaan sawit dan HTI⁵⁶.

Pemberitaan Kompas.com kemudian menampilkan belum satu suaranya sikap asosiasi pengusaha sawit terkait kebijakan moratorium. Hal ditunjukkan Head of Stakeholders Relation Asian Agri Group, Asrini Subrata. Menurutnya, ia setuju bila perusahaan sawit, terutama di Jambi, untuk meningkatkan produktivitasnya. Namun, di sisi lain sikapnya terhadap wacana kebijakan moratorium itu sama dengan GAPKI, meminta pemerintah meninjau ulang⁵⁷.

Catatan lain: Suara Kritis dari Masyarakat Sipil

Kompas.com juga memberikan ruang bagi masyarakat sipil yang pada dasarnya mendukung kebijakan moratorium namun tidak meninggalkan sikap kritisnya. Di tengah pro-kontra wacana moratorium sawit justru muncul wacana yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan moratorium sawit.

Wacana itu terkait pelapasan hutan. produksi menjadi kebun sawit seluas 9.964 ha di Sulawesi Tengah. Pelepasan lahan itu pun membuat geram Bupati Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Amiruddin Rauf. Direktur Walhi Sulawesi Tengah Abdul Haris Lapabira mengatakan ada dugaan pelanggaran hukum dalam proses pelepasan kawasan hutan tersebut⁵⁸. Wacana ini adalah sebuah kritik serius terhadap kebijakan moratorium sawit. Jika menjadi sebuah wacana yang dominan, ini dapat meruntuhkan legitimasi dari klaim capaian-capaian pemerintah terkait penurunan emisi di sektor kehutanan.

Wacana lainnya yang juga diperbincangkan adalah terkait dengan restorasi gambut. Wacana terkait restorasi gambut yang diperbincangkan adalah terkait peran perusahaan dalam ikut merestorasi gambut, terutama terkait dengan penghadangan petugas BRG di areal RAPP saat akan melakukan sidak.

⁵⁴<https://money.kompas.com/read/2016/04/26/161500826/Pemerintah.Diminta.Pertimbangkan.Kembali.Moratorium.Kebun.Sawit>.

⁵⁵ Ibid

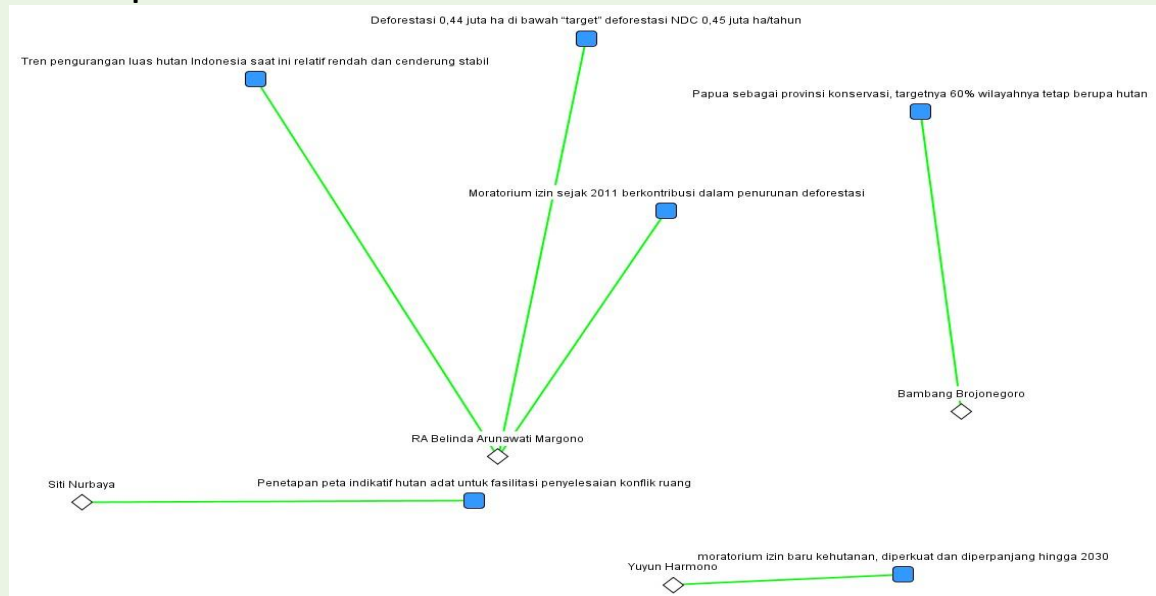
⁵⁶<https://money.kompas.com/read/2016/02/23/175459026/Kelapa.Sawit.Masih.Andalan.Pengelolaan.Lahan.Harus.Jadi.Perhatian>

⁵⁷<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/05/27/080000526/Pemprov.Jambi.Minta.Moratorium.Lahan.Kelapa.Sawit.Jangan.Dipukul.Rata>

⁵⁸ <https://regional.kompas.com/read/2019/01/22/17001771/Bupati-Buol-Geram-Klkh-Izinkan-9964-Hektar-Hutan-Produksi-Jadi-Kebun-Sawit?Page=All>.

Wacana lain terkait restorasi gambut yang muncul adalah klaim tentang keberhasilan restorasi gambut. Menurut Kepala BRG Nazir Foead mengungkapkan bahwa pada tahun 2016, BRG sudah melakukan restorasi 200.000 hektar lahan dari target 2 juta ha pada 2020⁵⁹. Bukan hanya itu, BRG juga mengklaim bahwa pihaknya berhasil menekan kemunculan titik panas (hotspot) di 2,5 juta hektar lahan gambut hingga 90 persen pada tahun 2018⁶⁰.

G.2. Kompas.id



Data yang berhasil dikumpulkan dari kompas.id hanya pada tahun 2018 dan 2019. Sehingga tidak banyak perdebatan wacana yang dianalisis. Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh kompas.id. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh kompas.id adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	RA Belinda Arunawati Margono	Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK
2	Yuyun Harmono	Manajer Kampanye Keadilan Iklim dan Isu Global WALHI
3	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
4	Bambang Brojonegoro	Ka Bappenas

Meskipun tidak banyak wacana yang diperbincangkan namun ada beberapa wacana yang bisa digarisbawahi. Salah satu wacananya itu adalah terkait dengan klaim pemerintah bahwa moratorium izin baru kehutanan di hutan alam primer dan gambut yang diberlakukan sejak 2011 berkontribusi pada penurunan angka deforestasi. Deforestasi brutto (tak memperhitungkan reforestasi) pada tahun 2017-2018 mencapai 0,49 juta ha

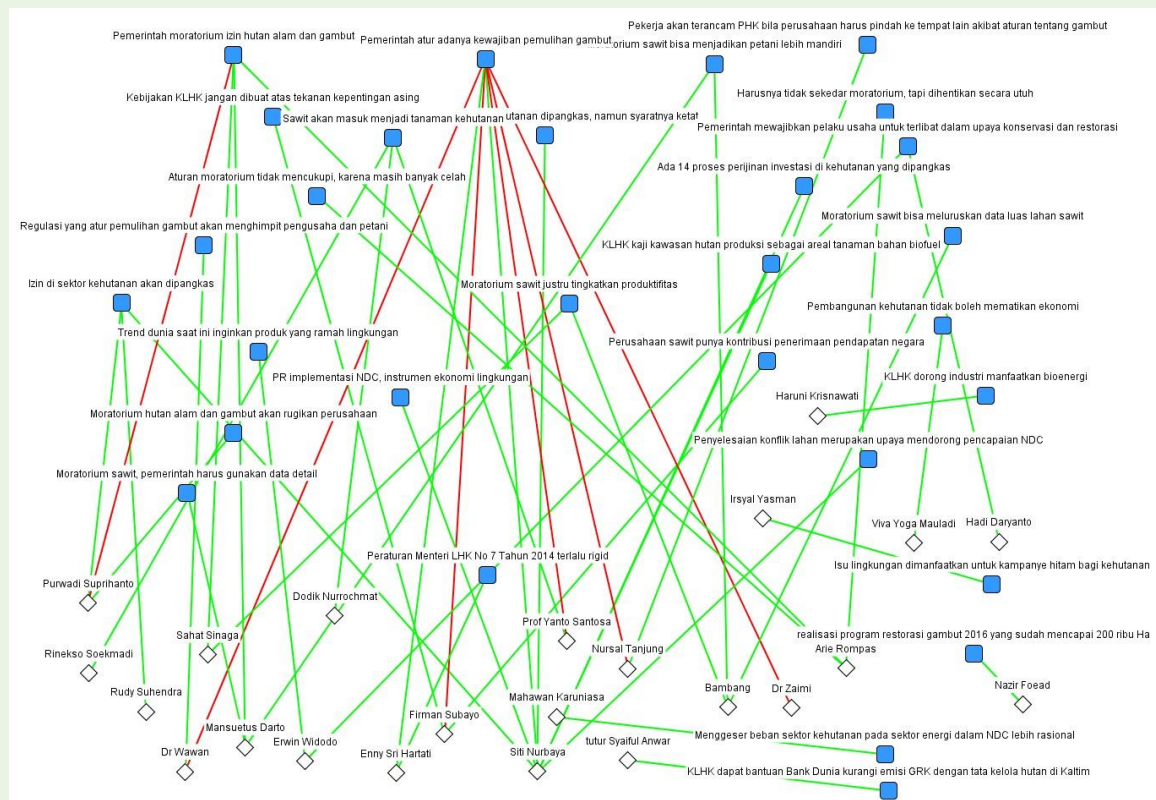
⁵⁹<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2017/04/26/20505861/Restorasi.Gambut.Libatkan.Swasta.Dan.Masyarakat>.

⁶⁰ <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/04/01/19233481/Brg-Sebut-Penurunan-Titik-Panas-Di-Lahan-Gambut-Capai-90-Persen>

dan deforestasi netto (memperhitungkan reforestasi) mencapai 0,44 juta ha karena dikurangi reforestasi sebesar 0,05 juta ha. Lebih jauh, pemerintah mengungkapkan deforestasi 0,44 juta ha masih berada di bawah “target” deforestasi terencana dalam dokumen kontribusi nasional penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia (NDC) sebesar 0,45 juta ha per tahun⁶¹.

Menariknya, Walhi Nasional menggunakan wacana klaim pemerintah itu untuk mendorong moratorium izin baru kehutanan, diperkuat dan diperpanjang hingga 2030⁶².

H. KONTAN



Data yang dikumpulkan dari KOTAN diambil dari tahun 2014 hingga 2019. Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh Kontan. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh Kontan adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
2	Purwadi Suprihanto	Direktur Eksekutif APHI
3	Irsyal Yasman	Wakil Ketua APHI
4	Firman Subayo	Anggota Komisi IV DPR RI
5	Dr Zaimi	Akademisi

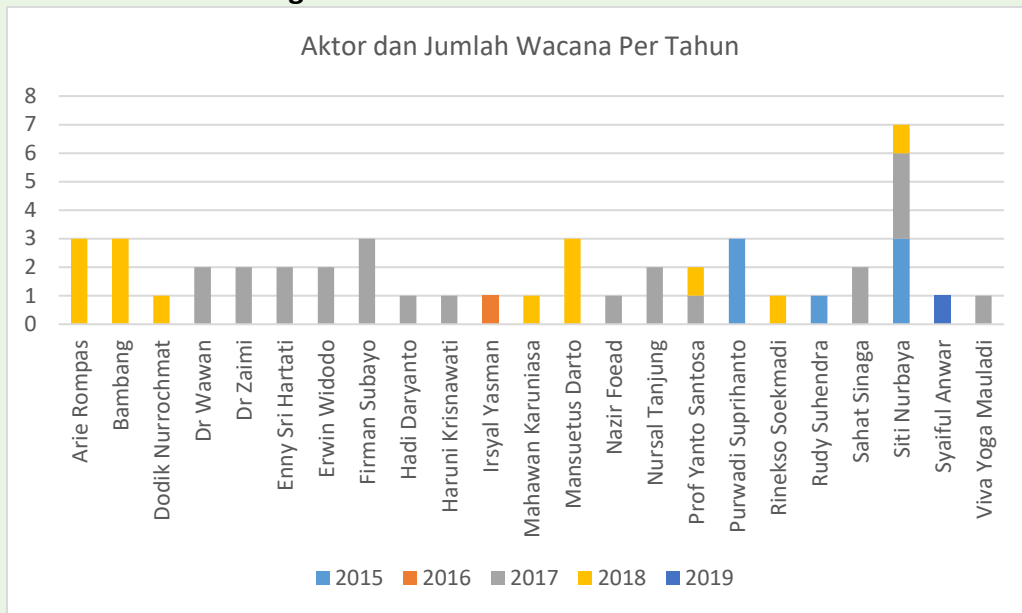
⁶¹ <https://Kompas.id/Baca/Utama/2019/05/09/Terbukti-Turunkan-Deforestasi-Moratorium-Kehutanan-Agar-Diperpanjang/>

⁶² Ibid

6	Dr Wawan	Pakar gambut tropis dari Universitas Riau
7	Nazir Foead	Kepala Badan Restorasi Gambut
8	Hadi Daryanto	Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK
9	Nursal Tanjung	Ketua SPSI Riau
10	Viva Yoga Mauladi	Wakil Ketua Komisi IV DPR
11	Prof Yanto Santosa	Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB
12	Enny Sri Hartati	Direktur Eksekutif Indef
13	Haruni Krisnawati	Peneliti Puslitbang Hutan KLHK
14	Rinekso Soekmadi	Dekan Fakultas Kehutanan IPB
15	Dodik Nurrochmat	Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Fakultas Kehutanan IPB
16	Mansuetus Darto	Ketua SPKS
17	Arie Rompas	Team Leader Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara
18	Mahawan Karuniasa	Ketua Umum Jaringan APIK
19	Sahat Sinaga	Wakil Ketua Dewan Masyarakat Sawit Indonesia (DMSI)
20	Bambang	Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
21	Syaiful Anwar	Kapus Litbang Sosek dan Kebijakan Perubahan Iklim, Balitbang dan Inovasi (BLI), KLHK
22	Rudy Suhendra	Sekretaris Perusahaan PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT)
23	Erwin Widodo	Southeast Asia Regional Coordinator Tropical Forest Alliance 2020

Dari peta jejaring wacana terlihat bahwa Menteri KLHK Siti Nurbaya, menjadi aktor dominan dalam produksi wacana. Bahkan salah satu wacananya terkait pemulihan gambut mendapat sambutan pro-kontra oleh berbagai pihak.

Pilihan Aktor dan Framing KONTAN



Dari grafik di atas terlihat bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC Kehutanan paling banyak diproduksi pada tahun 2017. Aktor yang paling produktif memproduksi wacana adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya.

Dari grafik di atas, secara total produksi wacana, memang Menteri KLHK Siti Nurbaya menjadi aktor yang paling aktif memproduksi wacana. Namun, bila ditelisik lebih lanjut per tahunnya, terlihat bahwa KONTAN lebih banyak memilih aktor yang jadi narasumber dari latar belakang akademisi, parlemen dan asosiasi pengusaha yang pro terhadap perkebunan sawit.

Framing dari pemberitaan di KONTAN, melihat persoalan ekonomi lebih penting daripada persoalan ekologi. Ekonomi disini kemudian direduksi menjadi kepentingan perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan.

Sentimen Positif terhadap Perusahaan Sawit

Sentimen positif terhadap perusahaan sawit dibangun dengan narasi kebijakan moratorium perizinan di sektor kehutanan, lahan gambut dan sawit selama ini berpotensi mengganggu industri. Hal itu misalnya nampak jelas dari berita yang berjudul, "Pembangunan kehutanan tak boleh matikan industri"⁶³. Framing dari judul berita itu mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa selama ini beberapa kebijakan di sektor kehutanan, baik itu moratorium izin maupun pemulihan gambut, merugikan industri. Ekonomi lebih penting daripada ekologi.

Setidaknya ada dua wacana yang diperdebatkan dalam isu perubahan iklim dan NDC kehutanan di KONTAN. Pertama, wacana pemerintah melakukan moratorium izin hutan

⁶³ <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Pembangunan-Kehutanan-Tak-Boleh-Matikan-Industri>

alam dan lahan gambut. Kedua, wacana pemerintah atur adanya kewajiban pemulihan lahan gambut.

KONTAN menggambarkan semua wacana itu merugikan perekonomian. Wacana moratorium izin hutan alam dan lahan gambut misalnya, mendapat perlawanan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Menurut Direktur Eksekutif APHI Purwadi Suprihanto, sebelum melarang pembukaan lahan gambut seharusnya pemerintah lebih dahulu memetakan mana lahan gambut yang harus dilindungi dan yang bisa dikelola untuk industri. Kebijakan moratorium izin di hutan primer dan lahan gambut dinilai merugikan industri kehutanan⁶⁴.

Sentimen positif terhadap perusahaan kelapa sawit juga dibangun dengan narasi bahwa perusahaan sawit dan kehutanan sudah memiliki kontribusi besar bagi perekonomian negara.

Tak tanggung-tanggung aktor yang dipilih untuk mengungkapkan itu adalah wakil rakyat. Sehingga kesan yang muncul bahwa diangkatnya perusahaan sawit dan kehutanan sebagai 'pahlawan' ekonomi itu berasal dari suara rakyat yang diungkapkan oleh wakilnya di parlemen.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subayo misalnya mengungkapkan bahwa pelaku usaha baik itu di kelapa sawit ataupun di hutan tanaman industri, punya kontribusi penerimaan negara. Sementara wacana aturan pemulihan gambut juga mendapat perlawanan dari pekerja. Menurut Ketua SPSI Riau Nursal Tanjung, peraturan tentang pemulihan gambut tidak menjawab permasalahan pekerja yang terancam PHK masal⁶⁵. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Yanto Santosa juga mengungkapkan bahwa aturan untuk perlindungan gambut menghambat investasi⁶⁶.

Sentimen Negatif terhadap kampanye Lingkungan Hidup

Bila perusahaan sawit mendapat sentiment positif, tidak demikian dengan kampanye lingkungan hidup. Kelompok yang melakukan kampanye lingkungan hidup justru mendapat sentiment negative dalam pemberitaan.

Sentimen negative itu dibangun dengan narasi bahwa pihak yang melakukan kampanye lingkungan hidup sedang melakukan kampanye hitam yang merugikan perekonomian Indonesia. Wakil Ketua APHI Irsyal Yasman misalnya, memproduksi wacana bahwa persoalan lingkungan hidup telah dimanfaatkan sebagai kampanye hitam untuk memukul industri kehutanan⁶⁷.

⁶⁴ <https://Industri.Kontan.Co.Id/News/Pukulan-Telak-Di-Bisnis-Kehutanan>

⁶⁵ <https://Regional.Kontan.Co.Id/News/Pekerja-Kehutanan-Riau-Ingin-Ketemu-Jokowi>

⁶⁶ <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Pembangunan-Kehutanan-Tak-Boleh-Matikan-Industri>

⁶⁷ <https://Industri.Kontan.Co.Id/News/Kampanye-Hitam-Ganggu-Industri-Kehutanan>

Ungkapan adanya kampanye hitam terhadap ini adalah bagian dari upaya *killing the messenger* secara halus. Warna hitam diasosiasikan dengan sesuatu yang jahat dibandingkan putih. Sehingga kampanye moratorium adalah sebuah kampanye jahat. Muara dari pesannya, publik perlu waspada dengan adanya kampanye jahat tersebut.

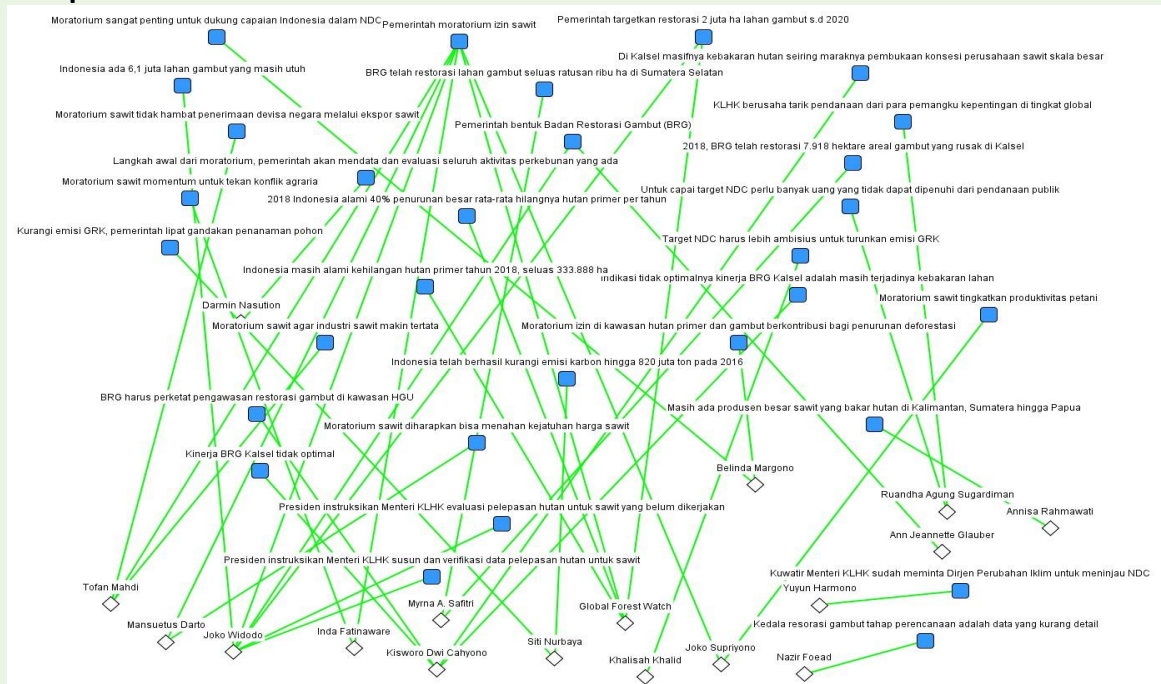
Upaya *kill the messenger* juga muncul dari salah satu anggota parlemen. Menurut anggota Komisi IV DPR RI Firman Subayo Sehingga banyak tekanan-tekanan terhadap sawit dengan alasan lingkungan hidup, yang sebenarnya berlatar belakang persaingan bisnis global. Wacana ini ingin mendelegitimasi dari narasi ekologi dalam kampanye lingkungan hidup terkait sektor kehutanan. Kampanye di sektor kehutanan sejatinya, menurut pesan ini, tidak didasarkan kepetingan untuk menjaga kelestarian alam, namun persaingan bisnis belaka.

Catatan Lain: Bioenergy Sebuah Legitimasi bagi Perusakan Hutan

Di luar wacana yang menjadi perdebatan itu, ada salah satu wacana menarik yang perlu digarsibawahi, meskipun tidak memunculkan perdebatan publik. Wacana itu adalah dorongan agar industri memanfaatkan bioenergy⁶⁸. Bahkan, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengungkapkan KLHK tengah mengkaji kawasan hutan produksi yang dapat digunakan sebagai areal hutan tanaman dengan jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber energi biofuel dan biomassa⁶⁹.

Para penggiat lingkungan perlu jeli, apakah wacana bioenergy ini hanya dalih untuk ekspansi perkebunan sawit yang merusak hutan?

I. Kumparan



⁶⁸ <https://Industri.Kontan.Co.Id/News/Klkh-Dorong-Industri-Manfaatkan-Bioenergi>

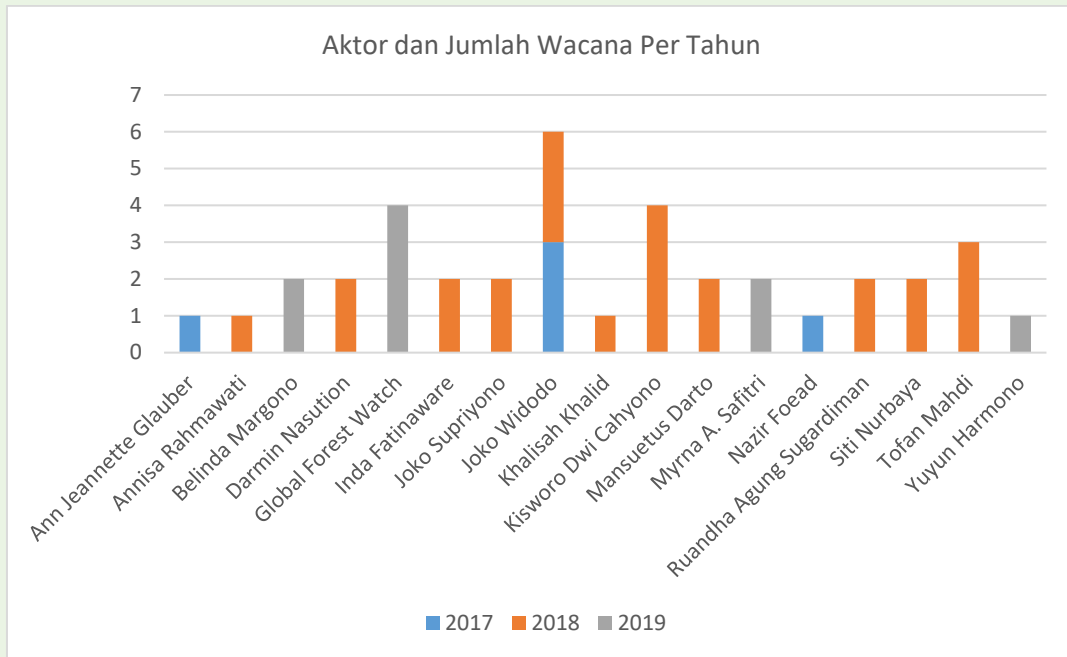
⁶⁹ <https://Pressrelease.Kontan.Co.Id/Release/Hari-Hutan-Internasional-2017-Hutan-Kita-Energi-Kita>

Data yang dikumpulkan di Kumparan sejak tahun 2017 hingga 2019. Hal ini karena keterbatasan data yang tersedia di website kumparan. Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh Kumparan. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh Kumparan adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Joko Widodo	Presiden RI
2	Ann Jeannette Glauber	Kepala Ahli Lingkungan Bank Dunia untuk Indonesia
3	Nazir Foead	Kepala BRG
4	Kisworo Dwi Cahyono	Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan
5	Annisa Rahmawati	Juru kampanye Greenpeace Indonesia
6	Inda Fatinaware	Direktur Eksekutif Sawit Watch
7	Tofan Mahdi	Ketua Bidang Komunikasi GAPKI
8	Joko Supriyono	Ketua Umum GAPKI
9	Darmin Nasution	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
10	Mansuetus Darto	Ketua Umum SPKS
11	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
12	Khalisah Khalid	Kepala Departemen Kampanye Walhi
13	Ruandha Agung Sugardiman	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
14	Yuyun Harmono	Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi
15	Myrna A. Safitri	Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG
16	Global Forest Watch	Laporan Global Forest Watch

Berdasarkan peta jejaring wacana di atas, terlihat bahwa Jokowi, sebagai Presiden Indonesia menjadi aktor yang dominan dalam produksi wacana. Bahwkan wacana yang diproduksi terkait dengan moratorium sawit mampu menggerakkan perbincangan berbagai pihak.

Pilihan Aktor dan Framing Kumparan



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC sektor kehutanan paling banyak diproduksi pada tahun 2018. Sedangkan aktor yang paling aktif memproduksi wacana adalah Presiden Joko Widodo.

Framing yang digunakan Kumparan dalam memberitakan isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan ini nampaknya mencoba tidak mendikotomikan isu ekologi dan ekonomi. Isu ekologi tidak harus bertentangan dengan isu ekonomi. Hal itu nampak dari beberapa berita yang mengungkapkan dukungan asosiasi perusahaan sawit terhadap kebijakan moratorium.

Sentimen Positif terhadap Kebijakan Moratorium Sawit

Di Kumparan kebijakan moratorium mendapatkan sentiment positif. Narasi yang dibangun untuk membangun sentiment positif ini adalah moratorium sawit justru menguntungkan perusahaan sawit untuk menata kembali bisnisnya.

Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi, mengatakan moratorium bukan penghambat industri sawit untuk berkembang, tapi justru sebagai pengendali agar industri sawit makin tertata⁷⁰. Bahkan, GAPKI Joko Supriyono mengungkapkan bahwa dengan moratorium tersebut justru membuat petani lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas terutama para petani kecil⁷¹.

⁷⁰ <https://Kumparan.Com/@Kumparanbisnis/Gapki-Dukung-Presiden-Jokowi-Moratorium-Sawit-1537837995882502666>

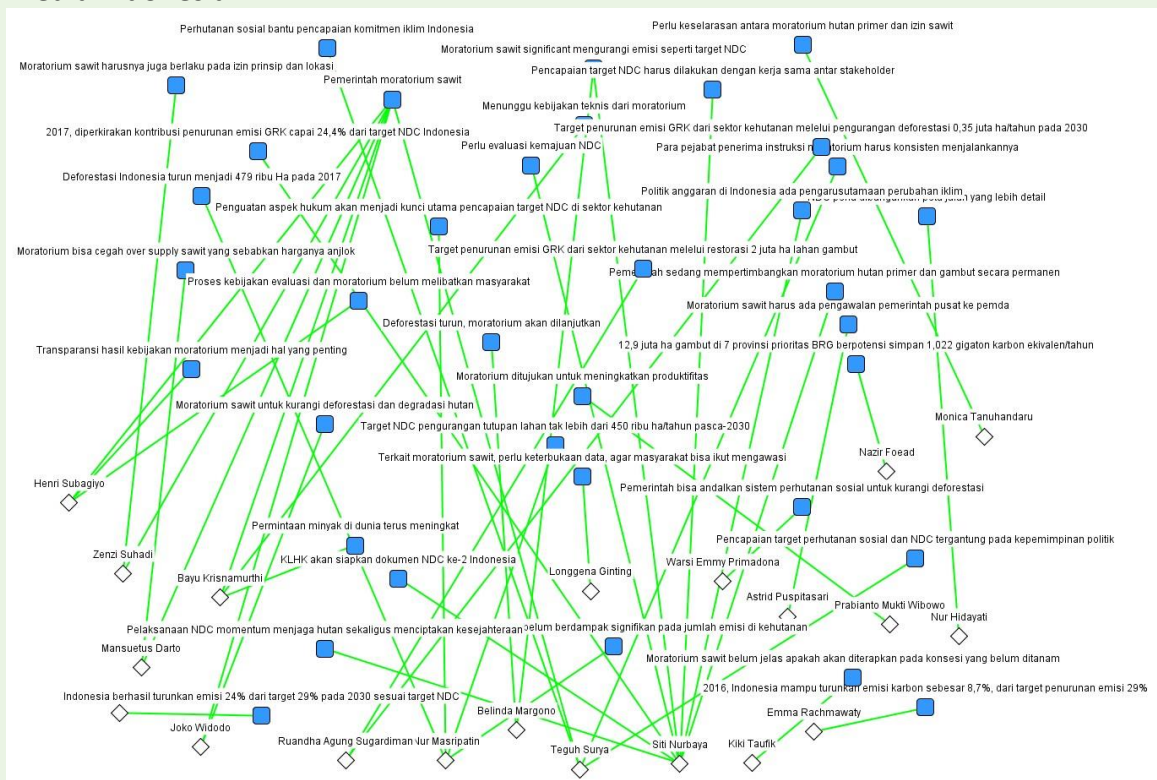
⁷¹ <https://Kumparan.Com/@Kumparanbisnis/Gapki-Targetkan-Ekspor-Sawit-Naik-7-Persen-Tahun-Ini-1541075667412628626>

Catatan lainnya: Kebakaran lahan

Ada beberapa wacana yang menarik dan dapat digarisbawahi. Beberapa wacana itu adalah terkait masih ditemukannya perusahaan sawit yang membakar lahan. Menurut Juru kampanye Greenpeace Indonesia Annisa Rahmawati, masih ada produsen besar yang membakar hutan di Kalimantan, Sumatera hingga Papua⁷².

Masih terkait dengan kebakaran lahan, muncul pula wacana yang menyebutkan bahwa kinerja Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalimantan Selatan belum optimal seiring masih maraknya kebakaran hutan dan lahan. Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menuturkan TRGD belum bekerja optimal merevitalisasi lahan gambut karena terbentur urusan birokrasi⁷³. Wacana ini menarik, karena narasi yang berkembang di beberapa media, persoalan kebakaran lahan seperti terlepas dari persoalan NDC Kehutanan.

J. Media Indonesia



Data yang dikumpulkan dari Media Indonesia diambil dari tahun 2016 hingga 2019. Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh Media Indonesia. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh Media Indonesia adalah sebagai berikut:

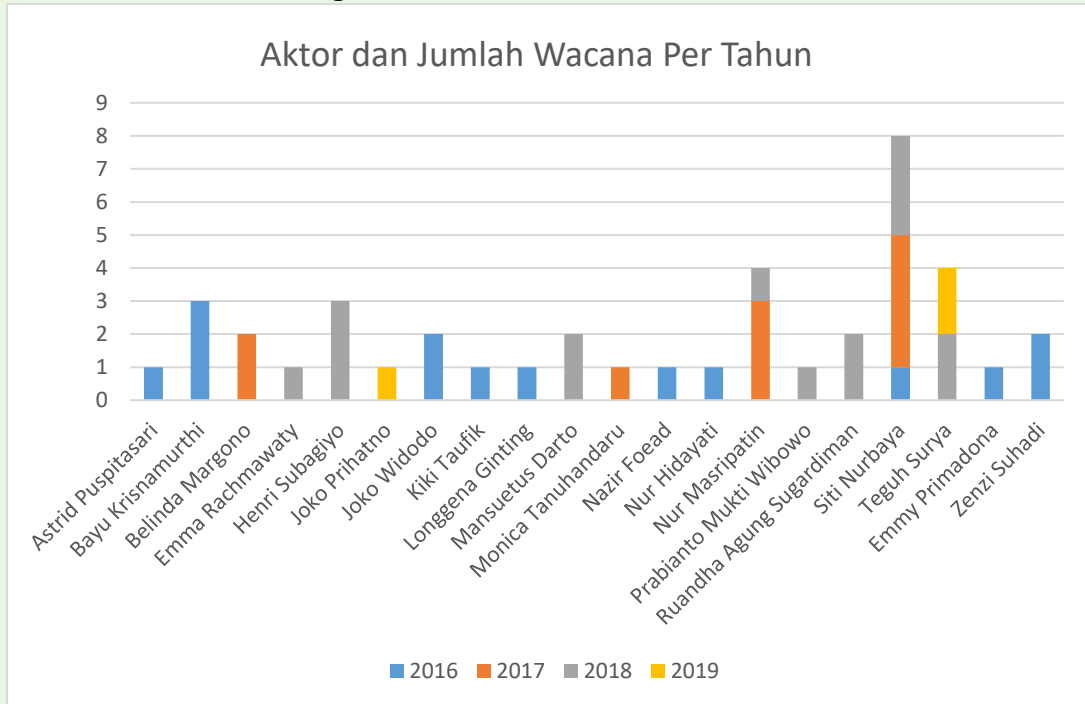
⁷² <https://kumparan.com/@kumparannews/greenpeace-temukan-industri-sawit-yang-masih-bakar-hutan-1537341309919852243>

⁷³ <https://kumparan.com/banjarhits/walhi-klaim-trgd-kalsel-tak-optimal-1537597966339528804>

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Joko Widodo	Presiden RI
2	Zenzi Suhadi	Manajer Advokasi Eksekutif Walhi Nasional
3	Astrid Puspitasari	Humas Sawit Watch
4	Kiki Taufik	Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace
5	Sawit Bayu Krisnamurthi	Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)
6	Nazir Foad	Kepala BRG
7	Nur Hidayati	Direktur Eksekutif Walhi Nasional
8	Emma Rachmawati	Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK
9	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
10	Monica Tanuhandaru	Direktur Eksekutif Kemitraan
11	Nur Masripatin	Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
12	Prabianto Mukti Wibowo	Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian
13	Henri Subagiyo	Direktur Eksekutif ICEL
14	Teguh Surya	Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan
15	Mansuetus Darto	Ketua Umum SPKS
16	Ruandha Agung Sugardiman	Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
17	Joko Prihatno	Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi KLHK
18	Belinda Margono	Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK
19	Longgena Ginting	Greenpeace Indonesia
20	Emmy Primadona	Warsi

Siti Nurbaya, Menteri KLHK adalah aktor dominan yang memproduksi wacana di Media Indonesia terkait isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan. Meskipun begitu, Jokowi yang tidak seproduktif Siti Nurbaya dalam memproduksi wacana, mampu menggerakkan perbincangan wacana. Wacana yang digerakan Jokowi adalah terkait dengan moratorium sawit.

Pemilihan Aktor dan Framing Media Indonesia



Dari grafik di atas terlihat bahwa wacana tentang perubahan iklim dan NDC sektor kehutanan paling banyak diproduksi di tahun 2016. Adapun aktor yang paling aktif memproduksi wacana adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya.

Dari grafik di atas terlihat bahwa aktor-aktor dari masyarakat sipil juga diberikan ruang untuk memproduksi wacana. Namun, wacana yang diproduksi dari aktor di luar pemerintah, dipilih dari wacana yang tidak berlawanan dengan wacana pemerintah.

Hampir sama dengan JPNN, framing Media Indonesia dalam memberitakan persoalan perubahan iklim dan NDC Kehutanan menggunakan framing bahwa pemerintah sudah berbuat banyak. Sehingga perlu dukungan dan pengawalan dari masyarakat. Media Indonesia tidak memberikan ruang sama sekali bagi pihak yang resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

Sentimen Positif terhadap Kebijakan Pemerintah di Sektor Kehutanan

Sentimen positif yang muncul dari artikel di Media Indonesia dibangun melalui narasi bahwa kebijakan pemerintah di sektor kehutanan, dalam hal ini moratorium dan sistem perhutanan sosial, berdampak positif. Tak heran berbagai kalangan aktivis lingkungan hidup yang selama ini bersuara kritis terhadap pemerintah juga mendukung.

Di artikel Media Indonesia diungkapkan bahwa kelompok masyarakat sipil umumnya menyambut moratorium sawit secara positif dengan beberapa catatan. Catatan yang diberikan oleh kelompok masyarakat sipil misalnya, moratorium perlu ada keterbukaan data sehingga ada keterlibatan masyarakat untuk ikut mengawalinya.

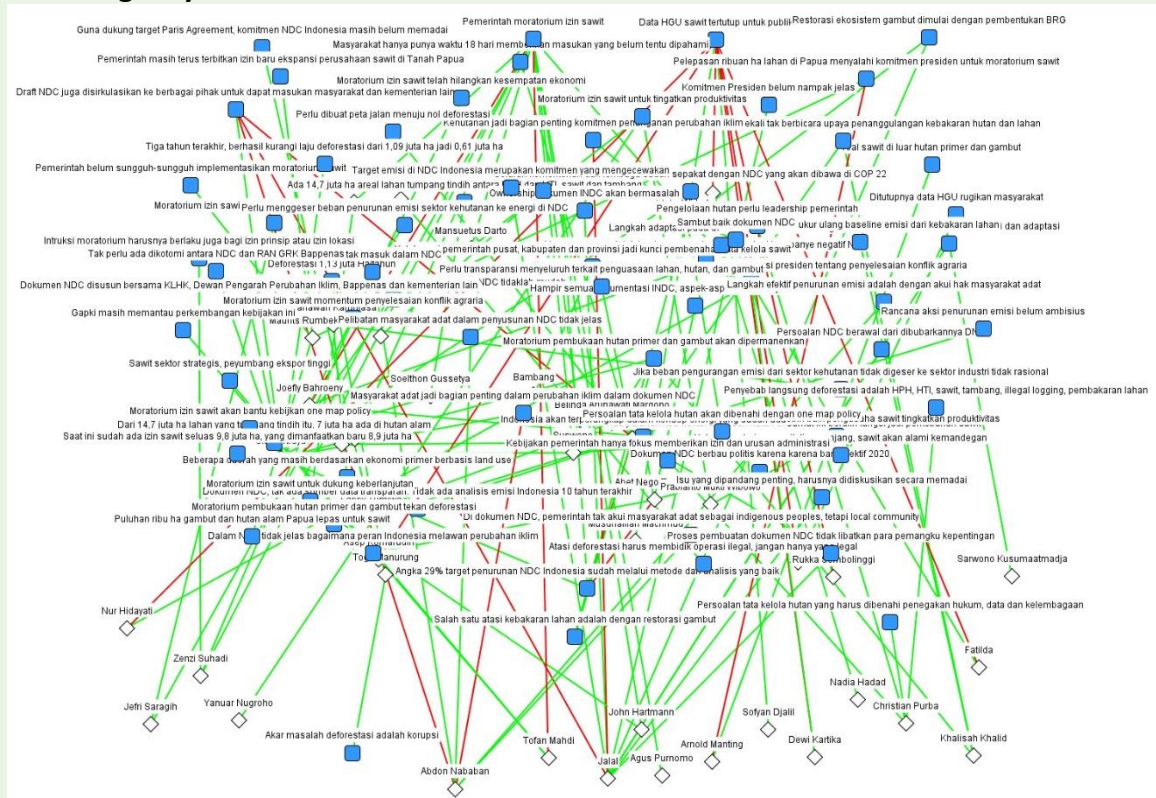
Moratorium tidak sekedar mengeluarkan peta indikatif namun juga pengawalan hingga ke pemerintah daerah untuk implementasinya di lapangan⁷⁴. Catatan lain datang dari Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya, yang menilai moratorium sawit harus bisa menyelesaikan kesengkaran perizinan perkebunan sawit, termasuk tumpang-tindih dengan kawasan hutan⁷⁵.

Menariknya, narasi terkait moratorium sawit di Media Indonesia bukan hanya berkutat dengan narasi ekonomi berupa peningkatan produktivitas sawit, namun juga muncul narasi ekologi berupa pengurangan deforestasi dan degradasi hutan⁷⁶.

Bukan hanya moratorium hutan dan sawit yang mendapatkan sentiment positif, namun juga kebijakan sistem perhutanan sosial. Sentimen positif itu dibangun melalui narasi bahwa sistem perhutanan sosial selain memberikan keadilan pada masyarakat di sekitar hutan juga mengurangi deforestasi.

Wacana itu muncul dari Program Manager Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Emmy Primadona. Ia menyatakan pemerintah bisa mengandalkan sistem perhutanan sosial untuk membuat masyarakat menjaga kawasan hutan dari deforestasi. membuat masyarakat menjaga kawasan hutan dari deforestasi⁷⁷.

K. Mongabay



⁷⁴ <https://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/40945-Moratorium-Sawit-Disambut-Positif>

⁷⁵ <https://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/186327-Awasi-Moratorium-Sawit>

⁷⁶ <https://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/40945-Moratorium-Sawit-Disambut-Positif>

⁷⁷ <https://Mediaindonesia.Com/Read/Detail/75617-Peta-Jalan-Ndc-Mesti-Lebih-Detail>

Data dari dokumentasi percakapan tentang perubahan iklim dan NDC di Mongabay diambil dari 2012 hingga 2019. Data dari 2012 diambil karena akan menunjukkan dinamika perdebatan pro dan kontra moratorium izin hutan primer dan lahan gambut.

Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh Mongabay. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh Mongabay adalah sebagai berikut:

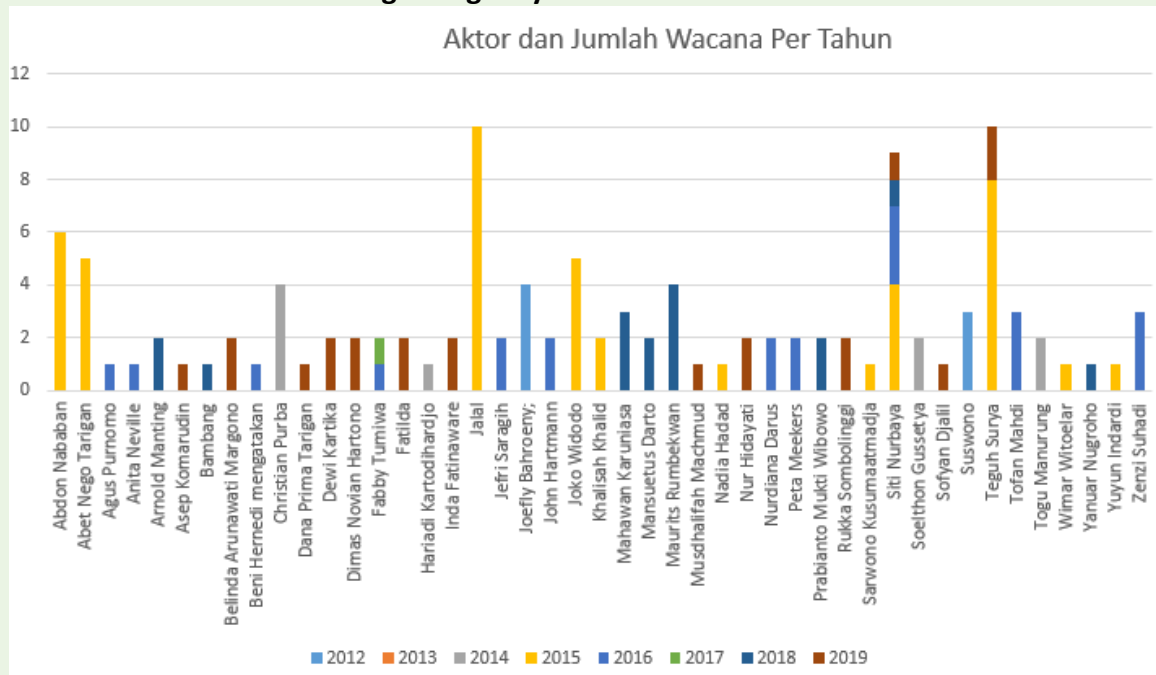
No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Joefly Bahroeny	Ketua GAPKI
2	Suswono	Menteri Pertanian era Presiden SBY
3	Soelthon Gussetya	Manajer Data FWI
4	Christian Purba	Direktur Eksekutif FWI
5	Togu Manurung	Badan Pengurus FWI
6	Hariadi Kartodihardjo	Ketua Dewan Kehutanan Nasional
7	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
8	Wimar Witoelar	Pendiri Yayasan Perspektif Baru
9	Sarwono Kusumaatmadja	Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim
10	Joko Widodo	Presiden RI
11	Abetnego Tarigan	Direktur Eksekutif Walhi Nasional
12	Jalal	Reader on Political Economy and Corporate Governance Thamrin School of Climate Change and Sustainability
13	Teguh Surya	Pengkampanye Hutan Greenpeace Indonesia
14	Abdon Nababan	Sekjen AMAN
15	Khalisah Khalid	Walhi Nasional
16	Yuyun Indardi	Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia
17	Nadia Hadad	Aktivis Koalisi untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global
18	Zenzi Suhadi	Manager Advokasi Eksekutif Nasional Walhi
19	Fabby Tumiwa	Direktur Eksekutif IESR
20	John Hartmann	CEO Cargill Tropical Palm
21	Agus Purnomo	Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement GAR
22	Anita Neville	Vice President Corporate Communications and External Affairs, Golden Agri Resources
23	Peta Meekers	Director of CSR and Sustainable Development Musim Mas Holdings
24	Nurdiana Darus	Direktur Eksekutif Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP)
25	Tofan Mahdi	Juru Bicara Gapki
26	Beni Hernedi	Plt Bupati Musi Banyuasin
27	Maurits Rumbekwan	Direktur Eksekutif Walhi Papua
28	Arnold Manting	Kepala BPKH Wilayah X Jayapura

29	Prabianto Mukti Wibowo	Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian
30	Mahawan Karuniasa	Ketua Umum Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia
31	Bambang	Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
32	Mansuetus Darto	Ketua Umum SPKS
33	Yanuar Nugroho	Deputi II Kepala Staf Kepresidenan
34	Dana Prima Tarigan	Direktur Eksekutif Walhi Sumut
35	Musdhalifah Machmud	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian
36	Asep Komarudin	Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia
37	Sofyan Djalil	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN
38	Dewi Kartika	Sekjen KPA
39	Fatilda	Manajer Kampanye Wilayah Kelola Rakyat Walhi Nasional
40	Inda Fatinaware	Direktur Eksekutif Sawit Watch
41	Rukka Sombolinggi	Sekjen AMAN
42	Dimas Novian Hartono	Direktur Eksekutif Walhi Kalteng
43	Nur Hidayati	Direktur Eksekutif Walhi Nasional
44	Teguh Surya	Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan
45	Belinda Arunawati Margono	Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan KLHK

Dari peta jejaring wacana tersebut terlihat bahwa aktor yang paling produktif membangun wacana adalah Jalal dari Reader on Political Economy and Corporate Governance Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Aktor yang produktif lainnya adalah Abdon Nababan, Sekjen AMAN. Berbeda dengan media lain, Mongabay lebih banyak memberikan ruang bagi aktor dari masyarakat sipil.

Dapat dikatakan dibandingkan media lainnya, Mongabay adalah media yang paling utuh memberitakan isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan. Ada tiga wacana yang menjadi perdebatan di Mongabay. Pertama, wacana mengenai NDC. Kedua, tentang moratorium sawit. Ketiga, mengenai keterbukaan informasi publik atas data HGU.

Pemilihan Aktor dan Framing Mongabay



Dari grafik di atas terlihat bahwa wacana mengenai Perubahan iklim dan NDC Kehutanan paling banyak diproduksi pada tahun 2015. Aktor yang paling produktif memproduksi wacana adalah dua aktivis NGOs, yaitu Jalal dan Teguh Surya. Hanya saja Jalal banyak memproduksi wacana pada tahun 2015. Namun Teguh Surya banyak memproduksi wacana pada tahun 2015 dan 2019.

Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa aktor yang dipilih Mongabay dalam pemberitaan di medianya adalah dari aktivis organisasi masyarakat sipil. Dari sini dapat dilihat bahwa prespektif Mongabay dalam memberitakan perubahan iklim dan NDC kehutanan dari prespektif masyarakat sipil.

Framing Mongabay dalam memberitakan persoalan perubahan iklim dan NDC Kehutanan ini menggunakan framing masyarakat sipil yang bergerak di isu lingkungan hidup. Bukan hanya suara – suara aktivis mendapatkan ruang yang lebih luas daripada pihak lainnya tapi juga narasi-narasi ekologi juga mendapatkan ruang yang cukup. Framing ini tentu sejalan dengan tujuan-tujuan kampanye masyarakat sipil.

Sentimen Positif terhadap Kebijakan Moratorium Izin Hutan dan Sawit

Sentimen positif kebijakan moratorium dibangun melalui narasi bahwa moratorium sawit menjadi momentum titik balik perbaikan tata kelola sumber daya alam dan penyelesaian konflik sumber daya alam atau agraria.

Meskipun begitu Mongabay masih memberikan ruang bagi munculnya resistensi terhadap kebijakan moratorium sawit. Narasi yang dibangun untuk melawan wacana moratorium sawit adalah narasi ekonomi. Sawit yang diklaim sebagai penyumbang devisa

dan penyerap tenaga kerja menjadi narasi baku untuk melawan wacana moratorium izin di hutan primer, lahan gambut dan juga sawit⁷⁸.

Namun resistensi itu dibuat tidak relevan dengan narasi bahwa pengusaha kelapa sawit lebih baik meningkatkan produktivitas lahannya daripada melakukan ekspansi lahan⁷⁹.

Sentimen Negatif terhadap Proses Penyusunan NDC Kehutanan dan Tertutupnya Data HGU Sawit

Berbeda dengan kebijakan moratorium izin hutan dan sawit, penyusunan NDC kehutanan dan tertutupnya data HGU mendapat sentiment negative dalam pemberitaan di Mongabay.

Terkait NDC kehutanan, sentiment negative itu dibangun melalui narasi bahwa proses penyusunan NDC kehutanan tidak transparan dan partisipatif. Meskipun pemerintah dalam hal ini KLHK mengklaim bahwa proses dari penyusunan NDC sudah melibatkan para pihak, termasuk masyarakat sipil.

Organisasi masyarakat sipil merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan NDC itu. Salah satu organisasi masyarakat sipil itu adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Salah satu indikasinya, menurut AMAN adalah dokumen NDC, pemerintah tak mengakui masyarakat adat sebagai indigenous peoples, tetapi disebut local community⁸⁰.

Persoalan keterlibatan masyarakat ini juga disorot oleh Jalal, Reader on Political Economy and Corporate Governance Thamrin School of Climate Change and Sustainability. Dia mengungkapkan bahwa masalah utama NDC adalah partisipasi atau pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunannya. Menurut Jalal, kurangnya pelibatan para pihak ini disebabkan persoalan kelembagaan pasca pembubaran DNPI⁸¹.

Sementara itu, terkait dengan sentiment negative terhadap tertutupnya data HGU dibangun melalui narasi bahwa ketertutupan data HGU itu hanya menguntungkan segelintir orang dan menghambat penyelesaian konflik agraria.

Organisasi masyarakat sipil pada umumnya menilai bahwa ditutupnya data HGU ini hanya menguntungkan pemegang HGU dan merugikan masyarakat. Salah satu dampak dari ditutupnya data HGU ini adalah makin sulitnya penyelesaian konflik agraria⁸².

⁷⁸ <https://www.mongabay.co.id/2012/11/30/gabungan-pengusaha-kelapa-sawit-minta-moratorium-penebangan-hutan-tidak-diperpanjang/>

⁷⁹ <https://www.mongabay.co.id/2012/11/30/gabungan-pengusaha-kelapa-sawit-minta-moratorium-penebangan-hutan-tidak-diperpanjang/>

⁸⁰ <https://www.mongabay.co.id/2015/09/20/soal-indc-aman-ragukan-keseriusan-pemerintah-libatkan-masyarakat-adat/>

⁸¹ <https://www.mongabay.co.id/2015/09/10/pengamat-indc-indonesia-berpotensi-bermasalah-besar/>

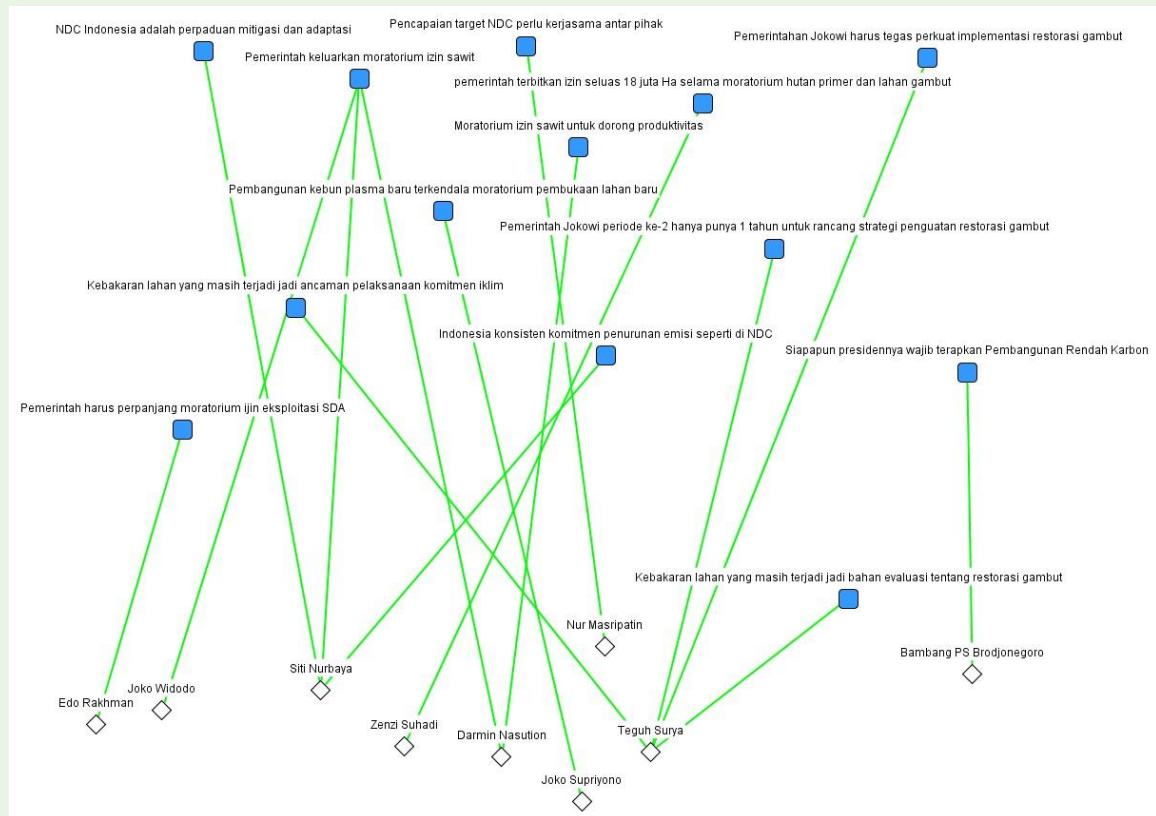
⁸² Ibid

Sementara pihak pemerintah mewacanakan bahwa ditutupnya data HGU dari akses publik dalam rangka kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tak sehat dan informasi yang berkaitan hak-hak pribadi⁸³.

Catatan Lain: Penghentian Permanen Izin di Hutan Sekunder

Selain wacana yang diperdebatkan itu, ada beberapa wacana menarik yang muncul di Mongabay. Meskipun tidak menimbulkan perdebatan, wacana itu tergolong baru. Salah satu wacana itu adalah tentang penghentian izin di hutan primer dan gambut secara permanen. Wacana itu disambut baik oleh organisasi masyarakat sipil. Bahkan lebih jauh lagi, Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mewacanakan penghentian permanen izin di hutan skunder. Alasannya, hutan sekunder yang saat ini terancam dibabat⁸⁴.

L. Neraca



Data yang diambil untuk media Neraca adalah data dari tahun 2017 hingga 2019. Berikut aktor-aktor pembangun wacana yang berhasil didokumentasikan Neraca dalam kurun waktu tersebut.

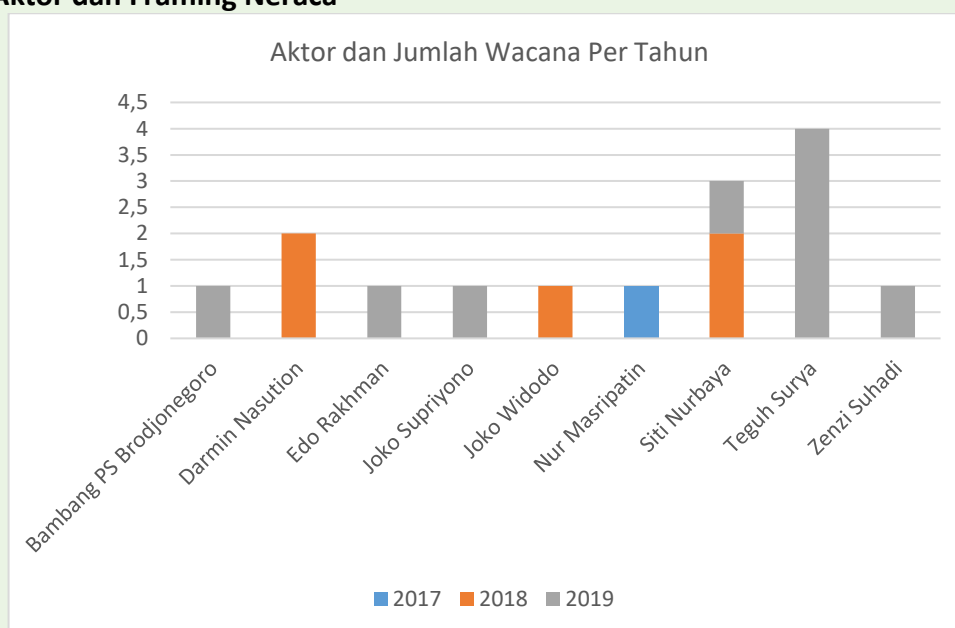
⁸³ <https://www.mongabay.co.id/2019/05/10/surat-edaran-kemenko-perekonomian-soal-larang-buka-data-sawit-tuai-protas/>

⁸⁴ <https://www.mongabay.co.id/2019/05/20/kebijakan-setop-izin-di-hutan-primer-dan-lahan-gambut-bakal-permanen/>

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Joko Widodo	Presiden RI
2	Nur Masripatin	Direjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
3	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
4	Darmin Nasution	Menko Bidang Perekonomian
5	Teguh Surya	Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan
6	Joko Supriyono	Ketua Umum Gapki
7	Bambang PS Brodjonegoro	Menteri PPN/Kepala Bappenas
8	Edo Rakhman	Juru Kampanye Walhi
9	Zenzi Suhadi,	Kepala Departemen Advokasi Walhi

Dari data tersebut di atas nampak bahwa aktor yang produktif dalam memproduksi wacana adalah Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan dan Siti Nurbaya, Menteri KLHK. Sementara Presiden Jokowi hanya memproduksi satu wacana terkait dengan moratorium sawit. Meskipun hanya memproduksi satu wacana, namun wacananya menjadi perbincangan.

Pilihan Aktor dan Framing Neraca



Dari grafik di atas terlihat bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC Kehutanan paling banyak diproduksi pada tahun 2019. Aktor yang paling aktif memproduksi wacana adalah Teguh Surya dan disusul Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Menko Ekonomi Darmin Nasution.

Dari grafik tersebut juga bisa dilihat bahwa perspektif yang digunakan Neraca dalam memberitakan perubahan iklim dan NDC kehutanan relative berimbang. Cara pandang ini yang membuat Neraca mengambil framing persoalan ekologi dan ekonomi adalah dua sisi mata uang, tidak saling menegasikan.

Menurut neraca, narasi ekologi dan ekonomi tidak seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang saling menegasikan, melainkan saling melengkapi. Bahkan dalam tajuk yang ditulis oleh Redaktur Pelaksana Neraca Firdaus Baderi dalam artikel yang berjudul, “Peluang Saat Krisis Iklim”⁸⁵, mengungkapkan bahwa di balik krisis iklim terdapat peluang bisnis. Pesan yang muncul kepentingan ekologi dalam hal ini upaya penanganan perubahan iklim, sejatinya tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi.

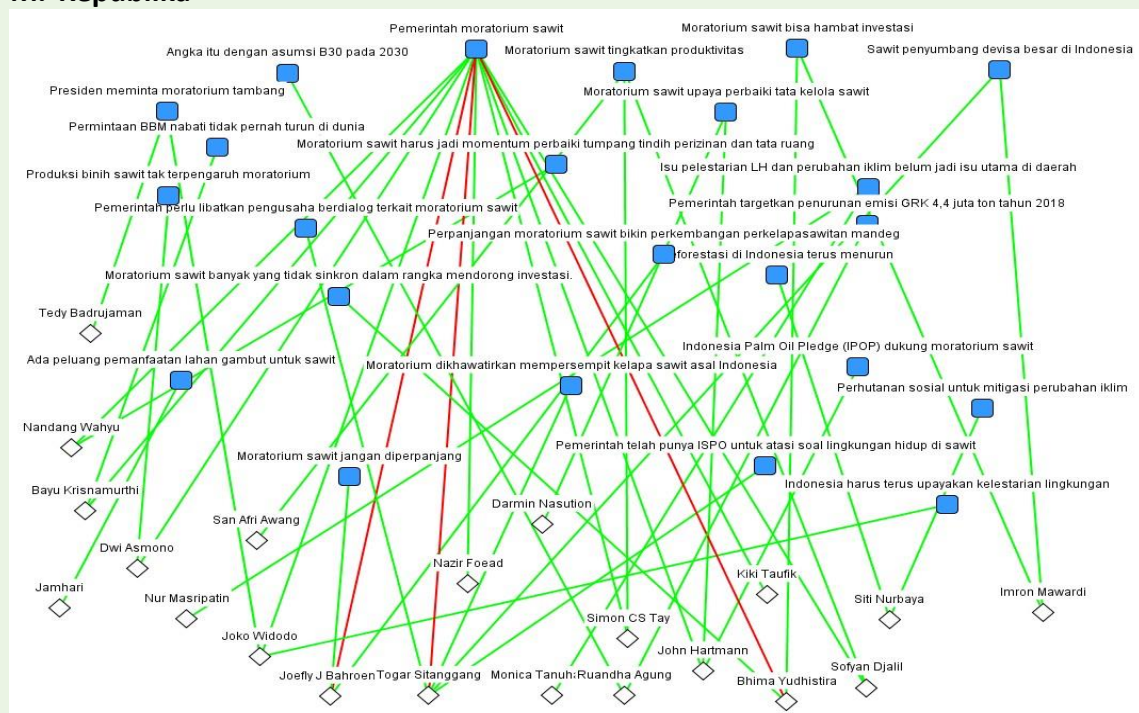
Sentimen Positif terhadap Advokasi Aktivistis Lingkungan Hidup

Neraca memberikan sentiment positif terhadap advokasi lingkungan hidup yang dilakukan oleh para aktivis. Advokasi itu terkait dengan kontrol atas implementasi kebijakan moratorium hutan primer.

Wacana yang berhasil didokumentasikan oleh Neraca terkait hal itu misalnya adanya penerbitan izin seluas 18 juta hektare (Ha) selama moratorium hutan primer dan lahan gambut⁸⁶. Wacana ini seakan mengirimkan pesan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam melakukan moratorium izin di hutan primer dan lahan gambut.

Seperti gayung bersambut. Pesan dari wacana ini kemudian diperkuat oleh wacana dari Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan. Menurut Teguh, pemerintahan Presiden Jokowi periode ke-2, harus lebih tegas dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait implementasi moratorium sawit dan memperkuat kebijakan moratorium hutan⁸⁷.

M. Republika



⁸⁵ <https://www.neraca.co.id/article/120091/peluang-saat-krisis-iklim>

⁸⁶ <https://www.neraca.co.id/article/119226/moratorium-hutan-pemerintah-justru-terbitkan-izin-18-juta-hektar>

⁸⁷ <http://www.neraca.co.id/article/118726/menanti-kebijakan-kepemimpinan-baru-bagi-restorasi-gambut>

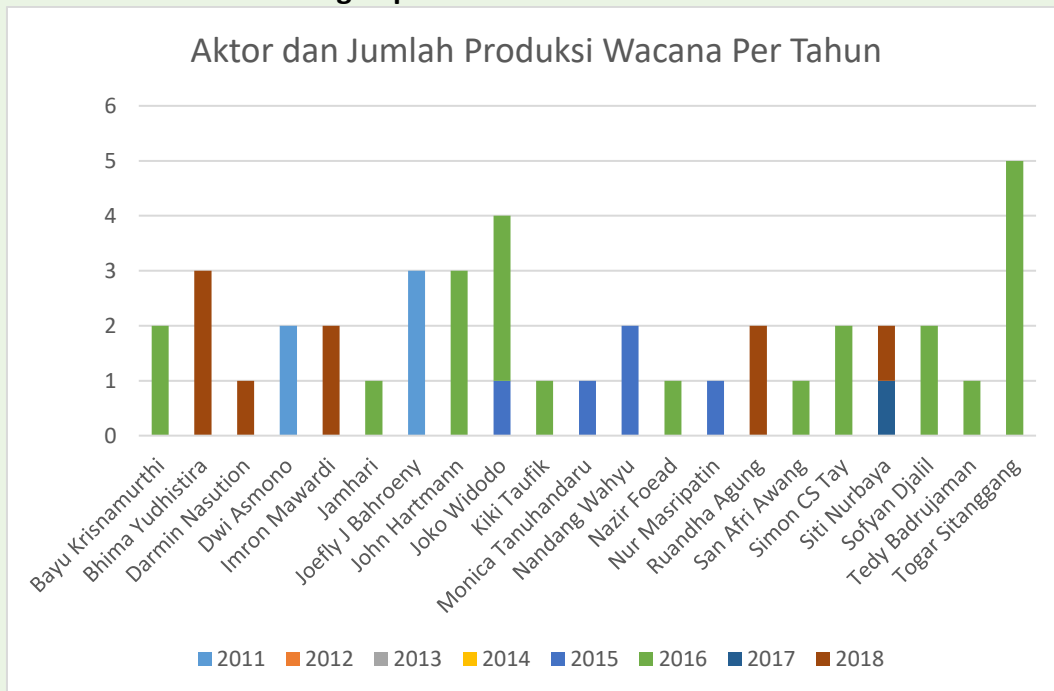
Data dari dokumentasi percakapan tentang perubahan iklim dan NDC di Republika diambil sejak dari 2011 hingga 2019. Namun, belum ada data terkait isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan hingga Agustus 2019. Data dari 2011 diambil karena akan menunjukkan dinamika perdebatan wacana yang terjadi.

Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh Republika. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh Republika adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Dwi Asmono	Ketua Forum Komunikasi Produsen Benih Sawit Indonesia (FKPBSI)
2	Joefly J Bahroeny	Ketua Umum Gapki
3	Joko Widodo	Presiden RI
4	Nandang Wahyu	Aktivis Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI)
5	Monica Tanuhandaru	Direktur Eksekutif Kemitraan
6	Nur Masripatin	Direjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
7	Tedy Badrujaman	Direktur Utama Antam
8	Sofyan Djalil	Ka Bappenas
9	Affairs Simon CS Tay	Ketua Singapore Institute of International
10	Nazir Foead	Kepala BRG
11	Kiki Taufik	Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace
12	Bayu Krisnamurthi	Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit
13	Togar Sitanggang	Sekretaris Jenderal GAPKI
14	John Hartmann	CEO Cargill Tropical Palm, perwakilan IPOP
15	Jamhari	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada
16	San Afri Awang	Dirjen PKTL KLHK
17	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
18	Bhima Yudhistira	Pengamat ekonomi Indef
19	Imron Mawardi	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah, Unair
20	Ruandha Agung Sugardiman	Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK
21	Darmin Nasution	Menko Bidang Perekonomian

Dari peta jejaring wacana tersebut di atas, terlihat bahwa Jokowi, menjadi aktor yang mampu menggerakkan perdebatan wacana di Republika. Wacana Jokowi yang mampu menggerakkan perdebatan wacana adalah terkait moratorium sawit.

Pilihan Aktor dan Framing Republika



Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC kehutanan paling banyak diproduksi pada tahun 2016. Aktor yang paling aktif memproduksi wacana adalah Togar Sitanggang, kemudian disusul oleh Presiden Jokowi.

Dari pilihan aktor yang dikutip menjadi narasumber pemberitaan tentang perubahan iklim dan NDC kehutanan terlihat bahwa Republika menggunakan prespektif pengusaha, baik itu pengusaha sawit maupun kehutanan. Dominasi narasumber dari kalangan pengusaha dan akademisi yang mendukung perusahaan sawit terlihat jelas dari grafik tersebut di atas.

Framing pemberitaan Republika dalam memberitakan isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan masih menggunakan framing ekonomi, seperti kebanyakan media pada umumnya. Artinya, kebijakan terkait perlindungan lingkungan penting namun tidak boleh merugikan kepentingan ekonomi. Ekonomi dalam konteks ini tentu saja ekonomi yang menjadi kepentingan pengusaha perkebunan dan kehutanan.

Sentimen Negatif terhadap Kebijakan Moratorium Hutan Primer, Gambut dan Sawit

Sentimen negatif terhadap kebijakan moratorium sawit dibangun dengan narasi bahwa kebijakan moratorium itu mengganggu investasi.

GAPKI adalah asosiasi pengusaha sawit yang berada di garis depan dalam melakukan perlawanan terhadap wacana moratorium izin di hutan primer, lahan gambut hingga sawit ini. Alasannya, moratorium tersebut akan menghambat perkembangan sawit yang merupakan komoditas andalan dalam mendulang devisa negara⁸⁸.

⁸⁸ <https://Republika.Co.Id/Berita/O68ccp219/Gapki-Keberatan-Moratorium-Kelapa-Sawit>

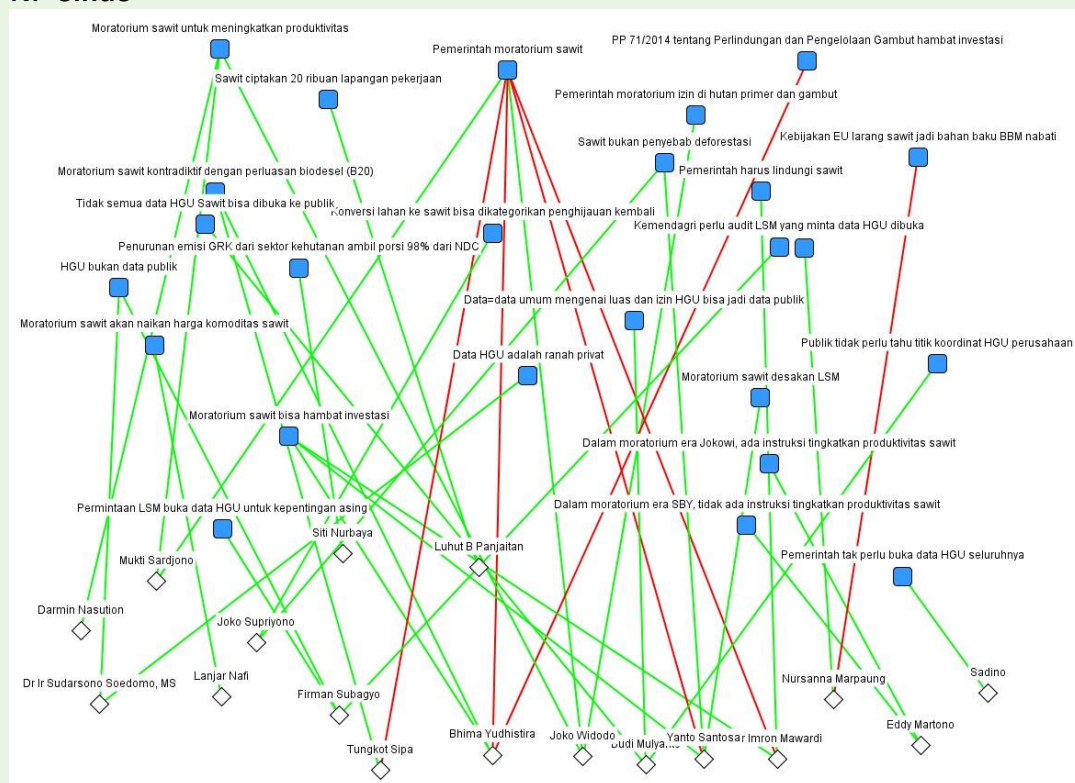
Penolakan wacana moratorium juga muncul dari pengamat ekonomi dari Indef. Pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudhistira menilai kebijakan moratorium sawit dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 jo PP Nomor 57/2016 (PP Gambut) merupakan regulasi yang bisa menghambat investasi⁸⁹.

Catatan Lain: Pengusaha Sawit tidak bulat Menolak Kebijakan Moratorium

Meskipun dalam pemberitaan Republika ada sentiment negative terhadap kebijakan moratorium sawit, namun di dalam pemberitaan Republika juga muncul wacana yang menarik untuk dicermati. Wacana itu memperlihatkan tidak bulatnya pengusaha sawit dalam menolak moratorium

Meskipun asosiasi pengusaha sawit yang tergabung dalam GAPKI menolak wacana moratorium, pengusaha yang tergabung dalam Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) justru mendukung wacana moratorium. CEO Cargill Tropical Palm, perwakilan IPOP, John Hartmann mengungkapkan bahwa moratorium adalah kesempatan untuk memperbaiki tata kelola industri sawit nasional⁹⁰.

N. Sindo



Data dari dokumentasi percakapan tentang perubahan iklim dan NDC di SINDO diambil sejak dari 2016 hingga 2019. Pengambilan data dari 2016 ini dikarenakan keterbatasan mesin pencari di laman SINDO.

⁸⁹ <https://Republika.Co.Id/Berita/P52Izp380/Inpres-Moratorium-Sawit-Harus-Lindungi-Investasi>

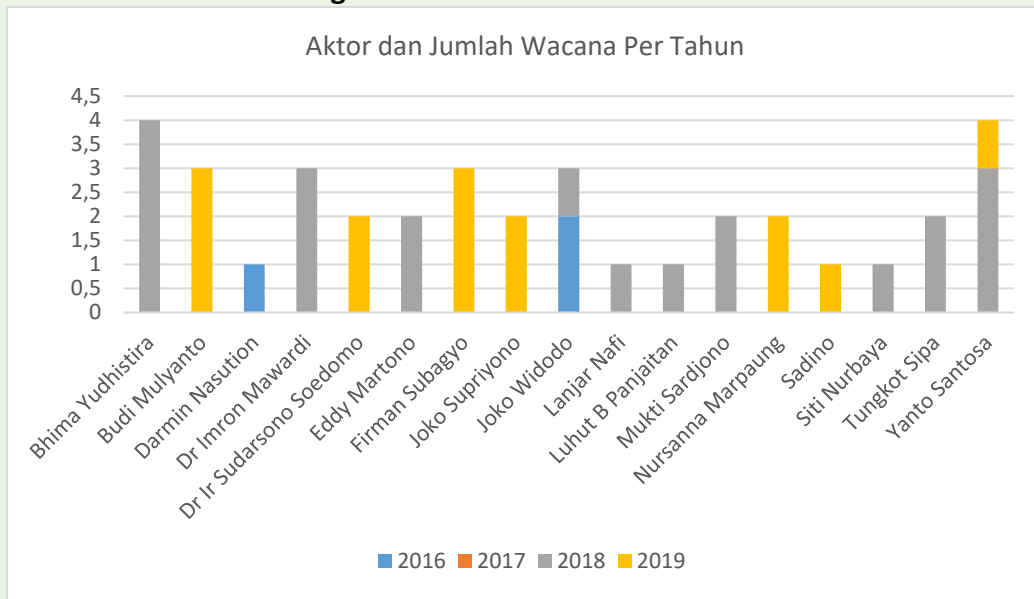
⁹⁰ <https://Republika.Co.Id/Berita/O68n3j383/Ipop-Dukung-Moratorium-Sawit>

Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh SINDO. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh SINDO adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Joko Widodo	Presiden RI
2	Darmin Nasution	Menko bidang Perekonomian
3	Bhima Yudhistira	Pengamat ekonomi Indef
4	Dr Imron Mawardi	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah Unair
5	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
6	Luhut Binsar Panjaitan	Menko Maritim dan SDA
7	Mukti Sardjono	Direktur Eksekutif Gapki
8	Lanjar Nafi	Analisis Reliance Sekuritas
9	Nursanna Marpaung	Sekretaris Eksekutif Jejaring/Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI)
10	Budi Mulyanto	Guru Besar IPB bidang Ahli Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan SDA
11	Sadino	Pengamat hukum kehutanan dan lingkungan
12	Firman Subagyo	Anggota Komisi II DPR
13	Dr Ir Sudarsono Soedomo, MS	Dosen Fakultas Kehutanan IPB
14	Prof Dr Yanto Santosa	Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB
15	Joko Supriyono	Ketua Umum Gapki

Dalam peta jejaring wacana di atas nampak, bahwa meskipun bukan aktor dominan, namun Jokowi mampu menggerakkan perdebatan wacana. Wacana yang menjadi perdebatan publik adalah wacana yang terkait moratorium sawit.

Pemilihan Aktor dan Framing Sindo



Dari grafik di atas nampak bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC Kehutanan paling banyak diproduksi pada tahun 2018. Aktor yang paling banyak memproduksi wacana adalah Bhima Yudhistira dan Yanto Santosa. Bhima Yudistira banyak memproduksi wacana pada 2018. Sedangkan Yanto Santosa banyak memproduksi wacana pada tahun 2018 dan 2019. Keduanya adalah akademisi yang mendukung perusahaan sawit.

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa Sindo dalam memberitakan persoalan perubahan iklim dan NDC kehutanan menggunakan prespektif kepentingan pengusaha sawit dengan 'meminjam' suara akademisi atau peneliti.

Framing pemberitaan Sindo terkait isu perubahan iklim dan NDC kehutanan hampir sama dengan kebanyakan media, yaitu dengan mengguakan framing ekonomi. Isu ekonomi menjadi isu penting dibandingkan ekologi. Isu apapun tidak boleh mengganggu kepentingan ekonomi. Namun, yang dimaksud ekonomi dalam hal ini adalah kepentingan pengusaha di sektor perkelapasawitan.

Sentimen Negatif terhadap Kebijakan Moratorium Sawit

Setimen negatif terhadap kebijakan moratorium sawit dibangun dengan narasi bahwa moratorium sawit akan mengganggu investasi. Narasi ini melawan narasi ekonomi pemerintah yang mengungkapkan bahwa moratorium sawit tidak akan mengganggu dunia usaha, karena justru akan meningkatkan produktivitas sawit⁹¹.

⁹¹ <https://Ekbis.Sindonews.Com/Read/1101071/34/Ini-Alasan-Pemerintah-Moratorium-Lahan-Sawit-Dan-Tambang-1460634099>

Pengamat ekonomi dari Indef Bhima Yudhistira misalnya, menilai kebijakan moratorium sawit dan Peraturan Pemerintah (PP) No 71/2014 jo PP No 57/2016 (PP Gambut) merupakan regulasi yang bisa menghambat investasi⁹².

Pandangan itu juga disetujui oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah Unair Dr Imron Mawardi. Menurutnya, moratorium tidak mendorong investasi dan juga tidak akan menyelesaikan masalah-masalah yang jadi alasan dilakukan moratorium⁹³.

Kebijakan moratorium sawit juga mendapat perlawanan dari akademisi IPB. Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa. Menurutnya, kebijakan moratorium sangat berlebihan dan pasti mengganggu investasi dan perekonomian.

O. Suara Pembaruan



Data dari dokumentasi percakapan tentang perubahan iklim dan NDC di Suara Pembaruan diambil sejak dari 2014 hingga 2019.

Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh Suara Pembaruan. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh Suara Pembaruan adalah sebagai berikut:

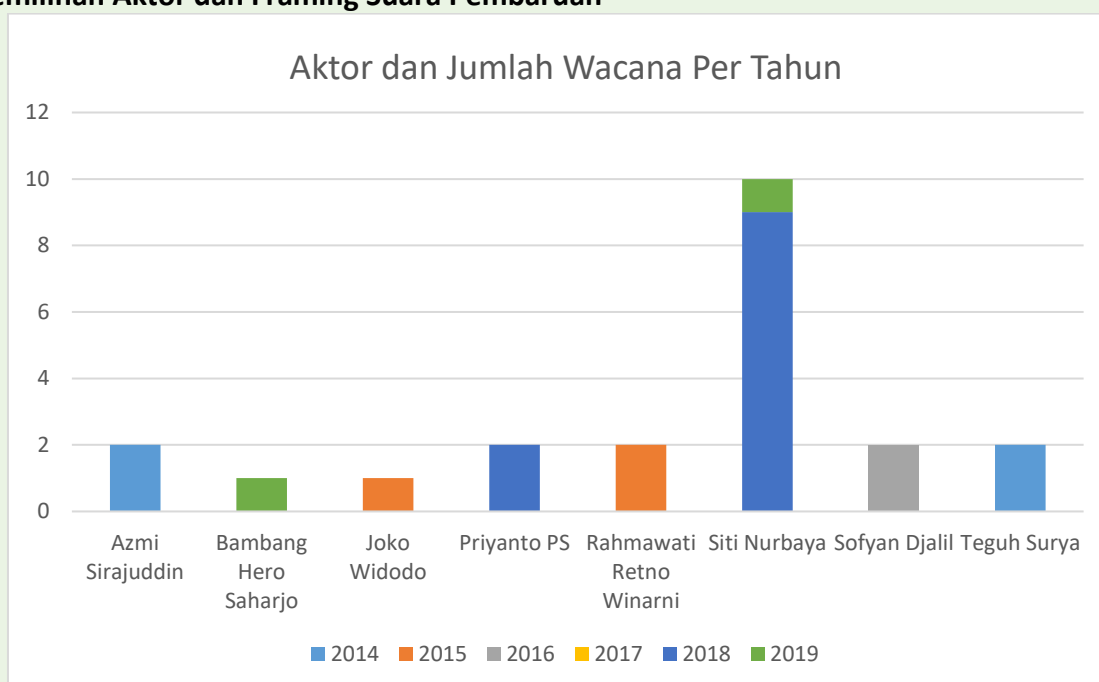
⁹² <https://Ekbis.Sindonews.Com/Read/1286072/34/Inpres-Moratorium-Sawit-Harus-Lindungi-Investasi-Dan-Dunia-Usaha-1519888260>

⁹³ Ibid

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Azmi Sirajuddin	Ketua Dewan Daerah WALHI Sulteng
2	Teguh Surya	Pengkampanye Politik Hutan Greenpeace
3	Rahmawati Retno Winarni	Direktur Program TUK Indonesia
4	Joko Widodo	Presiden RI
5	Sofyan Djalil	Ka Bappenas
6	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
7	Priyanto PS	Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Instiper Yogyakarta
8	Bambang Hero Saharjo	Guru Besar IPB

Dalam peta jejaring wacana di atas nampak bahwa Menteri Siti Nurbaya, menjadi aktor yang paling produktif memproduksi wacana. Meskipun wacana yang diproduksi tidak menjadi perbincangan dan juga perdebatan wacana di Suara Pembaruan.

Pemilihan Aktor dan Framing Suara Pembaruan



Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC sector kehutanan banyak diproduksi pada tahun 2018. Aktor yang paling aktif memproduksi wacana adalah Menteri KLHK Siti Nurbaya.

Dari pilihan aktor sebagai narasumber tersebut di atas nampak bahwa pemberitaan isu perubahan iklim di Suara Pembaruan menggunakan perspektif pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Framing yang digunakan Suara Pembaruan dalam memberitakan isu Perubahan Iklim dan NDC Kehutanan mulai seimbang dalam menggunakan framing ekologi. Suara Pembaruan melihat persoalan ekologi sebagai persoalan yang sama pentingnya dengan isu ekonomi.

Sentimen Positif terhadap Advokasi Lingkungan Organisasi Masyarakat Sipil

Sentimen positif advokasi lingkungan dari masyarakat sipil itu dibangun dengan narasi bahwa gerakan lingkungan hidup bukan anti-nasionalisme. Justru advokasi lingkungan ingin menyelamatkan Indonesia dari bencana lingkungan dan ketidakadilan ekonomi melalui kepemilikan lahan yang timpang.

Salah satu wacana yang menyorot ketidakadilan ekonomi itu adalah kepemilikan lahan sawit yang dikuasai segelintir orang. Direktur Program TUK Indonesia Rahmawati Retno Winarni mengungkapkan bahwa 25 grup usaha kelapa sawit juga telah mengontrol 3,1 juta hektare lahan kebun kelapa sawit di Indonesia. Sementara, 62 persen lahan kelapa sawit yang dikendalikan 25 grup bisnis berada di Kalimantan⁹⁴.

Wacana bukan hanya meruntuhkan narasi ekonomi yang sering digunakan oleh pengusaha sawit, namun juga mematahkan narasi nasionalisme yang sering digunakan oleh para pendukung sawit. Narasi nasionalisme dalam melawan kampanye lingkungan hidup misalnya mengatakan bahwa kampanye NGOs lingkungan terutama asing yang menyerang sawit sama saja dengan menyerang kedaulatan NKRI⁹⁵.

Catatan Lain: Kebijakan Moratorium dan Kebakaran Hutan

Selain itu, juga ada wacana terkait pengaruh moratorium dengan kebakaran lahan. Wacana itu mengungkapkan bahwa moratorium yang dilakukan di era Presiden SBY belum mampu mencegah kebakaran lahan. Pengkampanye Politik Hutan Greenpeace Teguh Surya mengungkapkan bahwa pemerintah di era SBY masih setengah hati menyelamatkan hutan alam dan lahan gambut yang tersisa dengan memanfaatkan berbagai celah dalam kebijakan yang tanpa sanksi⁹⁶.

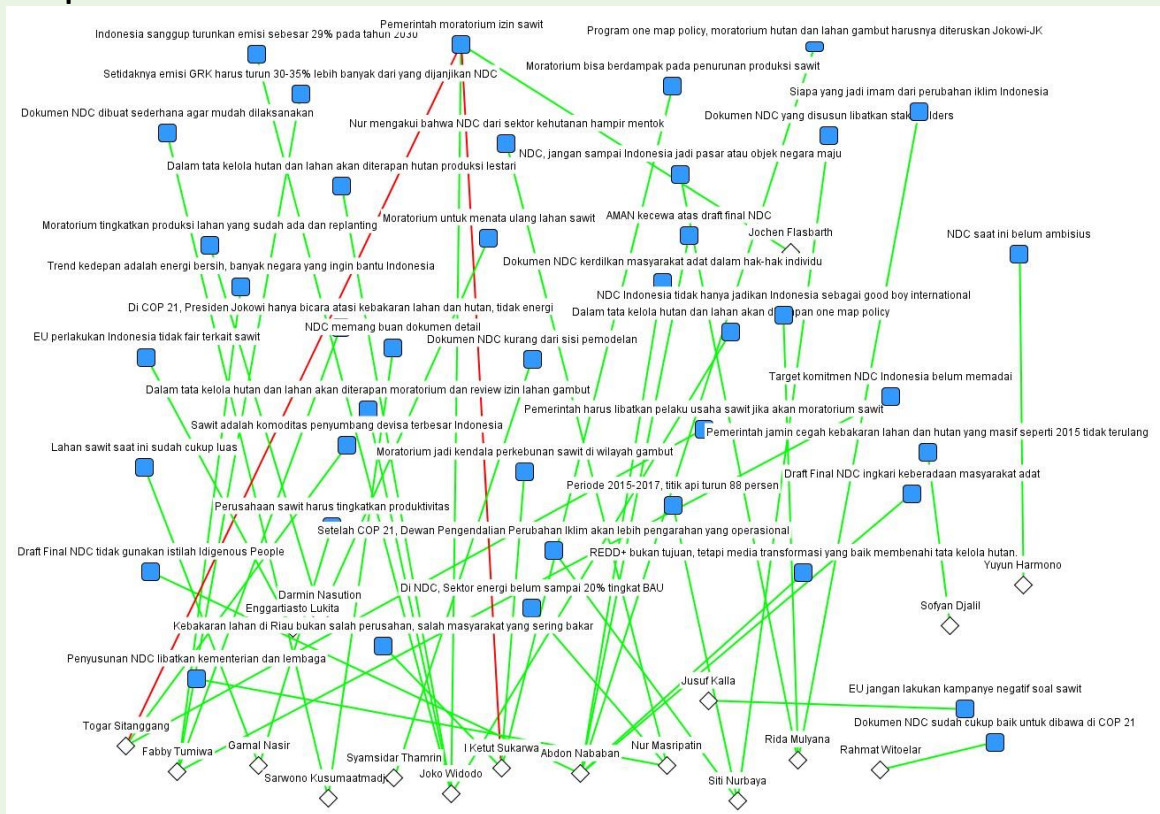
Wacana ini menarik bila dijadikan bahan refleksi sejauh mana pengaruh moratorium izin hutan, lahan gambut dan sawit terhadap kejadian kebakaran lahan. Refleksi itu menarik sebagai bahan pembelajaran kedepannya.

⁹⁴ <https://Sp.Beritasatu.Com/Home/Menelusuri-Jejak-Taipan-Kelapa-Sawit-Di-Indonesia/79651>

⁹⁵ <http://Sp.Beritasatu.Com/Home/Priyanto-Selamatkan-Industri-Sawit-Indonesia/127284>

⁹⁶ <https://Sp.Beritasatu.Com/Home/Koalisi-Masyarakat-Sipil-Desak-Pemerintah-Selamatkan-Hutan/55807>

P. Tempo.co



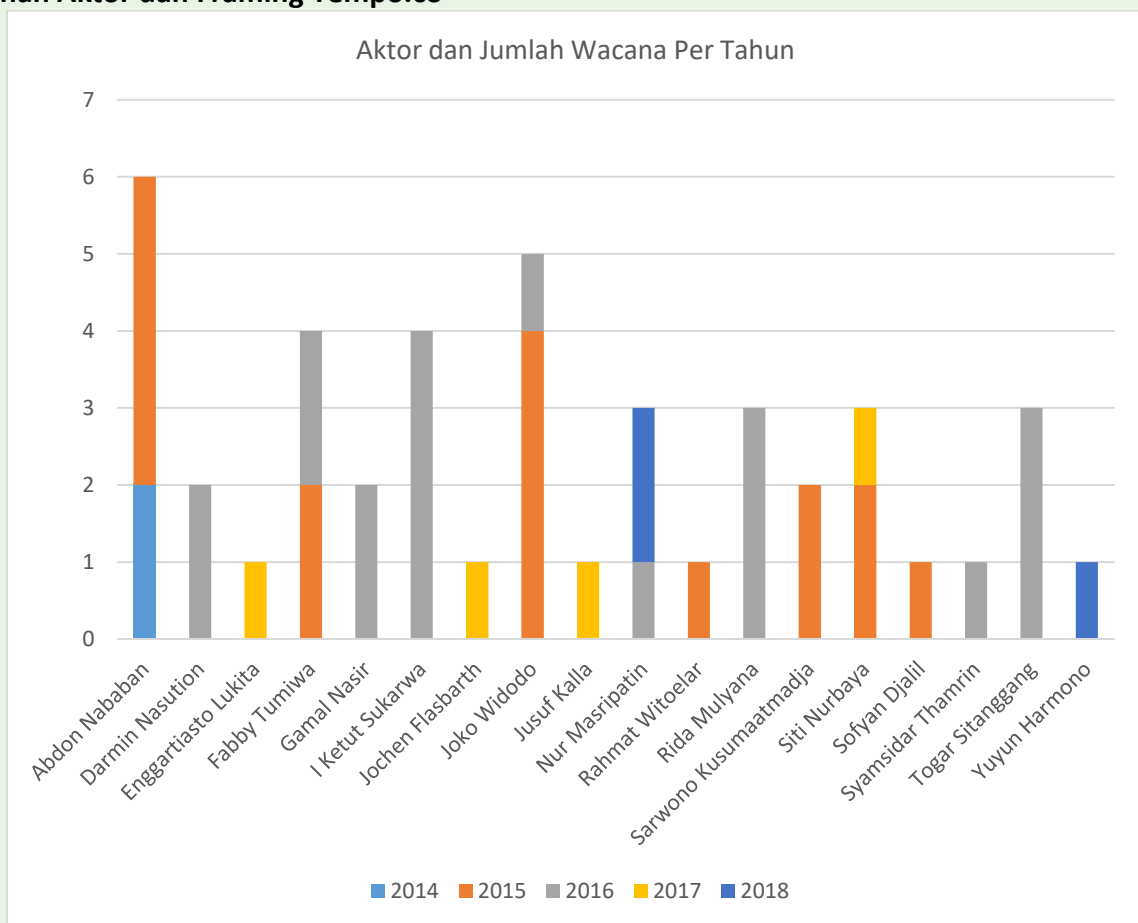
Data dari dokumentasi percakapan tentang perubahan iklim dan NDC di Tempo.co diambil sejak dari 2014 hingga 2019. Namun, hingga analisis DNA dilakukan pada Agustus 2019, belum ada artikel terkait perubahan iklim dan NDC kehutanan yang didokumentasikan Tempo.co.

Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh Tempo.co. Adapun aktor-aktor pembanguna wacana yang didokumentasikan oleh Tempo.co adalah sebagai berikut:

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Abdon Nababan	Sekjend AMAN
2	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
3	Sarwono Kusumaatmadja	Ketua Dewan Pengarah Perubahan Iklim tingkat nasional
4	Rachmat Witoelar	Utusan khusus Presiden untuk pengendalian perubahan iklim
5	Joko Widodo	Presiden RI
6	Fabby Tumiwa	Direktur Eksekutif IESR
7	Sofyan Djalil	Ka Bappenas
8	Gamal Nasir	Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
9	Togar Sitanggang	Sekretaris Jenderal GAPKI
10	I Ketut Sukarwa	Sekretaris GAPKI Riau
11	Darmin Nasution	Menko Bidang Perekonomian

12	Nur Masripatin	Dirjen Pengendali Perubahan Iklim KLHK
13	Rida Mulyana	Dirjen EBT dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM
14	Syamsidar Thamrin	Kepala Subdit Iklim dan Cuaca Bappenas
15	Jochen Flasbarth	State Secretary of Germany Federal Ministry for Environment
16	Jusuf Kalla	Wakil Presiden RI
17	Enggartiaso Lukita	Menteri Perdagangan
18	Yuyun Harmono	Pengkampanye Keadilan Iklim Walhi

Pilihan Aktor dan Framing Tempo.co



Dari grafik tersebut nampak bahwa wacana terkait dengan perubahan iklim dan NDC Kehutanan banyak diproduksi pada tahun 2015. Abdon Nababan dan Joko Widodo paling banyak memproduksi wacana dalam kurun waktu tersebut.

Dari grafik tersebut di atas nampaknya tempo.co memberikan ruang yang sama bagi para pihak untuk bersuara. Namun, dalam memberitakan persoalan perubahan iklim, tempo.co masih menggunakan framing ekonomi. Artinya, kepentingan pengusaha sawit dan hutan lebih penting daripada persoalan lingkungan hidup

Sentimen negatif terhadap NDC Kehutanan dan Moratorium Sawit.

Sentimen negatif yang muncul dari pemberitaan Tempo.co adalah terkait dengan NDC kehutanan dan moratorium sawit. Untuk NDC Kehutanan, sentiment negatif dibangun melalui narasi bahwa proses penyusunan NDC kehutanan tidak partisipatif.

Dalam memberitakan NDC kehutanan misalnya, Tempo.co memberitakan bahwa NDC Kehutanan yang dipertanyakan proses penyusunannya oleh kelompok masyarakat sipil. Adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang kecewa dengan penyusunan dokumen NDC. Menurut AMAN draft NDC itu mengingkari masyarakat adat di Indonesia dengan tidak menggunakan istilah indigenous peoples sebagaimana tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat⁹⁷.

Proses penyusunan NDC Kehutanan bukan hanya dipersoalkan oleh AMAN, namun juga oleh sesama instansi pemerintah. dalam pertarungan wacana mengenai perubahan iklim yang sempat didokumentasikan oleh tempo, terlihat adanya ego sectoral antara lembaga di pemerintahan.

Perebutan 'imam' perubahan iklim, menurut istilah tempo.co. Kebingungan siapa yang menjadi 'imam' dalam persoalan perubahan iklim dikemukakan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana⁹⁸. Menurutnya ketidakjelasan siapa yang menjadi imam itu nampak dari tidak sinkronnya dokumen RAN GRK Bappenas dan NDC yang dibuat oleh KLHK⁹⁹. Pihak Bappenas, melalui Kepala Subdit Iklim dan Cuaca Syamsidar Thamrin mengungkapkan bahwa NDC yang dibuat KLHK menggunakan model yang berbeda-beda. Sementara RAN GRK yang dibuat Bappenas menggunakan model sistem dinamik¹⁰⁰.

Sementara untuk moratorium sawit, sentiment negative dibangun melalui narasi bahwa kebijakan itu mengganggu ekonomi. Hal itu nampak dari berita yang berjudul, "Riau Minta Moratorium Sawit Dikaji Ulang¹⁰¹". Judul berita itu mengeneralisasi seakan seluruh Riau menolak moratorium sawit, padahal yang menolak hanya Sekretaris Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia Riau. Generalisasi oleh tempo.co ini mengarahkan pembaca untuk melihat bahwa moratorium sawit ditolak oleh seluruh masyarakat Riau. Padahal, bila melihat isinya, aktor yang menolak tidak merepresentasikan seluruh masyarakat Riau.

Selain itu sentiment negatif terhadap moratorium sawit juga dibangun dengan narasi bahwa bukan sawit yang menyebabkan kebakaran lahan. Narasi itu muncul dari

⁹⁷ <https://Nasional.Tempo.Co/Read/700680/Aman-Curiga-Dokumen-Perubahan-Iklim-Disusun-Carbon-Cowboy/Full&View=Ok>

⁹⁸ <https://Nasional.Tempo.Co/Read/795306/Menyoal-Imam-Dalam-Mengendalikan-Dampak-Perubahan-Iklim/Full&View=Ok>

⁹⁹ Ibid

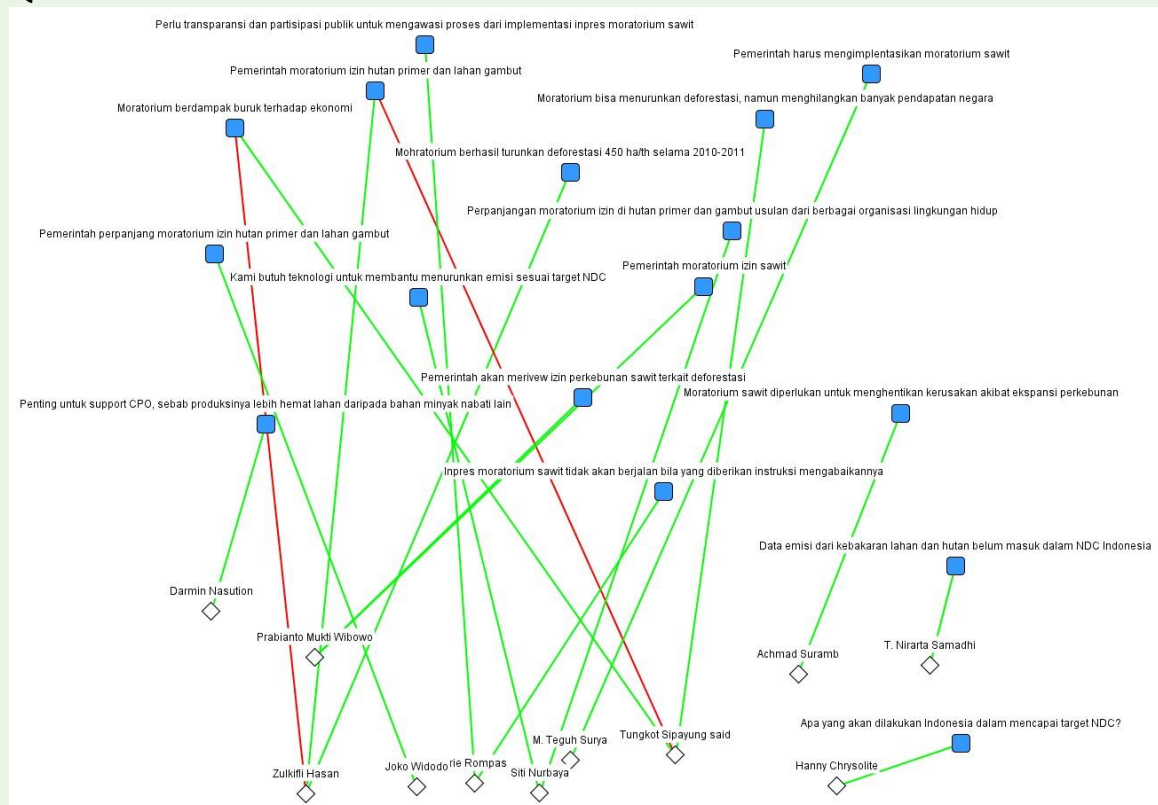
¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹ <https://Bisnis.Tempo.Co/Read/772799/Riau-Minta-Moratorium-Sawit-Dikaji-Ulang/Full&View=Ok>

pernyataan Sekretaris Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Indonesia Riau I Ketut Sukarwa, kebakaran lahan bukan disebabkan oleh perusahaan sawit¹⁰².

Meskipun demikian menurut catatan Tempo.co, baik pihak yang pro dan kontra sama-sama menggunakan narasi ekonomi. Pihak yang mendukung kebijakan moratorium sawit menggunakan narasi bahwa kebijakan itu akan meningkatkan produktivitas sawit¹⁰³. Penolakan terhadap wacana moratorium pun menggunakan narasi ekonomi pula. Sawit yang diklaim sebagai komoditas pendulang devisa menjadi salah satu alasannya¹⁰⁴.

Q. The Jakarta Post



Data dari dokumentasi percakapan tentang perubahan iklim dan NDC di The Jakarta Post diambil sejak dari 2013 hingga 2019. Meskipun data diambil sejak tahun 2013, namun tidak banyak wacana yang diproduksi dari para aktor itu.

Di atas adalah peta jejaring aktor dan wacana yang didokumentasikan oleh The Jakarta Post. Adapun aktor-aktor pembangun wacana yang didokumentasikan oleh The Jakarta Post adalah sebagai berikut:

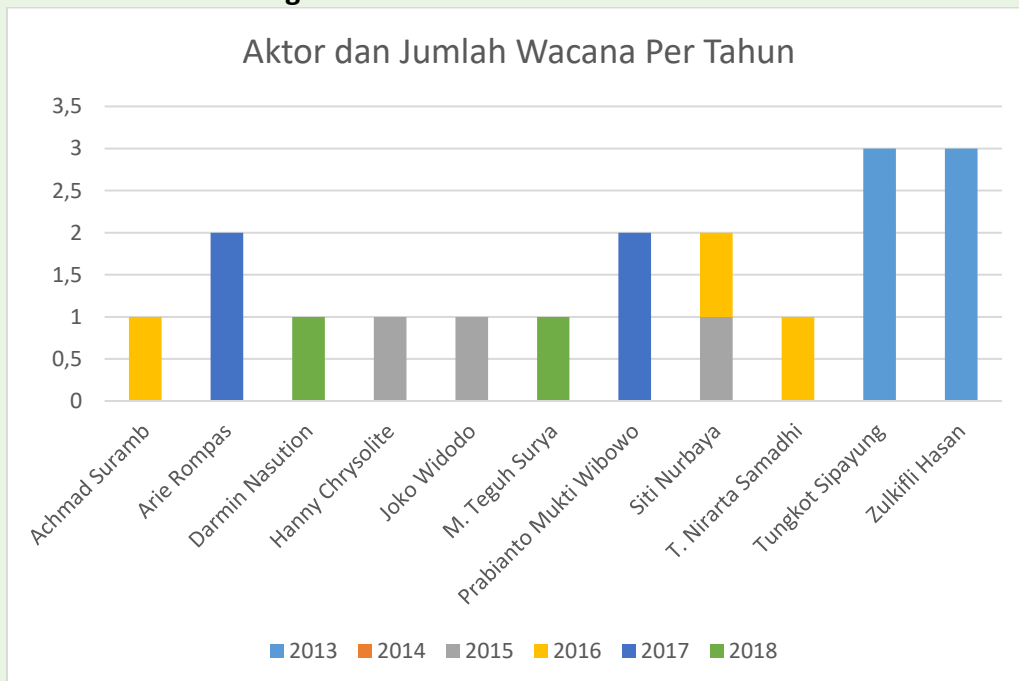
¹⁰² <https://Bisnis.Tempo.Co/Read/772799/Riau-Minta-Moratorium-Sawit-Dikaji-Ulang/Full&View=Ok>

¹⁰³ <https://Bisnis.Tempo.Co/Read/762974/Pemerintah-Masih-Kaji-Masa-Moratorium-Sawit-Dan-Tambang/Full&View=O>

¹⁰⁴ <https://Bisnis.Tempo.Co/Read/765936/Gapki-Penerapan-Moratorium-Sawit-Perlu-Dipertimbangkan/Full&View=Ok>

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Zulkifli Hasan	Forestry Minister
2	Tungkot Sipayung	Director of law and advocacy
3	Joko Widodo	Presiden RI
4	Siti Nurbaya	Menteri KLHK
5	T. Nirarta Samadhi	Director of World Resources Institute Indonesia
6	Hanny Chrysolite	World Resources Institute Indonesia
7	Achmad Surambo	Sawit Watch deputy director
8	Prabianto Mukti Wibowo	Official from the Office of the Coordinating Economic Minister
9	Arie Rompas	Greenpeace Indonesia forest campaign team leader
10	M. Teguh Surya	Executive director at the Madani Foundation
11	Darmin Nasution	Coordinating Economic Minister

Pilihan aktor dan Framing The Jakarta Post



Dari grafik di atas nampak bahwa wacana terkait perubahan iklim dan NDC Kehutanan banyak diproduksi pada tahun 2013. Adapun aktor yang paling produktif memproduksi wacana adalah Menteri Kehutanan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Zulkifli Hasan dan Tungkot Sipayung.

Dari grafik di atas terlihat dalam pilihan aktor yang dikutip dalam pemberitaan, The Jakarta Post memberikan ruang yang relative seimbang bagi semua pihak.

Di tahun 2013, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), framing The Jakarta Post dalam memberitakan persoalan perubahan iklim menempatkan persoalan ekonomi (kepentingan pengusaha sawit) di atas kepentingan ekologi, dalam hal ini menjaga hutan. Hal itu nampak dari perdebatan yang didokumentasikan The Jakarta Post dalam artikel yang berjudul, 'Gapki says 'no' to moratorium extension'¹⁰⁵.

Sebaliknya, pada pemberitaan di era Jokowi, framing The Jakarta Post melihat moratorium sawit menjadi persoalan penting dan tidak bertentangan dengan ekonomi. Beberapa pemberitaan di The Jakarta Post misalnya berita yang berjudul, 'Jokowi extends forest conversion moratorium'¹⁰⁶, dan 'Groups welcome Jokowi's palm plantation moratorium'¹⁰⁷, dengan jelas memperlihatkan framing itu.

Dalam artikel tersebut, pernyataan Gapki diletakan di awal artikel daripada pernyataan Menteri Kehutanan yang mengeluarkan kebijakan moratorium. Dalam struktur berita, piramida terbalik, pernyataan yang diletakan di atas lebih penting daripada bila diletakan di bawah.

Sentimen Positif terhadap Moratorium Hutan dan Sawit di Era Jokowi

Sentimen positif terhadap moratorium hutan dan sawit di era Jokowi dalam pemberitaan di The Jakarta Post nampak dari pemilihan judul dan pemilihan aktor yang menjadi narasumbernya.

Dalam artikel yang berjudul, 'Jokowi extends forest conversion moratorium'¹⁰⁸, dan 'Groups welcome Jokowi's palm plantation moratorium'¹⁰⁹, misalnya terlihat bahwa pemilihan aktor menunjukkan dukungan terhadap kebijakan moratorium pemerintah. The Jakarta Post sama sekali tidak memberikan ruang bagi pihak yang menentang kebijakan itu.

Sentimen Negatif terhadap Moratorium Hutan di Era Presiden SBY

Sebaliknya, di era SBY, kebijakan moratorium hutan justru mendapatkan sentiment negatif. Sentimen negatif itu dibangun dengan menempatkan penolakan atas kebijakan lebih penting daripada pendukung kebijakan moratorium itu sendiri (baca uraian mengenai framing The Jakarta Post sebelumnya).

Di Jakarta Post, wacana yang menjadi perdebatan adalah terkait dengan moratorium sawit. Menurut Menteri Kehutanan era SBY, Zulkifli Hassan, moratorium berhasil menurunkan deforestasi. Menurut Zulkifli, kebijakan moratorium tidak mengganggu

¹⁰⁵ <https://www.thejakartapost.com/news/2013/04/24/gapki-says-no-moratorium-extension.html>

¹⁰⁶ <https://www.thejakartapost.com/news/2015/05/13/jokowi-extends-forest-conversion-moratorium.html>

¹⁰⁷ <https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/20/groups-welcome-jokowis-palm-plantation-moratorium.html>

¹⁰⁸ <https://www.thejakartapost.com/news/2015/05/13/jokowi-extends-forest-conversion-moratorium.html>

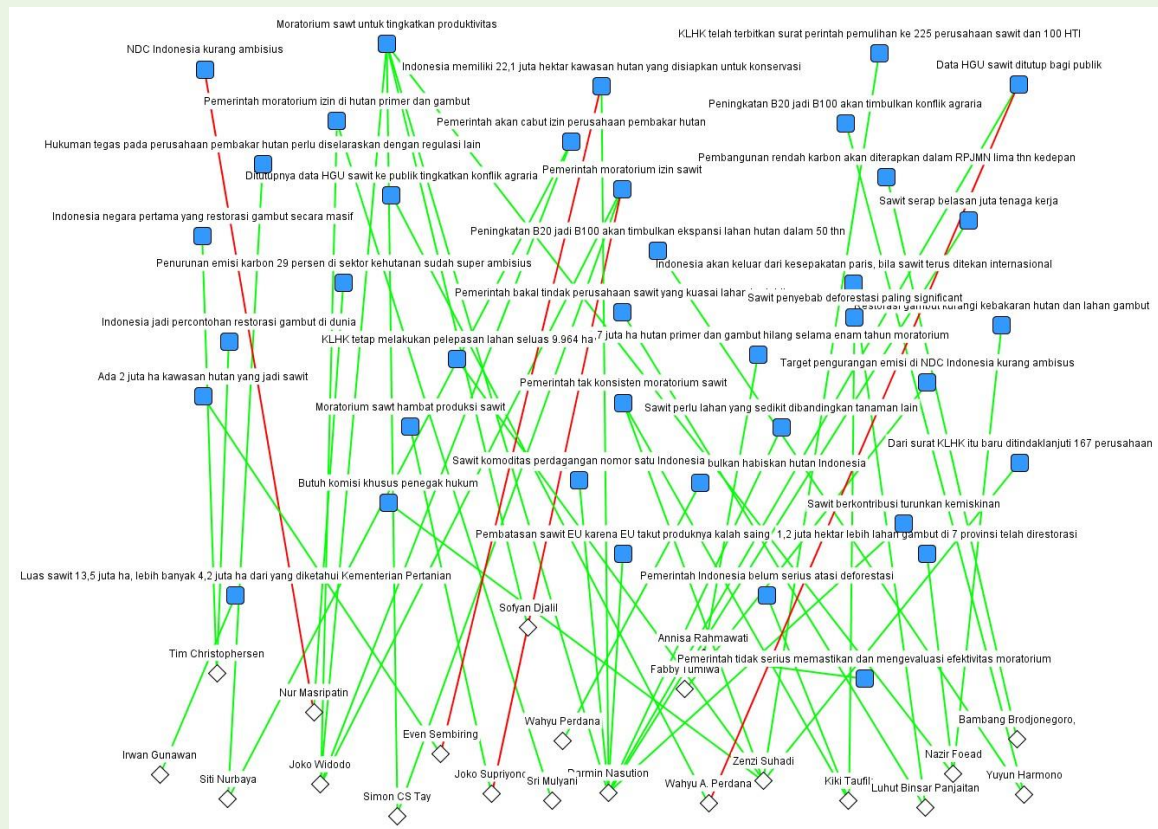
¹⁰⁹ <https://www.thejakartapost.com/news/2018/09/20/groups-welcome-jokowis-palm-plantation-moratorium.html>

ekonomi. Sementara itu, Indonesian Palm Oil Association (Gapki) justru mengungkapkan sebaliknya¹¹⁰.

Catatan Lain: Memperkuat Standart ISPO

Wacana lain yang muncul adalah tentang perlunya memperkuat standart ISPO untuk produksi sawit. M Teguh Surya, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan meminta pemerintah memperkuat ISPO dan memepriotaskan pendanaan untuk petani kecil dan juga praktik perkebunan yang berkelanjutan¹¹¹. Sayangnya, The Jakarta Post tidak menelisk lebih dalam lagi, hal apa di ISPO yang perlu diperkuat.

R. Tirto



Data yang diambil dari tirto sejak tahun 2016 hingga 2019. Di atas peta pertarungan wacana terkait isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan yang berhasil didokumentasikan Tirto. Di bawah ini aktor-aktor pembangun wacananya.

No	Aktor	Organisasi/Lembaga
1	Simon CS Tay	Ketua Singapore Institute of International Affairs
2	Siti Nurbaya	Menteri KLHK

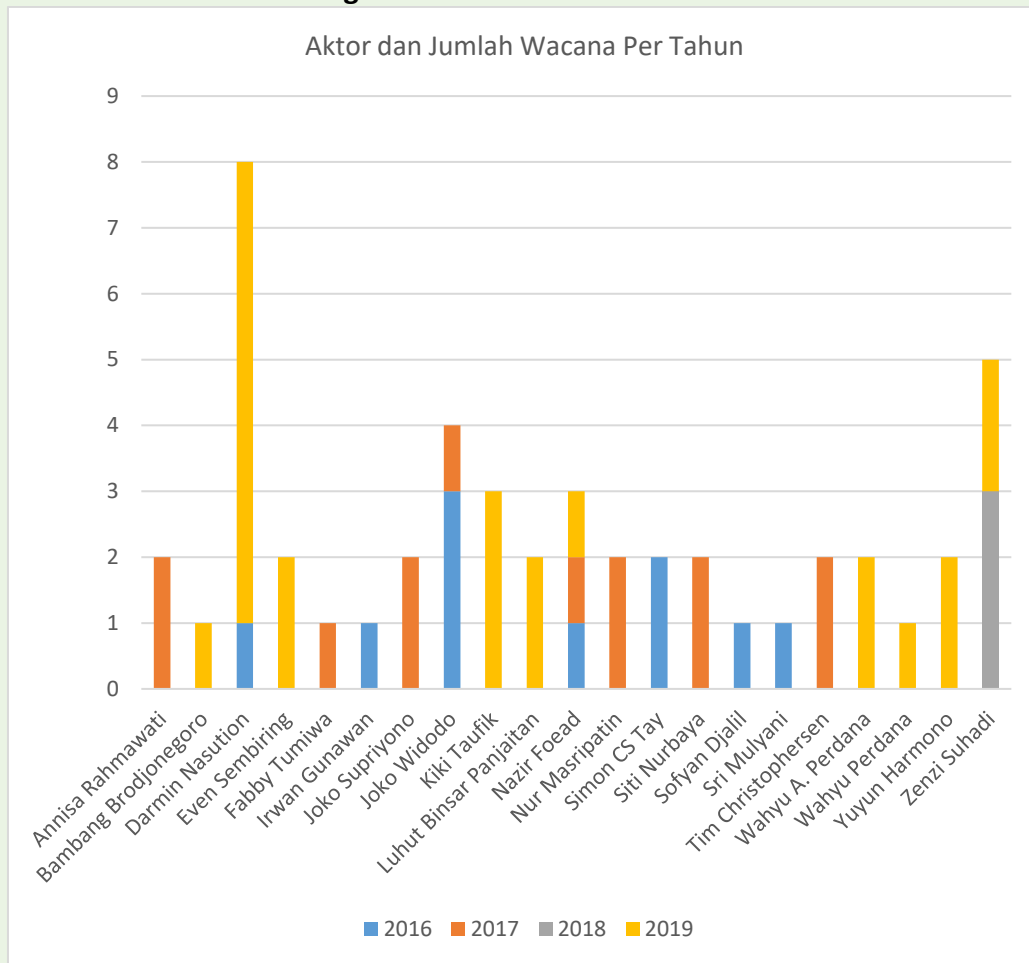
¹¹⁰ <https://www.thejakartapost.com/news/2013/04/24/gapki-says-no-moratorium-extension.html>

¹¹¹ <https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/11/environmentalists-call-for-strictly-sustainable-cpo-production.html>

3	Darmin Nasution	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4	Nazir Foead	Kepala (BRG)
5	Joko Widodo	Presiden RI
6	Sri Mulyani Indrawati	Direktur Pengelola Grup Bank Dunia
7	Sofyan Djalil	Ka Bappenas
8	Irwan Gunawan	WWF Indonesia
9	Joko Supriyono	Ketua Umum GAPKI
10	Tim Christophersen	Senior Pelaksana Program Hutan dan Perubahan iklim UN Environment
11	Fabby Tumiwa	Direktur Eksekutif IESR
12	Nur Masripatin	Dirjen Pengendali Perubahan Iklim KLHK
13	Annisa Rahmawati	Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia
14	Zenzi Suhadi	Kepala Departemen Advokasi Walhi
15	Kiki Taufik	Kepala Kampanye Forest Global untuk Indonesia Greenpeace
16	Yuyun Harmono	Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi
17	Even Sembiring	Manajer Kajian Kebijakan Walhi
18	Wahyu Perdana	Manager kampanye pangan, air, dan ekosistem esensial Walhi
19	Luhut Binsar Pandjaitan	Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman
20	Bambang Brodjonegoro	Kepala Bappenas

Dari peta jejaring wacana di atas, terlihat bahwa Darmin Nasution, menko perekonomian, adalah aktor yang paling produktif memproduksi wacana. Salah satu wacana yang diproduksinya menjadi perdebatan di Tirto adalah terkait ketertutupan informasi tentang HGU.

Pemilihan Aktor dan Framing Tirto



Dari grafik tersebut di atas nampak bahwa wacana perubahan iklim dan NDC Kehutanan paling banyak diproduksi pada tahun 2019. Aktor yang paling aktif memproduksi wacana adalah Darmin Nasution.

Meskipun aktor yang paling banyak memproduksi wacana adalah pemerintah, bukan berarti secara otomatis tirto dalam pemberitaannya menggunakan prespektif pemerintah. Tirto justru lebih banyak menggunakan prespektif masyarakat sipil dalam memberitakan perubahan iklim dan NDC kehutanan.

Tirto mulai menggunakan framing ekologi dalam memberitakan isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan. Hal itu nampak dari beberapa pemberitaan yang menempatkan argumentasi ekologis sebagai argumentasi penting dalam struktur beritanya.

Sentimen Positif terhadap Kebijakan Moratorium Sawit

Sentimen positif terhadap kebijakan moratorium sawit dibangun melalui narasi bahwa kebijakan moratorium bukan hanya sekedar menyelamatkan hutan namun juga mendorong produktivitas perusahaan sawit¹¹². Selain itu, sentiment positif terhadap

¹¹² <https://tirto.id/Ffo>

kebijakan moratorium sawit juga muncul dalam artikel-artikel tirto yang menggambarkan dukungan dari negara tetangga¹¹³.

Meskipun begitu, tirto tetap memberikan ruang terhadap pihak yang menolak moratorium sawit. Jika menurut pemerintah, moratorium untuk meningkatkan produktivitas bagi pengusaha dan petani¹¹⁴. Namun wacana pemerintah itu dibantah oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono. Menurutnya, produksi sawit di 2016 justru mengalami penurunan 1 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu hambatannya adalah wacana pemerintah untuk melakukan moratorium penanaman sawit¹¹⁵.

Namun narasi dalam artikel itu justru memberikan kesan bahwa penurunan produksi sawit, yang salah satu hambatan meningkatkan produksinya diklaim karena moratorium, menjadi tidak relevan. Pertama, ada penambahan di judul, kata menurun tipis (Produksi Minyak Sawit Indonesia Menurun Tipis)¹¹⁶. Artinya, walaupun benar terjadi penurunan, secara kuantitatif tidak significant.

Bukan hanya dalam judul. Dalam isi artikel tersebut di atas juga menunjukkan bahwa penurunan produksi minyak sawit bukan semata-mata disebabkan oleh kebijakan moratorium, namun juga factor iklim. Jadi klaim asosiasi perusahaan yang mengaitkan penurunan produksi sawit dengan kebijakan moratorium terkesan belum tentu benar.

Sentimen Negatif terhadap Implementasi Kebijakan Moratorium Sawit dan Ditutupnya Data HGU

Bila dalam pemberitaan mengenai kebijakan moratorium sawit terdapat sentiment positif dalam pemberitaan tirto, tidak demikian dalam implementasi kebijakannya. Dalam implementasi kebijakan moratorium sawit justru mendapatkan sentiment negatif.

Sentimen negatif itu dibangun melalui narasi bahwa pemerintah tidak konsisten melaksanakan kebijakan moratorium sawit. Ketidakkonsistenan itu misalnya diungkap oleh Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zeni Suhadi. Ia mempertanyakan keseriusan pemerintah terkait moratorium kelapa sawit. Pasalnya, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap melakukan pelepasan lahan seluas 9.964 hektare¹¹⁷.

Bukan hanya itu, pernyataan Menko ekonomi Darmin Nasution yang menyebutkan Indonesia memiliki 22,1 juta hektar kawasan hutan yang disiapkan untuk konservasi justru terkesan meragukan. Hal itu dikarenakan menurut Walhi justru ada 2 juta hektar kawasan hutan yang jadi sawit¹¹⁸.

¹¹³ <https://tirto.id/Fu7>

¹¹⁴ <https://tirto.id/Flk>

¹¹⁵ <https://tirto.id/Ch2x>

¹¹⁶ [ibid](#)

¹¹⁷ <https://tirto.id/Ddn5>

¹¹⁸ <https://tirto.id/Dhqa>

Sentimen negatif juga muncul terhadap kebijakan menutup data HGU. Sentimen negatif terkait hal tersebut dibangun dengan narasi bahwa ditutupnya data HGU justru menunjukkan ketidakseriusan pemerintah menyelesaikan konflik agrarian.

Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution menyatakan data HGU sawit, tertutup bagi publik. Manajer Kampanye Pangan, Air, & Ekosistem Esensial WALHI Wahyu A. Perdana menilai, langkah itu merupakan kemunduran dari upaya pemerintah menyelesaikan konflik lahan. Sebab masalah itu bergantung pada kejelasan dan transparansi data untuk mengatasi tumpang tindih kepemilikan lahan. Langkah itu dapat menyebabkan peningkatan konflik dengan perkebunan, akibat tidak jelasnya data¹¹⁹

Catatan Lain: Target NDC Kuran Ambisius

Wacana lain yang penting adalah persoalan target NDC Indonesia yang oleh beberapa pihak dinilai kurang ambisius. Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan target KLHK yakni penurunan emisi karbon 29 persen di sektor kehutanan sudah super ambisius¹²⁰. Benarkah target NDC di sektor kehutanan kurang ambisius? Apa penyebabnya? Ini akan menjadi perdebatan yang menarik jika dieksplorasi lebih mendalam. Sayang eksplorasi ke arah itu belum dilakukan.

¹¹⁹ <https://tirto.id/Ds9t>

¹²⁰ <https://tirto.id/Crzt>

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari analisis media tersebut dapat diambil kesimpulan yang nantinya akan menjadi pijakan bagi rekomendasi kampanye perubahan iklim dan mendukung transisi energi. Berikut kesimpulan dan rekomendasinya.

1. **Pertarungan pengetahuan di media massa terkait dengan persoalan sawit dan deforestasi.**

Dalam analisis media di atas terlihat adanya pertarungan pengetahuan terkait wacana sawit dan deforestasi. Bahkan di salah satu media muncul wacana bahwa sawit sejatinya tidak menimbulkan deforestasi, sehingga moratorium izin sawit merupakan tindakan yang keliru. Begitu pula moratorium izin di hutan primer dan lahan gambut. Bahkan Menteri KLHK Siti Nurbaya di dalam sebuah artikel di JPNN mengungkapkan wacana bahwa istilah deforestasi tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Wacana pembelaan terhadap sawit dan pembukaan lahan di hutan primer dan gambut diproduksi oleh aktor yang memiliki otoritas akademik. Mereka antara lain Guru Besar, Dekan di IPB dan juga pengamat ekonomi di sebuah lembaga penelitian di bidang ekonomi. Sementara, dalam dokumentasi media yang dianalisis tidak ada perlawanan yang seimbang dalam pertarungan wacana itu. Artinya, tidak ada aktor yang memiliki otoritas akademik yang menyanggah wacana dari peneliti dan akademisi yang mendukung ekspansi kebun sawit di hutan primer dan lahan gambut.

Rekomendasi

- a. Yayasan Madani perlu mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki otoritas akademik, baik dari universitas maupun lembaga penelitian, yang memiliki argumentasi yang mendukung argumentasi Madani terkait dengan isu perubahan iklim dan NDC di sektor kehutanan.
 - b. Langkah pertama yang perlu dilakukan Madani, mungkin adalah menjangir para akademisi, yang mendukung kampanye dan advokasi Madani. Upaya menjangir akademisi itu bisa melalui kegiatan call of paper dengan tema yang sudah ditentukan oleh Madani dan kemudian menjadikan mereka yang papernya terpilih sebagai pembicara di acara symposium atau lokakarya.
 - c. Langkah selanjutnya adalah Madani membangun *Community of Practice* (COP) dari akademisi yang memiliki concern yang sama dengan Madani terkait dengan isu kehutanan. Diskusi rutin yang melibatkan mereka dan diakhiri dengan press conference bersama mungkin menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk membangun COP itu.
2. **Hampir semua media massa, kecuali mongabay dan tirto menggunakan framing ekonomi dalam memberitakan isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan.**
Penggunaan framing ekonomi dalam memberitakan isu perubahan iklim ini menempatkan isu ekologis tidak penting bila berhadapan dengan isu ekonomi.

Pesan utama dari narasi isu ekonomi Kepentingan ekologi tidak boleh mengganggu kepentingan ekonomi, bukan sebaliknya. Kepentingan ekonomi yang dimaksud adalah kepentingan pengusaha sawit dan sektor kehutanan. Dari percakapan di media massa, narasi ekonomi nampak memenangkan perdebatan publik.

Rekomendasi:

- a. Terkait dengan berbagai framing media itulah perlu pemilahan media yang akan jadi alat Yayasan Madani Berkelanjutan untuk menjangkau audience kampanyenya. Media yang framing pemberitaannya tidak mendukung kampanye Madani, sebisa mungkin 'digeser' untuk menjadi netral. Media seperti Detik, CNNIndonesia, Kontan dan Bisnis Indonesia perlu ditarik menjadi media yang framingnya netral dalam memberitakan persoalan hutan dan perubahan iklim. Sementara media yang framingnya sudah sesuai dengan substansi kampanye dari Madani perlu diberikan apresiasi, semisal Mongabay dan Tirto
- b. Campaigner Yayasan Madani untuk isu perubahan iklim perlu memikirkan narasi yang akan digunakan dalam kampanye di media. Apakah menggunakan narasi ekologis atau narasi ekonomi atau justru menggunakan narasi alternatif lainnya?

Narasi ini tentu saja bukan sekedar untuk konsumsi media massa, namun juga harus disesuaikan dengan target kampanye yang akan disasar. Penggunaan narasi ekonomi dalam moratorium sawit oleh pemerintahan Jokowi dapat menjadi sebuah pelajaran bagi kampanye perubahan iklim kedepannya. Penggunaan narasi humor oleh masyarakat sipil yang berkampanye di isu anti-terorisme juga bisa dijadikan bahan pertimbangan.

Jika dirasa narasi pihak 'lawan' terlalu kuat untuk dilawan, Madani bisa menggeser narasi di wilayah yang Madani kuasai. Singkatnya, Madani tidak bermain di papan catur mereka, namun Madani membuat papan catur baru dan menarik para 'lawan' untuk bermain di papan catur itu.

Iklan Bank Danamon dengan judul, "Bank Danamon Indonesia Human Support" di Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=ut19z6tSs1I> adalah salah satu contoh produk kampanye dengan orientasi profit yang menggeser narasi. Iklan itu mencoba menggeser narasi bahwa bank yang baik adalah bank yang memiliki banyak ATM dan menawarkan banyak hadiah. Danamon, dalam iklan itu, menggeser narasi bahwa bank yang baik adalah bank yang mampu mewujudkan keinginan nasabahnya.

3. Narasi nasionalisme juga digunakan untuk melawan narasi ekologis terkait isu perubahan iklim dan NDC Kehutanan

Narasi nasionalisme juga digunakan untuk melawan narasi ekologi. Narasi nasionalisme ini digunakan bukan untuk melawan substansi isu yang menjadi perdebatan publik namun untuk 'membunuh' pembawa pesan. Mereka yang mengkampanyekan lingkungan bisa saja dilabeli sebagai anti nasionalisme, antek

asing dsb. Potensi pelabelan itu menjadi kuat karena sebagian NGOs masih menerima pendanaan dari lembaga donor luar negeri.

Rekomendasi

- a. Perlu pilihan narasi alternatif untuk melawan narasi nasionalisme ini, sehingga narasi yang mereka gunakan menjadi tidak relevan. Hasil penelitian TUK tentang kepemilikan lahan sawit oleh segelintir orang misalnya, bisa digunakan untuk mendelegitimasi narasi ekonomi yang sering digunakan oleh para pendukung sawit.
 - b. Narasi ekologi meskipun belum mendapatkan tempat di banyak media, namun bukan berarti sebuah narasi yang terlarang untuk digunakan. Mungkin perlu mengemas narasi ekologi itu sehingga bisa mendapatkan ruang yang lebih di banyak media. Mengemas narasi ekologi dengan data-data kerugian ekonomi bila deforestasi masih terjadi mungkin dapat dijadikan pilihan. Mengemas narasi ekologi dengan data-data kerugian yang dinominalkan secara ekonomi juga pernah digunakan oleh KPBB dalam kampanye melawan bensin bertimbal. Dan kampanye mereka terbukti berhasil.
 - c. Pemilihan narasi kampanye ini erat kaitannya dengan pemilihan audience kampanye yang tepat. Misalnya, bila kegiatan tujuan dari kampanye Madani dalam 1-2 tahun kedepan adalah memperpanjang dan memperkuat moratorium sawit, maka langkah pertama Madani adalah menentukan siapa pihak yang menjadi pengambil kebijakan dari tujuan kampanye itu. Misalnya, pengambil kebijakannya adalah Jokowi sebagai presiden, maka perlu didefinisikan siapa pihak yang akan dijadikan audience kampanye Madani. Audience ini adalah pihak yang didengar oleh Jokowi. Semakin spesifik audience semakin bagus. Setelah ditentukan audience dari kampanye, kemudian narasi, pesan dan pembawa pesan kampanye ditentukan. Setelah itu baru media penjangkauan yang paling efektif untuk menjangkau audience ditentukan.
4. **Tidak banyak media massa yang memberitakan secara mendalam terkait proses penyusunan NDC Kehutanan, kecuali Mongabay dan Tempo.**
Jarangnya media massa yang memberitakan persoalan NDC Kehutanan ini mungkin disebabkan beberapa wartawan memang kurang mengikuti dan memahami isu perubahan iklim.

Rekomendasi

- a. Kegiatan pengembangan kapasitas untuk wartawan dalam isu ini mungkin perlu dilakukan. Media gathering secara rutin atau pelatihan jurnalis perubahan iklim Indonesia bisa saja digelar. Penguatan pengetahuan wartawan terkait isu perubahan iklim perlu dilakukan, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat beban wartawan bertambah sehingga waktu mereka untuk belajar substansi dalam sebuah isu berkurang. Penguatan kapasitas kepada wartawan ini tentu saja berdasarkan pada pemetaan terhadap media yang ada.

- b. Dalam kegiatan pengembangan kapasitas ini, bisa juga menjadi sarana bagi Madani untuk memberikan apresiasi kepada media-media yang framing pemberitaannya sudah sejalan dengan kampanye Madani.

5. Beberapa media massa yang menjadi semacam humas dari KLHK. Media itu adalah JPNN dan Media Indonesia.

Beberapa media massa yang menjadi 'Humas' KLHK dilatarbelangi oleh relasi kuasa dan modal. Untuk Media Indonesia, hal itu dilatarbelakangi oleh sosok Menteri KLHK yang merupakan kader politik Partai Nasdem, partai politik yang memiliki kaitan dengan pemilik media massa itu. Sementara untuk JPNN lebih disebabkan relasi bisnis, iklan advertorial dari KLHK ke media massa tersebut.

Rekomendasi

1. Para campaigner perubahan iklim bisa memanfaatkan relasi tersebut. Bila ada isu atau wacana yang bisa diusung bersama, mungkin bisa memanfaatkan 'kedekatan' kedua media itu. Tentu sebelum melakukan intervensi ini perlu ada pemetaan media secara keseluruhan.



Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.

🌐 www.madaniberkelanjutan.id

📷 [@madaniberkelanjutan.id](https://www.instagram.com/madaniberkelanjutan.id)

🐦 [@yayasanmadani](https://www.twitter.com/yayasanmadani)

📘 Madani Berkelanjutan

Unduh update reportnya di www.madaniberkelanjutan.id
